



UNIKA DALAM WACANA
PUBLIK 2016-2017

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

EDITOR :
Alberta Rika Pratiwi

Diterbitkan dalam rangka
Dies Natalis Unika Soegijapranata ke-35

UNIKA DALAM WACANA PUBLIK 2016-2017 :
MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

EDITOR : Alberta Rika Pratiwi
Sekretaris editor : Ernanto
Desain sampul : Anggara PS

ISBN : 978-602-6865-36-6

Penerbit :
Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265
e-mail : penerbitan@unika.ac.id

Hak Cipta © 2017 Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265
e-mail : unika@unika.ac.id

KATA PENGANTAR

Penulisan buku bertajuk UNIKA DALAM WACANA diluncurkan setiap tahun dalam rangkaian acara Dies Natalis Universitas Katolik Soegijapranata. Unika dalam Wacana merupakan “selebrasi” untuk para dosen yang telah menuangkan gagasan atau ide dalam ruang publik berupa tulisan di media masa. Sebagai selebrasi dapat dimaknai untuk mengabarkan kepada publik bahwa para dosen di Universitas Katolik Soegijapranata memiliki banyak gagasan untuk masyarakat luas dan juga untuk para pembuat keputusan di negeri ini. Selain itu juga menjadi bukti rasa bangga seluruh civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata atas lontaran gagasan koleganya yang ditujukan untuk khalayak luas.

Thema UNIKA DALAM WACANA tahun 2017 dalam rangka Dies Natalis ke 35 tahun, mengambil topik terkait Refleksi Karya Unika tahun 2016 Peduli, Aktif dan Bermakna. Judul yang dipilih untuk buku adalah MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN. Judul tersebut sebagai suatu gambaran dari para penulis bahwa ide dan gagasan-gagasan yang tertuang merupakan refleksi mendalam untuk kebaikan dalam berbangsa dan bernegara – terutama untuk Tanah Air Indonesia ini. Ide dan gagasan yang dituangkan merupakan cetusan bagaimana segala sesuatunya agar menjadi baik dalam berkomunitas, berbangsa dan bernegara. Hal itulah yang menjadi dasar menemukan arti dan makna mencintai tanah air ini - Talenta pro Patria et Humanitate.

Menyimak buah pikir para kolega yang tertuang dalam buku ini – dalam satu untaian ide atau gagasan dan makna yang tertangkap, diharapkan memunculkan ide dan gagasan baru untuk hal terkait agar terjadi kesinambungan ide dan gagasan itu sendiri. Semoga juga menginspirasi. Terimakasih.

Semarang, Agustus 2017

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Bagian 1	
BIOMIMETIK UNTUK IDE DAN GAGASAN <i>Alberta Rika Pratiwi</i>	1
Bagian 2	
MENYATUKAN INSAN DALAM KEBERAGAMAN	13
NASIONALISME ALA SEPAKBOLA : PESAN DARI YOGYAKARTA <i>(Antonius Maria Laot Kian)</i>	14
PEDULI PADA TANAH AIR DAN KEMANUSIAAN <i>(Rm. Yohanes Gunawan PR)</i>	18
KEBHINEKAAN BERBINGKAI TOLERANSI <i>(Ign. Dadut Setiadi)</i>	21
MELESTARIKAN BUDAYA SRAWUNG <i>(Rm. Yohanes Gunawan PR)</i>	25
SRAWUNG MENUMBUHKAN SALING PERCAYA <i>(Y. Budi Widianarko)</i>	28
PERAN KOMUNIKASI DALAM TQM <i>(Ign. Dadut Setiadi)</i>	31
SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERIMAN <i>(Ign. Dadut Setiadi)</i>	34
KEMATIAN YANG MENYELAMATKAN <i>(Rm. Yohanes Gunawan PR)</i>	37
EKARISTI : PUNCAK KASIH ALLAH <i>(Ign. Dadut Setiadi)</i>	41

Bagian 3	
MENGELOLA TANAH AIR	45
KEMITRAAN MEMAJUKAN UMKM <i>(Andreas Lako)</i>	46
MENDESAK, REFORMASI TATAKELOLA PEMBANGUNAN <i>(Andreas Lako)</i>	50
MENCEGAH RASIONALISASI APBD <i>(Andreas Lako)</i>	55
MENCEGAH KRISIS APBN <i>(Andreas Lako)</i>	59
PAJAK PRO INVESTASI <i>(H. Sri Sulistyanto)</i>	63
POLITIK PRICING PELAYANAN PUBLIK <i>(H. Sri Sulistyanto)</i>	66
MENGUSUT PENGEMPLANG PAJAK <i>(Andreas Lako)</i>	69
MENGUSUT PENGGELAP PAJAK <i>(Andreas Lako)</i>	73
MEMACU AMNESTI PAJAK <i>(Andreas Lako)</i>	77
Bagian 4	
BIJAK MENGGUNAKAN SUMBER ALAM TANAH AIR	81
PERLUAS PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN ALAMI <i>(V. Kristina Ananingsih)</i>	82
MENAKAR SAYURAN SEHAT <i>(Probo Y. Nugrahedhi)</i>	85
DUA WAJAH PLASTIK KEMASAN PANGAN <i>(Inneke Hantoro)</i>	88
PARADIGMA BARU MENCEGAH KEGEMUKAN <i>(K. Ardanareswari)</i>	91

Bagian 5	
TRANSPORTASI YANG HUMANIS	95
MOMENTUM MEMBENAHAI TRANSPORTASI UMUM <i>(Djoko Setijowarno)</i>	96
MENYEGERAKAN PENATAAN TRANSPORTASI UMUM <i>(Djoko Setijowarno)</i>	66
MENGARAH JALAN SEARAH <i>(Djoko Setijowarno)</i>	103
DAERAH MINATI BANGUN KERETA RINGAN <i>(Djoko Setijowarno)</i>	106
MENUJU TRANSPORTASI KENDAL YANG TERTATA <i>(Djoko Setijowarno)</i>	109
KONEKTIVITAS LEWAT KERETA BANDARA <i>(Djoko Setijowarno)</i>	112
TERMINAL NYAMAN BUKAN MIMPI, TAPI NYATA <i>(Djoko Setijowarno)</i>	115
MEMBENAHAI TATAKELOLA BUS PARIWISATA <i>(Djoko Setijowarno)</i>	118
ANGKOT DAN OJEK ONLINE <i>(Djoko Setijowarno)</i>	121
Bagian 6	
MENJADI KOMUNITAS AKADEMIK	125
DEMOKRASI PENGETAHUAN DAN UNIVERSITAS <i>(Y. Budi Widianarko)</i>	126
MASA DEPAN E-LEARNING <i>(Ridwan Sanjaya)</i>	130
MUTU INDONESIA DAN KEPERCAYAAN DIRI <i>(Y. Budi Widianarko)</i>	133
TOILET <i>(Margaretha Sih Setija Utami)</i>	137
BERBAGI RISIKO TATA KELOLA RISET <i>(Y. Budi Widianarko)</i>	140
BUNDA TERESA - MGR. SOEGIJAPRANATA : VISUALISASI AJARAN KASIH <i>(Rm. Yohanes Gunawan PR)</i>	144

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

Bagian 1

Biomimetik untuk Ide dan Gagasan

BIOMIMETIK UNTUK IDE DAN GAGASAN

Alberta Rika Pratiwi

1.1 BIOMIMETIK

Kosakata biomimetik (dalam bahasa Inggris : biomimetic) merupakan istilah yang digunakan oleh para biolog untuk suatu produk atau mekanisme yang dibuat manusia sebagai hasil tiruan dari apa yang dimiliki baik mekanisme atau produk makhluk hidup tumbuhan atau hewan. Produk yang dihasilkan meniru produk atau mekanisme dari proses yang dilakukan oleh hewan atau tumbuhan di alam lingkungannya. Produk yang dihasilkan menggunakan landasan biomimetik telah dilakukan salah satunya dalam menghasilkan material silika, yang diawali hasil penelitian Kroger dkk yang dipublikasikan tahun 2001 dalam Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Silika dibuatnya meniru bagaimana makhluk hidup Diatom – sejenis ganggang sel tunggal yang 90% lebih selnya mengandung silika. Kroger menggunakan pendekatan biomimetik untuk menghasilkan material silika. Apa yang dilihat dari makhluk Diatom sehingga menghasilkan silika. Diatom adalah jenis ganggang bersel tunggal yang hidup di laut – sebagian besar bagian tubuhnya merupakan material silika dan diketahui sebagai silika dengan struktur berpori skala nano (satu per satu milyar)

dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Diatom hidup di lingkungan yang tidak ekstrim, yang dimaksud adalah hidup dalam kondisi tanpa suhu tinggi dan faktor lingkungan lainnya yang alami. Sementara silika yang diproduksi oleh Industri buatan manusia selama ini dibuat menggunakan kondisi-kondisi ekstrim – temperatur hingga ribuan derajat Celsius ditambah dengan bahan-bahan yang bersifat toksik.

Bagaimana Diatom membuat silika tersebut ? - Bagaimana silika terbentuk di tubuh Diatom?, Bagaimana prosesnya? - Apa saja bahan penyusunnya?. Sejumlah pertanyaan untuk mewujudkan gagasan bagaimana membuat atau memproduksi silika dengan cara meniru Diatom dalam menghasilkan silika – Itulah Biomimetik.

Tulisan di atas merupakan contoh bagaimana biomimetik menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu material tertentu yang bernilai tinggi untuk kesejahteraan manusia. Ide atau gagasan menghasilkan material dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh makhluk hidup di lingkungannya adalah suatu keniscayaan. Ada ratusan jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dipelajari mekanismenya dalam membuat atau menghasilkan material sebagai bagian tubuhnya atau sebagai mekanisme melangsungkan hidupnya untuk menginspirasi gagasan dan ide-ide baru yang bisa digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Menarik untuk berselancar membuat gagasan dan ide-ide baru dengan melihat bagaimana tumbuhan dan hewan melangsungkan hidupnya bersama alam. Apakah ini plagiasi apabila membuat produk karena meniru alam?. “Penciptaan itu tidak *de novo*” artinya penciptaan itu tidak pernah sendiri. Dalam arti bebas kalimat tersebut ingin menyampaikan bahwa ide, gagasan, wacana yang lahir dari pemikiran manusia selalu melalui proses-proses tertentu menggunakan seluruh pancaindra – seperti melihat dengan proses membaca atau secara langsung, mendengar, merasakan, mencecap dan lain sebagainya. Dengan melalui banyak proses, maka ide dan gagasan menghasilkan buah karya baik teknologi maupun non teknologi atau ilmu sosial akan muncul sebagai akumulasi yang mengendap secara dalam pada seseorang bersama alam lingkungannya. Di sanalah makna menjadi milik pribadi yang ditemukan juga secara pribadi.

1.2. KEKUATAN TULISAN

Ide dan gagasan yang muncul atau keluar dari buah-buah pikiran dan hati, diperlukan media sebagai wadah untuk sampai kepada pihak-pihak yang terkait atau masyarakat luas. Publik bertindak sebagai “pencatat” gagasan atau ide itu sendiri. Mengapa harus ada media untuk tempat ide dan gagasan tertuang?. Telah lama diketahui bagaimana suatu tulisan memiliki kekuatan untuk menggiring atau mempengaruhi pengambilan keputusan. Sejarah mencatat bagaimana tulisan dapat menjadi alat komunikasi efektif menyampaikan pesan ke kalayak yang lebih luas dibandingkan dengan cara bertutur. Media cetak dalam hal ini koran atau majalah menjadi tempat atau wadah untuk menampung bahasa tulisan tersebut kemudian mendistribusikan ke publik. Itulah efisiensi dan efektifnya sebuah media masa koran atau majalah.

Kekuatan sebuah tulisan bagi penulisnya sendiri adalah mencatat sejarah dirinya tentang apa yang pernah dilakukan. Menurut sastrawan terkenal Pamudya Ananta Tour bahwa, “.... *Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah dan menulis adalah bekerja untuk keabadian.....*”. Sangat jelas untuk apa sebuah ide dan gagasan perlu dituangkan dalam tulisan.

1.3. RANGKAIAN IDE DAN GAGASAN

Di lingkungan terdekat tempat dimana seseorang dilahirkan dan dibesarkan, biasanya menjadi tumpuan dan tujuan ide dan gagasannya. Artikel yang terangkum dalam buku ini juga semata hanya untuk tanah air ini. Ada 5 (lima) pengelompokan sebagai gagasan, ide dan wacana yang tertuang dalam buku Unika dalam Wacana ini. Pengelompokan menunjukkan adanya kesamaan atau dukungan satu sama lain terhadap ide dan gagasan yang meletup dari para penulis ini. Sebuah rangkaian ide dan gagasan dari berbagai disiplin ilmu, ternyata memiliki satu tujuan yakni membuat tanah air ini menjadi lebih baik di kemudian hari dalam berkomunitas, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berlandaskan keragaman dan kekayaan aneka budaya maupun alam menjadi insprasi memunculkan ide dan gagasan yang mewujud dalam tulisan-tulisan ini.

1.4. MENYATUKAN INSAN DALAM KEBERAGAMAN

Semua warga Indonesia dapat dipastikan bahwa Indonesia memiliki banyak agama, suku, pulau yang berpotensi adanya konflik oleh karena perbedaannya. Sangat dirasakan perlu adanya pengingat untuk tetap menjadi Indonesia seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Bagaimana menyatukan insan dalam keberagaman menjadi fokus bagaimana para penulis menuangkan gagasannya dengan caranya masing-masing, dengan melihat alam sekitar yang menyertai waktu hidupnya. Untuk itu Antonius Maria Laot Kian menulis artikel berjudul **Nasionalisme Ala Sepakbola : Pesan dari Yogya**. Artikel ini jelas memaknai bagaimana sejatinya menjadi warga negara Indonesia. Disusul dengan himbauan oleh seorang rohaniawan Rm Yohanes Gunawan PR (pengampu matakuliah Agama), bagaimana menjadi peduli dengan tanah air ini lewat artikelnya yang sangat lugas berjudul **Peduli pada Tanah Air dan Kemanusiaan**. Rm Gunawan memberikan patron yang jelas dalam berbangsa dan bernegara. Lewat sosok Mgr Soegijapranata (sebagai Uskup) disampaikan bahwa menurutnya pemikiran dan tindakan Soegijapranata sangat inklusif dan berorientasi pada bangsa dengan memberi contoh salah satunya bagaimana gereja mendukung pemerintahan Indonesia yang berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan memindahkan pusat gereja dari Semarang ke Yogyakarta (1946-1949).

Indonesia yang beragam membutuhkan suatu komitmen yang sangat tinggi dan pemahaman yang luar biasa atas keragaman budaya tanah air ini. Gagasan Ign Dadut Setiadi tertuang dalam artikel berjudul **Kebhinekaan Berbingkai Toleransi**. Artikel tersebut menempatkan toleransi sebagai satu cara bagaimana menjadi warga Indonesia. Toleransi digunakan untuk membungkus kebhinekaan di Indonesia, sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena budaya sejati warga yang sejak dulu dimiliki adalah budayanya srawung. Budaya ini merupakan modal untuk bisa bertoleransi. Sebagai komitmen dalam menjaga keberagaman ini, Rm Gunawan PR kembali menuliskan artikel **Melestarikan Budaya Srawung** yang didukung oleh Y. Budi Widianarko dengan artikelnya **Srawung Menumbuhkan Saling Percaya**. Menurutny srawung mengandung filosofi yang mendalam. Srawung tidak hanya dimaknai sebuah perjumpaan, tetapi dengan srawung ada rasa yang muncul yakni belajar, menimba inspirasi (ngangsu kawruh). Dalam artikelnya Y. Budi Widinarko menyampaikan bahwa "...pendidikan di semua jenjang termasuk pendidikan dalam keluarga, harus memberikan

ruang seluas-luasnya bagi terjadinya srawung antaranak bangsa dari segala kelompok SARA.

Saling percaya merupakan landasan kuat dalam membangun sebuah komunitas dalam tujuan apapun termasuk dalam berbangsa dan bernegara tentunya. Dalam sebuah komunitas dibutuhkan suatu komunikasi seperti yang diungkap oleh Ign. Dadut Setiadi. Menurutnya komunikasi menjadi landasan untuk memasuki sebuah arena TQM (*Total Quality Management*). Meski tidak nampak terkait dengan keragaman atau kebhinekaan Indonesia, namun ibarat sebuah perusahaan, Indonesia membutuhkan pengertian sejati tentang komunikasi untuk menjadi berkualitas termasuk mengatur segala sesuatunya. Untuk itu sumbangan pemikiran Dadut berjudul **Peran Komunikasi dalam Total Quality Management (TQM)** sangat relevan untuk situasi saat ini.

Secara spiritual bagaimana pentingnya menjaga keberagaman dari berbagai suku, agama dan ras, lagi-lagi Rm Gunawan dan Dadut menyerukan kiat sebagai warga negara dan warga gereja dalam menterjemahkan apa yang ada di Indonesia ini sebagai sebuah karunia. Artikel tentang **Sejahtera, Bermartabat dan Beriman** mengingatkan tentang peran keseimbangan dalam menjalani kehidupan seorang yang beriman secara katolik ditambah dengan artikel **Ekaristi : Puncak Kasih Allah dan Kematian yang Menyelamatkan**. Tiga artikel terakhir ini menjadi puncak penghayatan dalam menjaga kodrati kita sebagai insan yang beragam yang diciptakan oleh Tuhan sang Maha Agung.

1.5. MENGELOLA TANAH AIR

Sebuah tantangan tak terelakkan ketika menjadi tumbuh, hidup dan bermasyarakat di bumi Indonesia. Dengan keunikannya dalam mengisi kemerdekaan selama 72 tahun pada tahun 2017, apa sumbangan pemikiran para akademisi ini. Ada 9 artikel yang ditulis oleh dua ekonom Unika Soegijapranta. Andreas Lako menyoroti tentang pembangunan ekonomi. Para penggerak ekonomi skala kecil menjadi perhatiannya. Dimunculkannya gagasan agar Perbankan lebih bermitra dengan pengusaha kecil karena di sanalah terdapat tanggungjawab ikut serta memajukan kesejahteraan sosial, memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperkuat fondasi serta

basis perekonomian nasional - dalam artikelnya **berjudul Kemitraan Memajukan UMKM**, semakin jelas bagaimana membangun ekonomi nasional. Memajukan perekonomian nasional, menurut Andreas Lako juga harus disertai dengan tatakelola pembangunan. Ungkapan tersebut tercermin dalam tulisan **Mendesak, Reformasi Tatakelola Pembangunan**. Salah satu yang disoroti dalam tatakelola pembangunan, juga masalah APBN yang selama ini menjadi biang keladi seretnya kemajuan pembangunan, menjadi fokus perhatian Andreas Lako. Hal ini muncul dalam tulisannya tentang **Mencegah Rasionalisasi APBD dan Mencegah Krisis APBD**.

Masalah pengamanan keuangan negara tidak terlepas dari masuknya pajak ke negara. Empat artikel dari H. Sri Sulistyanto dan Andreas Lako, sangat intens menyorotinya. Untuk pembangunan kemajuan negara dari aspek pajak, maka tulisan-tulisan bertajuk pajak muncul sebagai sumbangsihnya, yakni **Pajak Pro Inventasi, Politik Pricing Pelayanan Publik, Mengusut Pengemplang Pajak, Mengusut Penggelap Pajak dan Memacu Amnesti Pajak**.

1.6. BIJAK MENGGUNAKAN SUMBER ALAM TANAH AIR

Indonesia secara demografi termasuk negara yang berada di iklim tropis. Wilayah dengan iklim tropis memiliki kelimpahan khususnya tumbuhan dan hewan. Dengan caranya sendiri, alam membentuk keanekaragaman yang tak terbatas. Satu sisi hal ini akan dapat menjadi petaka, karena menjadi incaran negara-negara lain untuk mengeksploitasi. Hal ini akan terjadi apabila sebagai warganya tidak memanfaatkan dan menjaga. Melalui tulisan V. Kristina Ananingsih menyadarkan akan tingginya biodiversitas tumbuhan yang dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai pewarna alami. Artikel berjudul **Perluas Penggunaan Pewarna Alami**, juga jelas terinspirasi indahna tumbuhan dalam mewarnai dirinya. Bagaimana jika makanan menjadi berwarna yang sama indahna dengan tumbuhan yang menghasilkan warna-warni. Artikel tersebut juga mengungkap bagaimana sebaiknya memanfaatkan sumber alam sekaligus menjaga kesehatan dari bahan alam yang berada di bumi Indonesia. Pada artikel **Menakar Sayuran Sehat** yang ditulis oleh Probo Y. Nugrahedi, menuangkan ide dan gagasannya agar sayur yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat optimal bagi tubuh

dari sisi kesehatan. Menurutnya, saat ini semakin tinggi tren menuju sehat dengan bahan alami sayur dan buah. Dengan cara pengolahan yang tepat dapat mengambil manfaat yang maksimal dari aspek kandungan komponen sayur atau buah tersebut.

Dengan pengolahan yang tepat untuk mengambil manfaat secara maksimal sangat mungkin digunakan untuk mencegah eksploitasi sumber alam. Dengan pengetahuan yang benar, dan memanfaatkan secara bijak, maka sumber alam akan menjadi sahabat yang baik dalam kehidupan manusia.

Paradigma Baru Mencegah Kegemukan oleh K. Ardanareswari memunculkan wacana bagaimana agar memanfaatkan mikroorganisme untuk alasan kesehatan dari sisi kelebihan berat badan seseorang yang ideal. Mikroorganisme yang bermanfaat untuk pencernaan disebut sebagai Probiotik. Mikroorganisme sebagai probiotik sangat banyak berada pada produk-produk olahan fermentasi khas di Indonesia yang juga menjadi salah satu karakteristik keragaman hayati mikroorganisme khas tropis.

Pada akhirnya sumber alam yang ada di tanah air ini perlu mendapat perhatian dari berbagai aspek untuk pembangunan kesehatan manusia. Meski terungkap melalui gagasan yang hanya diwakili oleh beberapa sumber hayati, namun melalui tulisan tersebut telah menginspirasi bahwa masih banyak sumber alam yang dapat digali secara arif untuk kesejahteraan.

1.7. TRANSPORTASI YANG HUMANIS

Djoko Setijowarno adalah salah satu orang yang terus menerus memfokuskan pada masalah transportasi di Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya dapat dipahami bagaimana rumitnya masalah transportasi di negara ini dan bagaimana gagasannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Artikel **Momentum Membenahi Transportasi Umum** merupakan gagasan yang muncul dari melihat realita kemacetan yang dipicu kepemilikan mobil pribadi yang semakin tinggi dan buruknya layanan transportasi umum. Demikian juga dengan artikel berjudul **Menyegerakan Penataan Transportasi Umum**. Sementara untuk artikel **Menuju Jalan Searah** yang ditulisnya mengingatkan terhadap perilaku semut hitam berjalan dengan tertib tanpa saling menyerobot dan berjalan selalu beriringan dan tanpa berlawanan arah. Bagaimana berkendara secara tertib tidak saling menyerobot menjadi

perhatiannya. Transportasi nyaman untuk seluruh pelosok di negeri ini juga lekat untuk terus menjadi perhatiannya, dengan ditulisnya artikel berjudul **Daerah Minati Bangun Kereta Ringan dan Menuju Transportasi Kendal yang Tertata**. Keperpihakan yang jelas untuk masyarakat kecil di kota kecil.

Wilayah kota dan daerah selalu menjadi perbincangan tentang perbedaannya termasuk masalah fasilitas publik. Banyak aspek yang membuat berbeda antara keduanya. Djoko Setijowarno mencoba mengikis perbedaan tersebut dengan cara menghubungkan. Bukan hanya mengikis namun mengatasi kerumitan akibat perbedaan tersebut. Wacana **Konektivitas Lewat Kereta Bandara** mencoba dituangkan dalam salah satu artikelnya di media masa – yang mungkin menjadi solusi yang ditawarkan dari sisi kemudahan bertransportasi antar kota yang berbeda fasilitas publik tersebut. Masih tentang kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum, maka ide membuat terminal yang nyaman tertuang dalam tulisannya berjudul **Terminal Nyaman Bukan Mimpi, Tapi Nyata** dan artikel yang terkait berjudul **Membenahi Tatakelola Bus Pariwisata** semakin menunjukkan keperpihakannya dalam masalah yang dihadapi deluruh strata masyarakat. Menurutnya, kenyamanan beraktivitas menggunakan transportasi umum sifatnya absolut. Karena hal tersebut menjadi dasar dalam membangun transportasi yang manusiawi. Transportasi yang semakin menjadi bagian terpenting untuk mobilitas manusia saat ini perlu perhatian terutama para pengambil keputusan. Perubahan perilaku konsumen terhadap alat transportasi saat ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi. Tulisan **Angkot dan Ojek Online**, memberikan penjelasan bagaimana idealnya memanfaatkan anugerah teknologi di abad 21 ini untuk bertransportasi.

1.8. MENJADI KOMUNITAS AKADEMIK

Kemajuan teknologi di abad ini berdampak sangat luas. Dampak yang nyata salah satunya adalah masalah kebebasan penyampaian pendapat akibat terbukanya akses terhadap internet dan media sosial. Demikian keprihatinan Y. Budi Widianarko terungkap dalam **tulisannya Demokrasi Pengetahuan dan Universitas**. Dalam hal ini Budi juga menyadari ada kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut, yakni mewujudkan demokrasi pengetahuan (*knowledge democracy*). Menurutnya, Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah bukan lagi menjadi monopoli ilmuwan universitas, karena banyak keahlian yang berakar

dalam pengalaman hidup warga. Sebagai universitas dituntut beradaptasi dalam proses demokratisasi pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).

Masih dalam konteks membahas komunitas akademik (Universitas) yang harus beradaptasi pada proses demokratisasi pengetahuan, pada abad ini dan seterusnya penggunaan *ged get* adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah lagi. Maka dari itu dalam proses belajar mengajar e-learning (pembelajaran berbasis elektronik) dianggap menjawab kondisi dan situasi serta perubahan perilaku generasi muda sebagai peserta didik. Tulisan **Masa Depan E-learning** oleh Ridwan Sanjaya menggambarkan kondisi yang akan dihadapi para anggota komunitas akademik baik peserta didik maupun peran pendidik.

Hal lain yang disoroti Y. Budi Widinarko sebagai komunitas akademik, terungkap dalam salah satu paragraf tulisannya yang berjudul **Mutu Indonesia dan Kepercayaan** disampaikan bahwa, “ Kita perlu menyadari bahwa kompetensi dibentuk sejak di kampus dan terus dikembangkan ketika berkarier di perusahaan atau organisasi. Itulah *esensi life long learning* (belajar sepanjang hayat), dan perguruan tinggi sebenarnya punya mandat untuk mempersiapkan individu yang siap dan mampu terus mempelajari hal-hal baru sesuai dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di kampus, serta sekaligus dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masyarakat”. Paragraf tersebut memperjelas tugas semua kalangan yang berada dalam komunitas akademik. Alasannya yang disampaikan juga realistis dengan mengambil contoh-contoh mahasiswa Unika yang menjadi diaspora.

Bagaimana menyiapkan peserta didik tidak luput dari pengamatan Margaretha Sih Setija Utami. Dengan menggunakan satu kata **Toilet** sebagai judul artikel yang dimuat dalam media massa. Margaretha memberikan ulasan bagaimana pendidikan awal di usia dini (dalam hal ini belajar mengeluarkan kotoran dari tubuh menggunakan sarana pembuangan seperti toilet) menjadi penting untuk perkembangan psikologis dan sosial individu. *Toilet training* menjadi penting untuk belajar mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri seseorang secara tepat, mengeluarkan kotoran pikiran, hati dan perut adalah hak yang menyehatkan seseorang dan jika tidak dilakukan secara benar akan menimbulkan sakit fisik, sakit hati dan juga rasa jijik. Meski saat ini *toilet training* bukan bagian kegiatan di perguruan tinggi, namun gagasan kembali melakukan *toilet training* menjadi salah satu solusi permasalahan psikologi hingga seseorang duduk di pendidikan tinggi

dapat dilakukan di tingkat keluarga.

Aktivitas dalam dunia akademik selain pendidikan adalah penelitian. “ Pengembangan riset harus ditempuh dengan cara-cara yang lebih pragmatis. Salah satu langkahnya yang dapat dilakukan adalah memutus gejala saling asing (*mutually exclusive*) di antara kegiatan penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk baru (inovasi) oleh industri. Dengan demikian diperkukan terobosan kebijakan tentang tata kelola riset berbasis pasa pembagian risiko di antara para pihak” . Kalimat-kalimat yang tertulis dalam **Berbagi Resiko Tata Kelola Riset oleh** Y. Budi Widianarko, meskipun hanya sebagai respon atas gagasan Johannes Eka Priyatna dalam “Diskusi Kompas” pada 27 September 2016 lalu, namun perlu menjadi bahan refleksi bagi dunia akademis terhadap kegiatan penelitian yang berjalan di Perguruan Tinggi.

Refleksi terpenting dalam komunitas akademik adalah menanyakan kembali mengapa dipanggil menjadi pendidik. Pendidik mendapatkan mandat untuk membangun generasi yang lebih muda. Merefleksikan seluruh karya untuk membangun sesama terutama generasi muda sangat jelas dicontohkan dalam sosok Bunda Theresa dari Calcuta yang hadir untuk kaum papa. Beliau bukan orang yang berasal dari dunia akademis namun mampu menghadirkan kekuatan kasih. Kekuatan kasih juga diharapkan hadir dalam kelas-kelas peserta didik dalam Universitas Katolik. Rm Gunawan PR menuliskan tentang Bunda Theresa dalam artikelnya berjudul **Bunda Theresa - Mgr Segijapranata : Visualisasi Ajaran Kasih**. Tentu tidak tanpa alasan menuliskannya - yang pasti bahwa nama Mgr Soegijaranata yang disandingkan dengan nama Theresa merupakan ajakan seluruh warga kampus menghadirkan kekuatan kasih seperti yang diperbuat oleh dua patron tersebut.

1.10. PENUTUP

Menemukan makna dari ide dan gagasan yang tertuang dalam artikel-artikel yang telah terbit dapat dimiliki oleh pembaca namun juga dapat hanya dimiliki oleh para penulis artikel. Ide dan gagasan yang mencuatpun dapat datang dari berbagai hal. Terlepas dari itu semua, inspirasi tak terbatas terus tersedia di alam semesta ini, sehingga terus akan ada gagasan dan ide yang bergulir sepanjang peradaban. Demikian juga dengan makna yang ditemukan dalam setiap sanubari.

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

Bagian 2

Menyatukan Insan Dalam Keberagaman

Nasionalisme *ala* Sepakbola: Pesan dari Yogyakarta ¹

Antonius Maria Laot Kian ²

Sabtu, 4 Februari 2017 merupakan hari bersejarah dalam persepakbolaan Indonesia yang mati suri sejak induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan FIFA. Betapa tidak! Pada hari tersebut, Presiden Joko Widodo membuka dengan resmi turnamen sepakbola berskala nasional bertajuk Piala Presiden. Kota Yogyakarta menjadi kota pembuka bagi penyelenggaraan turnamen ini. Tidak tanggung-tanggung, 20 tim sepakbola, yaitu 18 tim dari Liga Super Indonesia dan 2 (dua) tim dari Divisi Utama ikut meramaikan turnamen ini. Beberapa di antaranya dari ujung barat Indonesia, semisal Semen Padang FC dan Sriwijaya FC, sedangkan di timur Indonesia ada Persipura Jayapura dan Perseru Serui; dari Kalimantan ada Persiba Balikpapan, Barito Putra, Pusamania Borneo FC, sementara di Sulawesi terdapat PSM Makassar; sisa yang lain berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura.

Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan turnamen ini memberikan nuansa tersendiri; apalagi beberapa menteri pun turut menyertai Presiden. Dalam kebersahajaan busana putih dan disambut oleh keramahan Yogyakarta, pantaslah bagi kita untuk meninggalkan sejenak

1 Kolom Opini Harian Kedaulatan Rakyat, Senin, 6 Februari 2017, hal. 12.

2 Dosen FHK Unika Soegijapranata

hiruk-pikuk Jakarta. Abaikan sementara cerita-cerita sidang penistaan agama yang belakangan diikuti oleh aduan sang mantan Presiden karena merasa disadap dalam pusaran Pilkada DKI Jakarta; atau tentang Patrialis Akbar yang menodai MK lantaran disangkakan melakukan tindak pidana korupsi; lupakan sejenak bola-bola liar politik ibukota negara, dan berkonsentrasi pada bola di Stadion Maguwoharjo Sleman, yang menurut Presiden Joko Widodo: mempersatukan, menciptakan prestasi, dan menggembirakan! Melalui sepakbola, Presiden kita memberi pesan sederhana ini: nasionalisme.

Sepakbola itu Mempersatukan

Dalam sambutannya yang singkat, Presiden Jokowi memberi pesan agung nasionalisme dalam sepakbola, yaitu supaya menjadikan sepakbola sebagai pemersatu, sepakbola untuk menciptakan prestasi, dan sepakbola menjadi tontonan yang menggembirakan. Adalah Sindhunata, dalam salah satu catatan trilogi sepakbola-nya (*"Bola di Balik Bulan"*, 2002), menulis, "Diakui atau tidak, arena bola sejak dahulu kala selalu menjadi panggung, di mana orang menumpahkan rasa nasionalismenya... Di lapangan hijau, pemain Inggris tidak hanya menggiring bola, tetapi dianggap (atau menganggap diri) melakukan perbuatan patriotis. Dulu pernah kepala Terry Butcher (*stopper* Inggris) berdarah karena bertabrakan dengan kepala pemain Swedia dalam sebuah duel udara. Manajer Bobby Robson menganggap darah Butcher sebagai darah patriot yang tertetes untuk membela tanah tumpah darahnya".

"Chauvinisme" sepakbola ala Inggris memberikan gambaran bahwa meskipun setiap pemain berada dalam tradisi klub yang berbeda-beda, namun dalam satu tujuan membela tim nasional, setiap pemain bersatu. Hal itu hanya bisa terjadi apabila gesekan-gesekan perbedaan dikurangi. Rumah bangsa kita ibarat tim sepakbola. Diperlukan visi bersama yang menguatkan persaudaraan di antara perbedaan; dibutuhkan kerendahan hati untuk melepaskan perbedaan demi persatuan. Itulah sebabnya dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berulang kali memberi pesan untuk menciptakan sepakbola yang mempersatukan. Dalam *A Sociology of Football in a Global Context*, Jamie Cleland (2015) menguraikan bahwa sepanjang sejarah manusia, sepakbola telah menjadi semacam katalisator bagi ikatan sosial, kegembiraan dan integrasi. Belajar dari sepakbola, nasionalisme bermakna Bhineka Tunggal Ika!

Sepakbola itu Menciptakan Prestasi

Nihil prestasi. Demikianlah nasib tim sepakbola nasional kita dalam era sepakbola modern selepas juara AFF U-19 pada 2013. Agak sulit membanggakan timnas kita di sela-sela rapuhnya PSSI selepas juara AFF U-19 tersebut. Berbagai persoalan melanda persepakbolaan kita hingga berujung pada pembekuan PSSI oleh FIFA. Dalam non-ritmisnya perjalanan pengelolaan sepakbola nasional kita, Piala Presiden 2017 memberikan harapan bahwa setelah ini akan ada aliran prestasi yang membanggakan.

“Menciptakan prestasi”, mungkin hal tersebut sedang menuju kepunahan di negara ini. Beberapa pekan belakangan ini seluruh narasi kebangsaan kita dicemari oleh saling curiga yang akut. Alih-alih menghadirkan keberhasilan membanggakan di berbagai bidang pembangunan, kita disibukkan oleh aneka permasalahan kronis: korupsi, perpecahan antargolongan, pengkultusan kelompok, penyebaran berita bohong, yang berujung pada tindakan saling melaporkan; belum lagi narkoba yang terus menggerogoti generasi muda.

Sebagaimana sepakbola, menciptakan prestasi dalam hidup berbangsa merupakan hal yang paling penting. Banyaknya prestasi di berbagai bidang pembangunan menjadi tolok ukur “kesehatan” rumah bangsa kita. Demi menciptakan prestasi, John F Kennedy meminta untuk mempertanyakan apa yang sudah dibuat bagi negara. Demi menciptakan prestasi, Bung Karno dengan berani meminta supaya diberikan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Menciptakan prestasi itu sesederhana kesigapan seorang penjaga gawang untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan, demikian Ted Richards dalam *Soccer and Philosophy: Beautiful Thoughts on the Beautiful Game* (2010).

Sepakbola itu Menggembirakan

Sindhunata (2002) kembali menulis, “kespontanan, keapaadaan, kiranya harus tetap menjadi landasan bola. Bola kiranya tetap mempunyai jiwa kejujuran kanak-kanak. Tanpa kejujuran kanak-kanak, bola hanya akan menjadi kompleks taktik dan strategi, rumit dan membosankan”. Landasan sepakbola yang jujur dan apa adanya membuat penikmatnya mampu untuk saling berbagi kegembiraan. Sebagaimana sepakbola, tolok ukur kehidupan berbangsa ditentukan oleh kemampuan berbagi kegembiraan.

Kehidupan berbangsa harus dijalani dengan kegembiraan. Kegembiraan menciptakan *passion* yang memerdekakan. Kegembiraan menciptakan ikatan-ikatan emosional yang membangkitkan harapan untuk bertindak secara positif dalam segala hal. Tidaklah mengherankan bila permintaan Presiden Joko Widodo agar sepakbola harus menjadi tontonan yang menggembirakan terungkap pula dalam caranya yang santai dan selalu tersenyum menanggapi berbagai pertanyaan media. Sebaliknya, betapa membingungkan suasana politik berbangsa bila para mantan Presiden masih “berkiprah” dan menampilkan dimensi lain dari politik: penuh taktik, rekayasa, rumit, dan cenderung culas.

Dari bumi Yogyakarta yang berjiwa *ayem tentrem* serupa Indonesia kecil, 3 (tiga) pesan Presiden Joko Widodo melalui sepakbola sejatinya mengungkapkan bahwa nasionalisme merupakan sebuah pembelajaran yang terus-menerus, karena persatuan, prestasi, dan kegembiraan akan selalu berhadapan dengan disintegrasi bangsa. Kita berharap agar dari kota yang lain pun pesan-pesan tersebut dapat didengarkan.

Peduli pada Tanah Air dan Kemanusiaan ¹

Y. Gunawan, Pr ²

Tak terasa kita sudah memasuki sebulan lebih tahun 2017 ini. Kita pantas bersyukur banyak hal yang telah dicapai bangsa Indonesia pada tahun lalu. Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin memberi harapan bagi terwujudnya kemanusiaan dan kesejahteraan yang merata antar pulau. Sebut saja, misalnya peningkatan dan perbaikan pelayanan publik, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur di Jawa dan luar Jawa, pemberantasan korupsi dan pungli, dsb.

Sebagai warga bangsa kita masih mempunyai tantangan dan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Disadari bersama bahwa keprihatinan masih mewarnai masyarakat kita, baik konflik dengan isu agama, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, pungutan liar (pungli), kerusakan lingkungan hidup, *broken home*, pengangguran, dan sebagainya.

Tantangan lain di depan mata adalah pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tanggal 15 Februari 2017 di 101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Peristiwa itu akan menjadi ujian bagi partisipasi politik masyarakat dan peningkatan kualitas pelaksana, serta proses penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

1 Majalah Praba Th 68 No 5 Maret -I 2017

2 Kepala Campus Ministry Unika Soegijapranata Semarang

Lantas, sosok negarawan (pemimpin) macam apa yang dibutuhkan bangsa ini untuk menghadapi aneka tantangan tersebut? Saya berpendapat bahwa bangsa kita saat ini membutuhkan sosok negarawan (pemimpin) yang religius-humanis. Beriman kuat dan peduli pada keadaan rakyat (*bonum commune*).

Talenta pro Patria et Humanitate

Bangsa yang besar adalah bangsa menghargai dan tidak melupakan para pahlawannya. Dari figur para pahlawan kusuma bangsa, kita bisa berefleksi sekaligus menimba inspirasi guna menggapai mimpi. Dalam semangat nasionalisme dan religiositas, misalnya, kita bisa menggali sosok negarawan dalam diri Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ (1896-1963). Mgr Soegija diangkat menjadi pahlawan nasional dengan Kepres no. 152, tertanggal 26 Juli 1963. Dia juga dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan dengan Kepres/ Panglima Tertinggi ABRI No. 223/AB-AD, tanggal 17 Desember 1964.

Pemikiran dan tindakan Soegija sangat inklusif dan berorientasi pada bangsa dan negara ini. Sebagai contoh, ia mendukung pemerintahan Indonesia yang berpindah dari Jakarta Ke Yogyakarta, dengan memindahkan pusat gereja dari Semarang ke Yogyakarta (1946-1949). Untuk mendukung pengakuan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional, ia melakukan *silent diplomacy* ke berbagai negara Eropa dan Amerika. Selain itu, ia juga mendorong orang Katolik sejak awal kemerdekaan untuk menyumbangkan talenta-talenta untuk tanah air dan kemanusiaan (*talenta pro patria et humanitate*).

Talenta pro patria et humanitate itulah yang sekarang dihidupi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang sebagai motto bersama. Unika mengemban tanggung jawab sejarah mendidik generasi muda saat ini menjadi pribadi yang peduli pada tanah air dan kemanusiaan. Syukur kepada Allah kampus Unika Soegijapranata meraih Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan nilai "A" dari Pemerintah. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No. 0384/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017. Sebagai orang Katolik, kita pantas bangga karena Unika merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pertama di Provinsi Jawa Tengah (dari 249 PTS) yang meraih Akreditasi A.

Dalam Aksi Kemasyarakatan Katolik-Aksi Pancasila pada 8 Mei 1960, Mgr. Soegija menegaskan, "Sekarang (tidak besok atau lusa), kita harus sungguh-

sungguh menjadi: GARAM – garam-garam yang menggarami, masuk, mencebur, meluluhkan diri. Garam yang hanya berdiam diri, *thenguk-thenguk*, dia melalaikan kewajibannya sebagai garam”.

Dalam konteks ‘revolusi mental’ era Presiden Jokowi saat ini, Mgr. Soegija memberi *insight* pada generasi sekarang. Dalam sebuah pesan Natal, Mgr. Soegija menegaskan: *“Kristus telah melaksanakan pembangunan semesta mulai dengan membangun manusia. Hendaknya kita dalam menyelenggarakan pembangunan seluruhnya mengutamakan atau sekurang-kurangnya janganlah mengabaikan pembangunan mental dan rohani....”*.

Pembangunan mental dan pembangunan rohani yang ditawarkan oleh Mgr. Soegija adalah sebuah ‘revolusi mental’, yakni kemampuan dan kemauan untuk mengubah **habitus lama** (manusia tua) menuju **habitus baru** (manusia baru). Habitus lama yaitu hidup yang diwarnai “...egoistis, individualistis, kelobalobaan, gila akan hormat, dan pangkat”. Sedangkan **habitus baru** yaitu hidup yang diwarnai “...bertata-tertib, bertata-susila, sadar akan kewajibannya, sadar akan tanggungannya, setia, lugu, jujur, bebas dari penyakit suap...berani mengambil resiko; meskipun selalu waspada dan bijaksana (bertindak dengan perhitungan yang masuk akal), bersemangat sosial, dan altruistis”. Mari kita sebagai orang beriman Katolik yang berhati nasionalis, siap berevolusi mental dengan peduli pada tanah air dan kemanusiaan.

Kebhinekaan Berbingkai Toleransi ¹

Drs. Ign Dadut Setiadi MM ²

Indonesia merupakan negara terbesar ke-4 dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta di dunia setelah Cina yang berpenduduk sekitar 1,2 milyar, India dengan penduduk sekitar 1,06 milyar, dan AS dengan penduduk sekitar 294 juta. Tidak dipungkiri lagi Indonesia menjadi negara urutan pertama yang penduduknya menganut agama Islam dengan jumlah sekitar 199 juta atau 85 persen dari jumlah penduduknya dan selebihnya menganut agama Budha, Hindu, Katolik, Kristen, Konghucu dan aliran kepercayaan. Indonesia mempunyai suku berjumlah lebih kurang 1128 suku. Dengan melihat data tersebut Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya dan agama cukup banyak serta heterogenitas yang luar biasa sehingga munculah keberagaman atau kebhinekaan. Maka tidak bisa dipungkiri lagi akan muncul kelompok mayoritas dan minoritas. Hal ini apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesenjangan di berbagai aspek seperti ideologi, sosial, politik, budaya, keamanan sampai dengan ekonomi.

Kebhinekaan bukan hal yang asing di Indonesia karena negara kita memiliki potensi tersebut dengan jumlah penduduk, suku dan agama yang cukup banyak dan tumbuh subur dibanding negara lain. Kelimpahan dan berkat (banyaknya penduduk, suku dan agama) merupakan anugerah dari Tuhan

1 Majalah Inspirasi No. 150 Tahun XIII Februari 2017

2 Penulis adalah Anggota The Soegijapranata Institute Unika Soegijapranata

yang diberikan kepada Indonesia yang mestinya dijaga dan dirawat dengan baik agar kehidupan rakyat Indonesia tetap tenang dan nyaman. Maka, keragaman (kebhinekaan) haruslah dibingkai atau dijaga dengan sebuah sikap dan tindakan yang disebut toleransi.

Kehidupan toleransi sejak zaman dulu sudah muncul di bumi Indonesia. Toleransi dapat diartikan dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Toleransi di Indonesia selalu dihidupi dan diusahakan oleh para pemimpin negara maupun pemimpin agama, maka di negara Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan 2 (dua) model toleransi yaitu toleransi umat beragama dan toleransi sosial.

Toleransi umat beragama lebih mengedepankan sikap saling menghargai para pemeluk agama dan tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang sama dengan dirinya serta tidak mencela dan menjelekkan agama orang lain. Sedangkan toleransi sosial lebih mengutamakan kepada kelompok mayoritas untuk menghargai kelompok minoritas di dalam masyarakat. Dalam kehidupan politik saat ini pun haruslah diusahakan adanya toleransi politik bagi para pegiat politik dalam berbagai partai yang ada di Indonesia.

Di bumi pertiwi yang kita cintai kadang terjadi gesekan-gesekan yang diakibatkan munculnya pemicu adanya pertentangan dan pertikaian yang mudah meletup apabila dikaitkan dengan isu agama. Kadang beberapa oknum menggunakan isu agama untuk menjadi alat pemicu konflik. Mengapa agama dijadikan kambing hitam? Padahal dalam kehidupan agama ada 2 dimensi yaitu pribadi dan kelompok. Dua dimensi tersebut sangat mudah diusik karena agama menyangkut keyakinan pribadi yang hakiki pada setiap orang dan tidak bisa diintervensi baik pribadi, kelompok maupun negara.

Solusi yang sebenarnya terletak pada niat baik pemerintah dan rakyat untuk menghidupi bangsa ini dengan aman dan nyaman dan sekali lagi toleransi adalah kata kunci yang harus selalu dijaga dan dirawat untuk ditumbuhkan secara terus menerus dalam masyarakat. Contoh yang paling mudah adalah dengan dialog karya, sebuah kegiatan yang melepas segala atribut baik dari strata sosial, ekonomi, politik dan agama untuk mengadakan kegiatan sosial yang mengedepankan pada kohesivitas atau kehangatan untuk saling

memberi dan menerima dengan kerendahan hati bahwa kita semua sebagai manusia mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Pendidikan kunci utama

Sikap toleransi dapat dikembangkan dan dilestarikan melalui model dan sistem pendidikan karakter atau kepribadian. Pendidikan pertama yang harus ditekankan adalah mengedepankan sikap menghargai hakikat manusia. Meminjam istilah Romo Drijarkara, SJ, sikap ini biasa disebut memanusiasi manusia yang diharapkan dapat diajarkan sejak muda,. Hal ini haruslah dilaksanakan sejak dalam keluarga ketika orang tua membekali kehidupan agama pada orang muda. Dan kita sebagai orang yang lebih dewasa haruslah memberikan contoh bagaimana kita menjalankan kehidupan agama dengan tindakan-tindakan yang nyata bukan dengan teori-teori saja.

Pendidikan yang kedua dilakukan dengan menanamkan sikap positif, maksudnya adalah dalam pikiran manusia harus selalu ditanamkan sikap positif jadi selalu memikirkan hal-hal yang baik saling menghargai, membantu, melayani dan lain sebagainya. Pendidikan ketiga adalah pendidikan religiusitas karena dalam pendidikan itu selalu mengedepankan tentang kesadaran dalam diri dan perilaku manusia yang sempurna sebagai ciptaan Tuhan dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang heterogen dan kompleks.

Sejak kecil, anak-anak harus dikenalkan dengan sikap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam keluarga. Karena kita semua yakin dengan pendidikan toleransi yang dimulai dari keluarga niscaya ketika seorang anak keluar dalam lingkup kehidupan keluarga, anak akan mampu menghadapi perbedaan dan keragaman dengan pengalaman kehidupan toleransi dalam keluarga.

Dewasa ini perkembangan teknologi sangatlah mempengaruhi sikap hidup manusia. Tergantung manusianya, teknologi bisa menjadi alat untuk berkomunikasi yang menimbulkan provokasi negatif atau teknologi dapat digunakan sarana komunikasi menyebarkan kedamaian dan sukacita. Sebagai pribadi yang selalu ingin mengusahakan dan menjaga toleransi, perkembangan teknologi sangatlah membantu dalam menyebarkan informasi hal hal yang baik dalam menjaga nilai kebhinekaan dan toleransi.

Salah satu contoh yang sangat sederhana adalah mengirimkan ucapan selamat saat peringatan hari agama (Idul Fitri, Natal, Waisak, Galungan) pemeluk agama lain yang merayakannya dengan menggunakan SMS, WA, BBM, e-mail dan lain sebagainya. Orang tua sebaiknya memberi contoh kepada generasi muda supaya selalu memberikan contoh dengan karya nyata bukan mengajarkan teori-teori saja.

Dengan karya atau dialog karya orang-orang muda bisa menangkap dengan baik pesan tersebut baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat. Kebhinekaan di negara kita tercinta Indonesia ini adalah sebuah karunia dari Tuhan dan tidak dimiliki oleh negara manapun, maka haruslah kita jaga dan kita rawat dengan sebuah bingkai yang bernama toleransi. Dalam hal ini pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus semakin menyadari bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna maka sudah sewajarnya kebhinekaan yang ada di bumi Indonesia ini harus tetap dijaga dengan dibarengi toleransi yang selalu terus diusahakan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat.

Melestarikan Budaya Srawung ¹

Y. Gunawan, Pr ²

Srawung adalah sebuah istilah Jawa yang mengandung arti kumpul atau pertemuan yang dilakukan lebih dari satu orang atau kelompok. Dalam tradisi masyarakat pedesaan, istilah 'srawung' sudah akrab di telinga mereka, karena hal itu merupakan media untuk saling bercerita tentang realitas kehidupan.

Srawung mengandung filosofi yang mendalam. Srawung tidak hanya dimaknai sebuah perjumpaan. Dari srawung itulah ada sebetuk rasa yang muncul, yakni belajar, menimba inspirasi (ngangsu kawruh).

Dengan demikian, srawung merupakan bagian dari tatanan nilai yang melekat secara khas dalam khazanah kesadaran di kalangan masyarakat. Dalam srawung, masyarakat bisa saling ngudoroso atau menyampaikan realitas yang terjadi di sekitarnya. Tidak hanya apa yang ada dalam pikiran, tetapi apa yang ada dalam perasaan mereka pun semua bisa diungkapkan.

Srawung juga merupakan pengalaman-pengalaman batin yang kadang sulit dibahasakan, tapi terasa di hati. Maka, dengan adanya srawung inilah banyak permasalahan dalam realitas kehidupan ini bisa dibicarakan, dicarikan solusi secara bersama.

1 <http://jateng.tribunnews.com/2016/11/05/melestarikan-budaya-srawung>

2 Pengajar Religiositas dan Filsafat di Unika Soegijapranta Semarang

Didorong atas kerinduan ibu pertiwi Indonesia yang damai dan penuh toleran, hampir seratus mahasiswa dari perguruan tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu. Mereka duduk bersama menggelar kegiatan “Angkringan Lintas Iman & Tour Kampung”.

Apresiasi pantas diberikan kepada Campus Ministry Universitas Sanata Dharma yang memfasilitasi kegiatan ini pada Sabtu-Minggu, (29-30/10). Acara Angkringan Lintas Iman ini mengangkat tema: “Bersama Merawat Keberagaman”.

Kampus Srawung Kampung

Menjelang kegiatan Pilkada 2017 di beberapa tempat, suhu politik memanas. Suasana masyarakat pun ikut bergejolak. Kaum muda sebagai kaum intelektual yang sedang menggembelng diri dalam dunia kampus, perlu menyadari diri sebagai bagian dari keluarga besar umat manusia kendati berbeda agama dan etnis.

Kampus adalah rumah belajar. Di sana banyak hal yang bisa dipelajari. Termasuk belajar hidup bertoleransi. Belajar merawat keberagaman. Belajar menjadi pribadi nasionalis sekaligus religius. Juga menjadi pribadi cerdas yang humanis.

Bangsa ini memiliki seorang pahlawan yang nasionalis sekaligus religius. Oleh Presiden Soekarno ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giritunggal Semarang. Ia lahir 120 tahun yang lalu, tepatnya, 25 November 1896. Mgr. Albertus Soegijapranata SJ namanya.

Dalam Film Soegija karya Garin Nugroho (2012), diangkat pesan moral dari Mgr Soegijapranata yang masih aktual dengan kondisi Indonesia masa kini. Dikatakan,

“Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar, di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian dan permusuhan”.

Kesadaran sebagai keluarga besar umat manusia ini penting untuk mewujudkan kehidupan bersama yang toleran, harmonis, rukun, dan damai. Mengutip filsuf Prof. N. Driyarkara SJ (1913-1967), perlu manusia membangun kota, dan kota membangun manusia. Baik buruknya sebuah kota, mentalitas macam apa yang berkembang, tergantung manusia yang mengelola kota itu.

Apa yang dibuat para mahasiswa lintas iman itu menjadi 'oase kasih' bagi ibu pertiwi yang sedang bergolak di ibu kota. Pada hari Minggu pagi, dengan membawa dua bendera merah putih seluruh peserta Angkringan Lintas Iman mengadakan tour kunjungan ke kampung Gowongan dan Kampung Rejowinangun.

Kampung Gowongan dicanangkan sebagai Kampung Pancasila oleh Walikota Yogyakarta pada tahun 2011. Sementara Kampung Rejowinangun dikenal sebagai pemenang lomba kampung ketahanan pangan tingkat DIY, baik bidang kerajinan, herbal (toga), sayuran, budaya, dan kuliner.

Di sana diadakan dialog, sarasehan dan sharing bersama upaya warga kampung dalam mewujudkan toleransi dan persaudaraan. Para mahasiswa menimba inspirasi dari upaya warga kampung dalam mewujudkan kampung yang toleran. Di situlah tampak nyata Kampus 'Srawung' Kampung, atau Kampus Kumpul Kampung. Dengan srawung, kesalahpahaman bisa diretas. Dengan srawung, kecurigaan antar pemeluk agama bisa diatasi. Di sana ada komunikasi yang terjadi.

Pada akhir acara mereka dengan mantap menyanyikan 'Pancasila Rumah Kita' (Franky Sahilatua). "Pancasila rumah kita / rumah untuk kita semua/ nilai dasar Indonesia rumah kita selamanya// . Untuk semua puji namanya/ untuk semua cinta sesama/ untuk semua warna menyatu/ untuk semua bersambung rasa/ untuk semua saling membagi/ pada semua insan, sama dapat sama rasa/ oh Indonesiaku (oh Indonesia)".

Semoga makin banyak orang yang tergerak mewujudkan toleransi dan sikap saling menghargai perbedaan yang ada di bumi NKRI yang ber-Pancasila ini.

Srawung Menumbuhkan Saling Percaya ¹

Prof. Dr. Y. Budi Widianarko ²

"Pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan dalam keluarga, harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi terjadinya srawung antaranak bangsa dari segala kelompok SARA"

*"As contagion of sickness makes sickness, contagion of trust can make trust" -
Marianne Moore*

DALAM ekologi koeksistensi (coexistence) dimaknai - salah satunya - sebagai "Hidup berdampingannya dua atau lebih spesies (mahluk hidup) di habitat yang sama di mana satu sama lain tidak saling menyingkirkan" (Begon et al., 2006). Secara lebih sederhana koeksistensi dapat dimaknai sebagai tindakan atau keadaan hidup berdampingan dalam damai (the act or state of coexisting). Hidup berdampingan dengan damai mensyaratkan adanya rasa saling percaya (trust) dari kedua belah pihak.

Yang menarik, kita bisa belajar dari Marianne Moore dalam kutipan di atas bahwa seperti penyakit menular trust juga dapat ditularkan. Meskipun sederhana, ungkapan Moore ini mungkin tidak kalah dari aneka konsep

1 Suara Merdeka 26 Januari 2017

2 Rektor Unika Soegijapranata dan Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

rekonsialiasi yang telah banyak dilontarkan seperti pembauran, kerukunan antarumat, dan aneka "jargon" sejenis. Trust dapat ditumbuh kembangkan melalui pergaulan, pertemanan dan persahabatan (3-P) antar perorangan.

Itulah sawung! Menumbuhkembangkan trust adalah suatu upaya jangka panjang dan harus berkelanjutan. Dan dua wahana yang paling vital dalam membuka peluang terjadinya sawung adalah pendidikan dan ruang publik (fisik maupun virtual).

Pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan dalam keluarga, harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi terjadinya sawung antaranak bangsa dari segala kelompok SARA. Hal ini tidak berarti menghalangi keberadaan lembaga-lembaga pendidikan berciri khusus (misalnya agama). Pada lembaga-lembaga khusus ini sawung tidak harus berlangsung secara internal, tetapi pengembangan semangat inklusif sangat diharapkan.

Pada setiap anak didik perlu ditanamkan kesadaran akan keberagaman warga sebangsa. Dalam spirit ini, Universitas Tsukuba bahkan telah mengembangkan kajian tingkat lanjut - hingga ke jenjang pendidikan doktor (S-3) - tentang Koeksistensi Manusia (Human Coexistence) .

Menyadari bahwa abad ke-21 adalah era koeksistensi dan simbiosis manusia. Universitas tersebut memiliki Jurusan Koeksistensi Manusia yang bertujuan mengeksplorasi dan mempraktikkan sebuah konsep pendidikan baru - menggantikan konsep pendidikan masyarakat modern yang berbasis pada prinsip meritokrasi (meritocracy) yang terlalu menitikberatkan pada pengembangan keterampilan perorangan dan persaingan dengan sesama.

Sebagai bidang kajian yang baru lahir, pendidikan untuk koeksistensi manusia (PUKM) dikembangkan sebagai pendidikan yang bertujuan mengembangkan koeksistensi, semangat timbal balik, peduli dan hormat (coexistence, reciprocity, care and respect) tanpa diskriminasi atau persaingan dengan pihak lain. Muara dari PUKM adalah kehidupan yang baik ("good life") untuk semua dengan cara pengembangan sistem pendidikan, konsep sekolah dan metodenya, serta menggunakan dalam praktik.

Ruang Publik

Ruang publik baik yang fisik – mall, pasar, rumah makan, gedung olahraga, taman, kebun binatang – dan arena rekreasi, maupun yang virtual – radio, surat kabar, televisi, internet – harus memberikan peluang seluas-luasnya untuk mendorong terjadinya srawung di antara sesama anak bangsa dengan keberagaman SARA-nya. Pasar adalah ruang publik yang penting untuk mewujudkan srawung. Pasar memberi ruang untuk terjadinya interaksi inklusif.

Pasar Imlek Semawis (PIS), misalnya, meskipun berlangung di lokalitas spesifik Pecinan dan menampilkan pernik-pernik khas “budaya Tionghoa”, namun karena sifatnya yang terbuka dan inklusif, PIS berpeluang untuk menjadi salah satu motor penggerak lahirnya kohesi dan solidaritas sosial di kota Semarang.

Apalagi tahun ini PIS mengangkat tema “Obar Abir” yang secara telak memihak pada dan merayakan keberagaman. Mewujudkan dunia pendidikan dan ruang publik yang dapat menumbuhkembangkan trust antaranak bangsa adalah salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini.

Kegagalan dalam mengatasi tantangan ini hanya akan menjerumuskan bangsa yang “sempat” bangsa akan ke-binekaannya ini menuju sekadar kumpulan suku-suku dan kelompok agama dan aliran yang tidak percaya satu sama lain. Dan jika itu terjadi maka panggung politik Indonesia hanya akan terus-menerus diwarnai pertarungan demi kepentingan kelompok semata – bukan kepentingan bangsa yang berbineka.

Peran Komunikasi dalam TQM ¹

Drs. Ign. Dadut Setiadi, MM ²

SETIAP manusia dalam menunjang kelancaran aktivitas kehidupannya menggunakan komunikasi kepada orang lain agar tujuan yang diharapkan atau diinginkan dapat tercapai. Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat memahaminya. Komunikasi berfungsi untuk mengendalikan banyaknya pesan yang disampaikan, memotivasi untuk menyampikan pesan, ekpresi perasaan dan yang paling utama adalah menyampaikan informasi.

Komunikasi dapat dilakukan dengan cara verbal atau nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa atau perkataan yang berisi pesan-pesan, sedangkan komunikasi nonverbal dilakukan dengan berbagai cara seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh dan kekuatan jarak antar individu dalam melakukan percakapan. Kualitas komunikasi ditentukan oleh seberapa jauh pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya. Hal itu dapat dipengaruhi dengan sikap, pengetahuan (tingkat pendidikan), keterampilan dan sistem sosiokultural yang dianut oleh seorang komunikator (pengirim) dan komunikasi (penerima).

1 Tribun Jateng 17 Mei 2017

2 Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi dan Anggota The Soegijapranata Institute Unika Soegijapranata

Sebelum menjelaskan pengertian Total Quality Manajemen atau sering disebut dengan TQM, penulis akan mencoba menjelaskan tentang sejarah singkat munculnya TQM. Evolusi gerakan total quality dimulai tahun 1920 yang ditemukan oleh Frederick Taylor yang sering disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Aspek yang paling fundamental dan manajemen ilmiah adalah pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. TQM dikembangkan pertama kali pada tahun 1950 oleh Dr. W. Edward Darning seorang ilmuwan AS yang akhirnya sampai sekarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Jepang, kadang orang mengira bahwa TQM itu berasal dari Jepang.

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana dalam bukunya Total Quality Management (2001) adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Jadi TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Agar sebuah perusahaan atau organisasi sukses dalam menjalankan harus berkonsentrasi pada 8 (delapan) elemen kunci yaitu : Etika (*etics*), Integritas (*Integrity*), Kepercayaan (*trust*), Pelatihan (*training*), Kerja Tim (*team work*), Kepemimpinan (*leadership*), Penghargaan (*recognition*) dan Komunikasi (*Communication*).

Komunikasi akan mengikat segala sesuatu secara bersama-sama. Dimulai dari pondasi sampai ke atap dari suatu bangunan TQM, semua elemen diikat oleh campuran semen pengikat berupa komunikasi. Komunikasi bertindak sebagai sebuah mata rantai penghubung antara semua elemen TQM. Komunikasi berarti sebuah pemahaman bersama terhadap satu atau sekelompok ide-ide antara pengirim dan penerima informasi. TQM yang sukses menuntut komunikasi dengan, dan/ atau diantara, semua anggota organisasi, pemasok dan juga pelanggan. Para Supervisor harus memelihara keterbukaan dari arus komunikasi dimana seluruh karyawannya dapat mengirim dan menerima semua informasi tentang proses-proses TQM. Adalah suatu hal yang vital bahwa komunikasi harus dirangkai dengan penyampaian informasi yang benar bukan dengan informasi yang keliru. Supaya komunikasi bisa menjadi sesuatu yang dapat dipercaya maka pesan yang disampaikan harus jelas dan penerima informasi harus memiliki penafsiran yang sama dengan apa

yang dimaksud pengirimnya. Berdasarkan arahnya, komunikasi dapat dibedakan atas:

- a) Komunikasi ke bawah. Komunikasi jenis ini merupakan bentuk dominan dari komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Metoda presentasi dan diskusi biasanya didasarkan pada jenis komunikasi ini. Dengan cara ini pula para Supervisor dapat memberikan penjelasan yang baik tentang TQM kepada semua karyawannya.
- b) Komunikasi ke atas. Melalui komunikasi jenis ini karyawan-karyawan dari level yang lebih rendah dapat memberikan saran-saran atau usulan-usulan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang pengaruh dari TQM dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Selama karyawan-karyawan tersebut memberikan kritik-kritik yang konstruktif dan mendalam, para 'Supervisor harus berusaha mendengarkan dengan cermat dan efektif untuk memperbaiki situasi yang muncul dari penerapan TQM. Komunikasi jenis ini akan membentuk sebuah tingkat kepercayaan yang baik antara para Supervisor dengan bawahan-bawahannya. Komunikasi jenis ini juga mirip dengan komunikasi pemberian wewenang, dimana para Supervisor tetap terbuka untuk menerima dan mendengarkan bawahan-bawahannya.
- c) Komunikasi ke samping. Jenis komunikasi ini juga penting sebab ia sangat berguna untuk mematahkan penghalang antar departemen. Ia juga memudahkan urusan dengan pelanggan dan pemasok dalam cara yang lebih profesional.

Dari penjelasan diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sukses tidaknya sebuah perusahaan atau organisasi dalam menggunakan Total Quality Management adalah melibatkan seluruh individu untuk berkomitmen dalam mengembangkan perusahaan atau organisasinya tentunya dengan komunikasi yang terbuka dan jujur maka niscaya Total Quality Management akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sejahtera, Bermartabat, dan Beriman ¹

Drs. Ign Dadut Setiadi MM ²

KONFERENSI Waligereja Indonesia (KWI) dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) tahun 2016 menetapkan tema Natal bersama "Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juruselamat, Yaitu Kristus, Tuhan di Kota Daud" (Lukas 2:11).

Tema ini mengajak seluruh umat untuk bersukacita karena Allah berkenan turun ke dunia untuk turut dalam kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan dalam menghadapi banyak permasalahan. Ini merupakan bukti cinta Tuhan pada umat-Nya. Natal tahun ini umat di Keskupan Agung Semarang (KAS) telah memiliki sebuah visi bersama yaitu "Terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman."

Sejalan dengan visi tersebut harapan umat Katolik di Keskupan Agung Semarang dapat turut aktif menghadapi situasi dan dinamika perkembangan di negara Indonesia dewasa ini. Dalam cita-cita umat KAS tujuan yang akan dicapai adalah sebuah peradaban kasih.

Peradaban kasih itu sendiri suatu kebudayaan yang telah mencapai taraf tinggi dan kompleks yang dilandasi dengan kasih. Namun untuk menuju

1 Suara Merdeka Sabtu, 24 Desember 2016

2 Anggota The Soegijapranata Institute Unika Soegijapranata

peradaban kasih tersebut ada tiga aspek yang menjadi dasar berpijak yaitu sejahtera, bermartabat dan beriman.

Sejahtera mengandung makna bahwa manusia Indonesia haruslah tercukupinya kebutuhan tentang rasa aman sentosa dari kekhawatiran terutama mencakup soal pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Bermartabat adalah berperilaku hidup berdasar nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian, dan melestarikan keutuhan ciptaan.

Dalam bermartabat manusia juga dituntut tidak hanya mengusahakan hidup kesalehan individual tetapi juga kesalehan sosial itu dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga pluralisme, mengembangkan gotong royong, tidak diskriminatif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan hak-hak dasar.

Beriman sebuah tataran yang paling utama sebuah relasi kasih antara Allah dan manusia dan merupakan relasi yang secara mendasar akan memengaruhi pula relasinya dengan saudara seiman, sesama manusia dan sesama ciptaan Allah. Dalam mengembangkan relasi iman tersebut diperlukan aspek pengetahuan, penghayatan, pengungkapan dan perwujudan iman.

Natal yang Sejahtera

Kehidupan yang damai dan sejahtera adalah dambaan setiap manusia. Yang menjadi sebuah permenungan bahwa di dunia sekarang ini cukup sulit menemukan damai sejahtera. Bagi kita manusia yang hidup di dunia ini damai sejahtera sifatnya hanya sementara dan kadang kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari.

Maka dengan perayaan Natal tahun ini kita semua yang telah memperoleh keselamatan dari pengorbanan Tuhan untuk turut terlibat dalam menyejahterakan sesama kita tanpa membandingkan perbedaan apa pun. Jika Natal tahun ini dapat membawa kesejahteraan bagi umat manusia niscaya kehidupan manusia di mana pun berada terutama di tanah air kita Indonesia akan dilimpahi kedamaian dan kerukunan.

Bila kesejahteraan telah melimpah dalam kehidupan manusia maka martabat kemanusiaan akan dihormati dan dijunjung tinggi oleh sesama manusia

karena adanya saling cinta dan kasih, inilah makna Natal yang paling mendalam sebagaimana Yesus lahir di kandang hewan namun oleh Tuhan martabatnya ditinggikan karena kedatangan tiga raja.

Dalam merayakan Natal, umat kristiani diharapkan semakin mengembangkan imannya yang dihayati dalam bentuk mengembangkan relasi dengan sesama yang berbeda suku, agama dan ras serta aliran yang diwujudkan dengan kerja sama dalam tataran kegiatan sosial dan budaya. Dengan semakin dikembangkannya relasi sesama maka kita semua berharap peringatan Natal akan semakin meningkatkan keimanan kita pada Allah Bapa.

Semoga Natal tahun ini akan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia yang bermartabat sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna serta diharapkan keimanan kita kepada Tuhan akan membawa kedamaian dan kerukunan khususnya di Indonesia.

Kematian yang Menyelamatkan ¹

Y. Gunawan, Pr ²

Paskah kembali datang. Kesempatan untuk berefleksi dan introspeksi diri. Umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Paskah, perayaan kebangkitan Yesus (Isa Almasih) yang wafat disalib. Wafat Yesus dirayakan dalam ibadah Jumat Agung.

Di tengah saudara-saudari kita yang menjadi korban kekerasan, teror bom, perang, aborsi, dan bencana alam akhir-akhir ini, perayaan kematian Yesus mempunyai makna yang istimewa.

Sebut saja misalnya, dua peristiwa di Mesir dan Ponorogo. Di dua gereja di kota Tanta dan Alexandria, Mesir, ada dua bom diledakkan saat ibadah Minggu Palma kemarin (9/4). Puluhan orang menjadi korban. Selain itu, di Ponorogo Jawa Timur ada bencana tanah longsor yang memakan korban, Sabtu (1/4). Ada puluhan yang meninggal dunia dan ada yang terluka.

Lantas, apa makna perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Menjadi murid Yesus zaman ini berarti ikut memikul salib dan mengikutinya. Salib sudah ditemukan Yesus dan manusia tinggal ikut memikulnya. Yesus sendiri bersabda, "Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikuti

1 <http://jateng.tribunnews.com/2017/04/15/kematian-yang-menyelamatkan>

2 Rohaniwan, Kepala Campus Ministry, dan Dosen Religiositas Unika Soegijapranata Semarang

Aku, ia tidak layak mengikuti Aku” (Mat 10:38). Jika keduanya dipisahkan, beban yang dipikul bisa-bisa bukan lagi salib yang membawa keselamatan, tetapi hanya berhenti pada penderitaan saja. Hidup orang Kristen dipanggil untuk membuat diri menjadi kenampakan Yesus yang dengan salibnya telah menampakkan keilahiannya.

Seorang Teolog J.B. Metz mengungkapkan bahwa “mengikuti” berdimensi mistik dan politis. Artinya, menyambung pada kehadiran Allah dalam sejarah manusia dan membiarkan diri digerakkan oleh kehadiran itu, agar semakin banyak orang dilibatkan dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup.

Demi tujuan itu, hidup murid Yesus juga berdimensi politik, yaitu membangun kebersamaan yang inklusif (terbuka) dengan semua orang di tanah air Indonesia ini. Orang Kristen dipanggilewartakan kehidupan bersama yang mengarah pada peradaban kasih yang sejahtera, beriman dan bermartabat.

Pelopor Peradaban Kasih

Semboyan 100% Katolik 100% Indonesia (patriot) dari Uskup Pribumi pertama, Mgr Albertus Soegijapranata, bukan sekedar wacana, tetapi sungguh diwujudkan dalam kehidupan konkret. “Kita adalah sungguh-sungguh Katolik, daripada itu kita adalah sebenar-benarnya patriot juga. Oleh karena kita merasa patriot seratus prosen, sebab itu kita pun merasa Katolik seratus prosen pula” (Sambutan Pembukaan KUKSI II tanggal 27-30 Desember 1954).

Pernyataan itu dikatakan Soegija saat ada Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia di Semarang. Kesadaran umat Katolik untuk cinta pada tanah air Indonesia sudah terjadi pada awal kemerdekaan ini. Ada beberapa pahlawan nasional yang beriman Katolik. Mereka rela menyerahkan nyawanya dan berkorban untuk tanah air. Sebut saja misalnya, Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adisutjipto, Laksama Madya Yosaphat Sudarso, dan Ignatius Yoseph Kasimo.

Bahkan Mgr. Soegijapranata sendiri juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Giritunggal Semarang. Ia diangkat menjadi pahlawan nasional dengan Kepres no. 152, tertanggal 26 Juli 1963. Juga dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan dengan Kepres/ Panglima Tertinggi ABRI No. 223/AB-AD, tanggal 17 Desember 1964.

Iman kebangkitan akan bergema jika diwartakan dan diwujudkan dalam tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakekatnya mati (Yak 2:17). Begitu penegasan Rasul Yakobus. Sejak masa Prapaskah umat Katolik, terlebih di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah diajak untuk mengolah permenungan “Aku Pelopor Peradaban Kasih”. Menjadi pelopor peradaban kasih adalah panggilan murid-murid Yesus Kristus untuk mewujudkan imannya. Iman harus berdampak dan berbuah bagi kebaikan bersama (*bonum commune*).

Bahkan Paus Fransiskus menegaskan, “Tidak ada lagi yang mengubah dunia selain orang-orang yang bersama Yesus dan yang mengabdikan hidup untuk perubahan itu, serta yang bersama Dia pergi menjumpai mereka yang miskin dan bertemu langsung di tempat-tempat kotor. Terjunlah juga ke dunia politik. Berjuanglah demi keadilan dan kemanusiaan, secara khusus bagi mereka yang paling miskin di antara yang miskin”.

Bersyukurlah Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila. Di dalam sila-silanya terdapat nilai-nilai luhur yang menuntun orang untuk hidup seimbang antara relasi vertikal dan horisontal. Atas dasar iman pada Tuhan Yang Mahaesa, orang diajak bersikap peduli pada kemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan bertindak adil. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi ujian yang cukup berat. Masih semarak kekerasan atas nama agama, intoleransi, ketidakadilan, dsb.

Dalam situasi “terjal” masa kini, iman kebangkitan diuji. Orang Kristiani ditantang mengaktualkan imannya sekaligus merefleksikan kembali gambaran Allah Maharahim yang diimaninya. Benarkah Allah yang Maharahim itu membiarkan manusia dililit oleh ketidakadilan dan penderitaan? Di salib terjadi sebuah paradoks.

Paradoks salib ialah pelepasan semua kebesaran ilahi dalam diri Yesus dan menjadi manusia. Dalam wujud itulah Yesus kehilangan martabat sebagai manusia. Himne Kristologi dalam Filipi 2:6-9 mengungkapkan bahwa salib pada dasarnya pengosongan diri (*kenosis*). Pengosongan diri itu bukan asal membuat diri kosong, melainkan membiarkan diri agar dipenuhi keilahian. Ketaatan Yesus pada kehendak Allah berpuncak pada wafat-Nya di salib demi menyelamatkan manusia.

Dengan perayaan Paskah ini, umat Kristiani diingatkan untuk menjadi pelopor peradaban kasih dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mampu dan peka melihat Tuhan yang bangkit dalam diri sesama yang dijumpai dalam hidup sehari-hari. Penampakan Yesus kepada Maria Magdalena (Yoh 20:11-18) menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh hidup dan bangkit dari antara orang mati.

Begitu disapa secara pribadi dengan namanya, Maria Magdalena langsung percaya dan berseru, "Aku telah melihat Tuhan". Mari kita melihat Tuhan yang bangkit dalam diri sesama yang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, teror, dan bencana alam akhir-akhir ini. Selamat menjadi pelopor peradaban kasih bersama Yesus yang bangkit.***

Ekaristi: Puncak Kasih Allah ¹

Drs. Ign Dadut Setiadi MM ²

Dalam Ekaristi, kita “memecah-meeah satu roti yang memberi kita obat keabadian, penawar racun kematian, dan makanan yang membuat kita hidup selamanya dalam Yesus Kristus”. (Santo Ignatius dari Antiokhia)

Dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik ditulis bahwa Sakramen Ekaristi adalah kurban Tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkan-Nya untuk mengabdikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembali-Nya dalam kernuliaan.

Sakramen Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah, saat Kristus diterima hingga jiwa dipenuhi rahmat dan jaminan kemuliaan yang akan datang. Yesus sendirilah yang menciptakan Sakramen Ekaristi yang dibuktikan dengan “Perjamuan Terakhir” bersama muridnya yang diungkapkan dalam sebuah perikope “Pada malam waktu -Ia diserahkan” (1 Kor 11:23), yang sampai saat ini umat kristen merayakannya saat Kamis Putih.

Dalam menetapkan Sakramen Ekaristi ini Yesus Kristus mengumpulkan para rasul di Cenaculum dan Yesus memberikan sebuah kenangan kepada

1 Majalah Berkat 79-2016- Paroki Katedral KAS

2 Anggota The Soegijapranata Institute Unika Soegijapranata

muridnya dalam bentuk perjamuan roti dan anggur, yang sebenarnya melambangkan diri-Nya untuk berkorban bagi keselamatan manusia. Sakramen Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan kristiani yang sangat mendalam kepada kita dan ibadah kita. Karena dalam Sakramen Ekaristi terkandung makna tentang kehidupan ilahi dan kesatuan umat Allah dipadukan dalam sebuah liturgi surgawi yang dikuduskan menuju pada kehidupan kekal.

Telah penulis ungkapkan diatas bahwa Ekaristi adalah sebuah kenangan Yesus kepada murid-Nya, yang dimaksud dengan kenangan adalah menghadirkan dan mengaktualkan kurban yang dipersembahkan oleh Kristus kepada Bapa di kayu salib, kurban salib dan kurban Ekaristi adalah satu dan sama. Walaupun kurban salib dengan cara berdarah sedangkan kurban Ekaristi (Sakramen Ekaristi) dengan cara tidak berdarah. Jika kita refleksikan yang paling dalam bahwa kehadiran Yesus kristus dalam Sakramen Ekaristi dengan cara unik dan tidak tertandingi. Karena dalam Sakramen Ekaristi Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur secara total dalam bentuk Allah dan manusia.

Gereja sangat menghormati Sakramen Ekaristi. Hal itu dibuktikan dengan rnengharuskan umat-Nya untuk berpartisipasi dalam perayaan Sakramen Ekaristi Kudus setiap Minggu, dan pada hari-hari suci yang diwajibkan serta menganjurkan juga pada hari-hari lainnya.

Pentingnya Sakramen Ekaristi

42

Pentingnya perayaan Ekaristi untuk umat dinyatakan dalam ajaran gereja dengan berbagai ungkapan, “Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kristiani (LG 11). Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri. Jadi Ekaristi merupakan pusat jemaat beriman yang dipimpin oleh imam sebagai orang yang tertahbis.

Ekaristi mempunyai beberapa makna antara lain :

Sumber dan puncak hidup kristiani, dalam arti luas dikaitkan dengan kehidupan. Sumber merupakan tempat awal keluar dan mengalirnya kekayaan rohani karena dari Ekaristi akan menyiram dan menyuburkan hidup kristian kita; puncak adalah tempat tertinggi yang menjadi pokok dan sekaligus bagian terpenting dari kehidupan kristiani umat manusia.

Sumber dan puncak pewartaan injil, secara terbatas dihubungkan dengan bagian perayaan Liturgi yaitu bagian ibadat sabda yang berpuncak pada injil.

Pusat jemaat beriman. merupakan perhatian utama umat yang berdasar dan mengarah pada Ekaristi.

Sakramen Ekaristi merupakan sebuah tanda kenangan Yesus sendiri sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia maka dalam Sakramen Ekaristi inilah kita sebagai umat manusia membiarkan hidup kita dikuasai Allah dalam wujud Cinta Kasih Allah kepada manusia dengan menyerahkan tubuh dan darah-Nya untuk dikorbankan bagi manusia demi mendapatkan jaminan kemuliaan yang akan datang, karena di dalam Ekaristi memberikan berkat dan rahmat surgawi kepada kita, memperkuat kita dalam peziarahan hidup untuk menuju kepada kehidupan kekal yang dijanjikan Allah kepada umat-Nya.

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

Bagian 3

Mengelola Tanah Air

Kemitraan Memajukan UMKM ¹

Prof. Andreas Lako ²

Dalam pertemuan awal tahun dengan pelaku industri jasa keuangan, Presiden Jokowi meminta pelaku jasa keuangan fokus mengucurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendanai pengembangan usaha.

Menurut Presiden, masalah yang terjadi saat ini adalah masih sedikitnya UMKM yang dapat mengakses modal perbankan karena perbankan tidak proaktif mendatangi pelaku UMKM.

Selain diberi akses permodalan, pelaku UMKM seharusnya juga diberikan pelatihan khusus seperti pembukuan dasar untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran.

Perbankan juga diminta meningkatkan pertumbuhan kredit pada 2017 menjadi 12% dibanding 2016 yang hanya 9%. Kredit tersebut harus menyasar pada sektor kecil dan mikro, nelayan hingga petani serta sektor usaha produktif lainnya (*Bisnis Indonesia*, 14/1/2017).

Permintaan Presiden Jokowi tersebut sangat tepat dan perlu segera

1 *Bisnis Indonesia* 28 Februari 2017

2 Guru Besar Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelaku industri jasa keuangan. Mengapa?

Jawabnya, karena meski secara politik UMKM telah menyedot perhatian besar dari pemerintah pusat-daerah untuk dibangun dan ditumbuhkembangkan, namun fakta-fakta empiris justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini masih lamban.

Pertumbuhan kinerja sektor UMKM bahkan jauh lebih rendah dibanding sektor korporasi. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah lemahnya dukungan finansial dari perbankan.

Kalaupun suatu bank berani memberi kredit, bunganya pasti akan jauh lebih tinggi dibanding untuk sektor korporasi.

Itu sebabnya, kebanyakan pelaku UMKM takut berhubungan dengan perbankan apabila menginginkan tambahan modal usaha. Mereka lebih suka meminjam dari rentenir dibanding perbankan.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah dalam sejumlah kasus, OJK dianggap kurang siap apabila ada bank berani membuat terobosan kebijakan kredit kepada UMKM dengan bunga rendah.

Bank Jateng, misalnya. Dalam dua tahun terakhir, bank milik Pemprov Jateng ini gencar meluncurkan kebijakan kredit berbunga rendah untuk membantu pelaku UMK produktif dalam pengembangan usaha.

Bank ini telah meluncurkan kebijakan Kredit Usaha Produktif (KUP), Mitra Jateng 02 dan Mitra Jateng 25 dengan tingkat bunga sangat rendah. Konon, kebijakan kredit yang ramah UMKM tersebut kurang 'direstui' OJK karena dinilai berisiko tinggi dan merusak pasar kredit perbankan nasional.

Perbankan Diskriminatif

Singkatnya, pernyataan Presiden Jokowi bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih sedikitnya UMKM yang dapat mengakses modal karena perbankan tidak proaktif mendatangi pelaku UMKM sangat tepat.

Pernyataan tersebut terdukung oleh hasil studi Lako, dkk (2015) terhadap pelaku UMKM di 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil

kuisisioner dan FGD, studi tersebut melaporkan bahwa perbankan tidak hanya tidak proaktif terhadap pelaku UMKM, tapi juga diskriminatif dalam pemberian kredit kepada pelaku UMKM dibanding korporasi.

Perbankan dinilai kurang peduli kepada UMKM dalam urusan kredit. Persyaratan kredit dari perbankan dinilai sangat '*mencekik*' pelaku UMKM.

Studi tersebut juga melaporkan bahwa kebanyakan pelaku UMKM lebih suka meminjam dana dari rentenir dibanding perbankan.

Perbankan dinilai tidak proaktif mendatangi para pelaku UMKM yang ada di daerah-daerah terpencil, tapi lebih fokus pada wilayah-wilayah perkotaan yang lebih mudah aksesnya dan menguntungkan.

Hal ini menyebabkan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kerakyatan di wilayah-wilayah terpencil tidak berkembang sehingga permasalahan kemiskinan, kemelaratan dan pengangguran sulit teratasi.

Selain itu, gelontoran dana kredit usaha rakyat (KUR) puluhan triliun rupiah yang dilakukan perbankan selama ini juga dirasakan kurang efektif meningkatkan kinerja sektor UMKM.

Hal itu disebabkan pelaksanaannya tidak banyak menasar kepada para pelaku UMKM yang sangat membutuhkan dan atau yang berada pada wilayah-wilayah terpencil. Kalaupun mendapatkan, namun akibat lemahnya pelatihan dan pendampingan usaha maka kinerja dari UMKM yang mendapat KUR tidak begitu bagus. KUR justru bisa menjadi beban berat bagi UMKM penerimanya.

Singkatnya, hasil studi Lako, dkk (2015) menyimpulkan bahwa perbankan belum sepenuh hati mendukung pembangunan UMKM.

Perbankan lebih mengutamakan misi meraup laba dibanding misi membantu negara dalam upaya menumbuhkembangkan sektor UMKM untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Bangun Kemitraan Strategis

Dari uraian di atas maka permintaan Presiden Jokowi agar pelaku industri jasa keuangan proaktif dan fokus mengururkan kredit dan memberikan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM menjadi sangat tepat. Permintaan itu hendaknya segera ditindaklanjuti OJK dan para *stakeholder* terkait.

Langkah *pertama* yang perlu segera dilakukan adalah mengubah paradigma bisnis perbankan terhadap kredit dan risiko kredit kepada UMKM.

Pinjaman kredit kepada UMKM janganlah semata-mata dinilai dari perspektif kepentingan bisnis untuk meraup laba (*profit maximize*). Tapi, harus dinilai dari perspektif misi tanggung jawab sosial-politik korporasi (CSR) perbankan untuk ikutserta memajukan kesejahteraan sosial, memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperkuat fondasi serta basis perekonomian nasional.

Dari perspektif CSR, misi tersebut sesungguhnya juga bertujuan untuk memperkuat dan memperluas fondasi bisnis perbankan di masa depan (Lako, 2015). Karena itu, bunga kredit yang dibebankan kepada pelaku UMKM seharusnya lebih rendah.

Langkah *kedua* adalah OJK dan para *stakeholder* terkait hendaknya segera menyusun *blue print* Kemitraan Strategis Industri Jasa Keuangan dengan UMKM.

Tujuannya, untuk memberikan landasan filosofis dan yuridis tentang hakikat kemitraan tersebut, dan juga arahan strategis tentang visi, misi, tujuan, sasaran, target dan tatakelola kemitraan strategis antara perbankan dan pelaku UMKM.

Itu berarti, sejumlah regulasi dan kebijakan konservatif OJK dan perbankan yang terkait dengan kredit UMKM perlu dikaji kembali dan ditata ulang.

Karena pola kemitraan strategis tersebut berkaitan dengan misi tanggung jawab sosial-politik korporasi untuk mewujudkan kepentingan negara maka kebijakan kredit berbunga rendah dan pendampingan usaha berkelanjutan kepada pelaku UMKM menjadi sangat krusial untuk direalisasikan OJK. Saat ini, Presiden Jokowi pasti sedang menunggu tindakan nyata dari pimpinan OJK dalam merespon permintaannya.

Mendesak, Reformasi Tatakelola Pembangunan ¹

Prof. Andreas Lako ²

Pembakaran lahan oleh korporasi dan masyarakat untuk kepentingan tanaman industri dan perkebunan kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Yang memprihatinkan, kerugian material dan nonmaterial yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara akibat bencana kebakaran yang terus berulang tersebut ternyata sangat besar.

Harian Kompas (11/3/2016) melaporkan bahwa secara ekonomi, kerugiannya mencapai Rp 209 triliun. Secara sosial, Indeks Standar Polusi mencapai level maksimal 1.000 dan kualitas udara memburuk sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu dan lebih dari 500.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan.

Sementara secara ekologi, total lahan terbakar mencapai 2.089.912 hektar, kerugian keragaman hayati mencapai sekitar Rp 3,8 triliun dan emisi gas rumah kaca mencapai 15,95 ton karbondioksida per hari. Menurut penulis, apabila dievaluasi dari perspektif Akuntansi Sosia-Lingkungan atau Green Accounting, kerugiannya tentu saja akan jauh lebih besar.

1 Suara Pembaharuan, 17-18 September 2016

2 Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata Semarang; Penulis buku "Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi"

Pertanyaannya, mengapa pembakaran terus terjadi berulang kali? Apakah benar sumber pemicunya akibat ulah korporasi tamak, atau justru akibat kegagalan pemerintah dalam mendesain dan melaksanakan tatakelola Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)? Saya menilai, penyebab utamanya adalah akibat kegagalan pemerintah dalam mendesain tatakelola pembangunan yang ramah lingkungan.

Kegagalan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis penulis (Green Economy: Lako, 2015), akar permasalahan lingkungan dan pembakaran lahan selama ini justru bersumber dari kegagalan pemerintah dalam mendesain dan melaksanakan tatakelola pembangunan berkelanjutan secara benar dan konsisten.

Dalam tatakelola pembangunan nasional selama ini, Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi konservatif (*greedy economy*) yang cenderung mengeksploitasi masyarakat dan lingkungan demi kepentingan ekonomi dalam jangka pendek. Keputusan politik dan perencanaan pembangunan nasional (daerah) dari pemerintah juga cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan demi kepentingan ekonomi.

Seperti diketahui, sejak Juni 1992 Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan untuk menerapkan konsep Sustainable Development dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Konsep tersebut menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tanpa mengorbankan kepentingan dari generasi-generasi selanjutnya agar bisa hidup secara layak (WCED, 1987). Pemerintah RI juga telah memperbarui komitmen tersebut dalam KTT Rio+10 (Juni 2002) dan KTT Rio+20 (Juni 2012).

Namun, komitmen tersebut ternyata hanyalah retorik politik saja. Dalam kenyataannya, Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan kesuksesan suatu rejim pemerintahan. Asumsinya, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi dan terus meningkat maka kemiskinan dan pengangguran akan bisa dikurangi, kesejahteraan rakyat akan meningkat,

dan pemerataan pembangunan akan terwujud. Demikian pula cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil-makmur juga bakal terwujud (Lako, 2015).

Orientasi tersebut telah membentuk karakter para pemimpin pemerintahan cenderung berpikir pragmatis dan berperilaku eksploitatif, baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan operasional. Itu sebabnya, banyak produk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Pergub dan sejumlah regulasi lainnya lebih pro pelaku ekonomi dan bisnis dibanding masyarakat dan lingkungan. Keberadaan sejumlah regulasi tersebut juga telah memberi keleluasan kepada para pelaku ekonomi bertindak pragmatis dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang dipercayakan negara kepada mereka. Mereka merusak dan mengeksploitasi SDA dan lingkungan serta sumberdaya sosial-ekonomi masyarakat demi meraup laba sebesar-besarnya dengan cara-cara yang tidak etis dan beradab.

Sebagai contoh, kasus kebakaran di Sumatera dan Kalimantan sesungguhnya dipicu oleh kesalahan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah royal memberi izin lingkungan kepada korporasi yang bergerak dalam bisnis kelapa sawit dan tanaman industri lainnya pada daerah-daerah yang seharusnya tak boleh dialihfungsikan. Pemerintah juga royal memberi izin tambang dan hak penguasaan hutan (HPH) kepada korporasi pada daerah-daerah hutan lindung dan produksi. Izin tersebut menjadi penyebab terjadinya perusakan lingkungan secara masif.

Kesalahan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi lingkungan, masyarakat dan negara. Secara ekonomi, biaya, kerugian, dan pengorbanan (efforts) yang harus ditanggung negara dari tahun ke tahun juga sangat besar dan bahkan jauh lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh dari korporasi.

Itu sebabnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi paradoks pertumbuhan ekonomi. Yaitu, meskipun ekonomi bertumbuh di atas kisaran 4,8%-5,5%, tetapi dampaknya pada penurunan kemiskinan sangat kecil, sementara ketimpangan sosial-ekonomi justru kian melebar. Degradasi dan bencana lingkungan juga kian serius dan mencemaskan. Hal tersebut mengindikasikan

ada yang keliru dalam desain dan pelaksanaan tatakelola Pembangunan Berkelanjutan nasional.

Reformasi Tatakelola

Lalu, bagaimana solusinya? Menurut hemat penulis, pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengkaji kembali dan menata ulang visi, tujuan, sasaran, fokus, strategi dan kebijakan serta tatakelola pembangunan nasional yang dipraktikkan selama ini. Presiden Jokowi sebaiknya segera mengambil keputusan dan langkah-langkah politik yang jelas untuk menerapkan model “Pembangunan Berkelanjutan” yang telah disepakati Indonesia sejak Juni 1992 dan terus disempurnakan hingga saat ini sebagai paradigma pembangunan nasional dan melaksanakannya secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Seperti diketahui, konsep pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut menekankan pada lima dimensi dasar pembangunan. Yaitu, kelestarian lingkungan (planet), kesejahteraan sosial (people), kemakmuran bersama (prosperity), sinergitas antar pemangku kepentingan (partnership) dan penciptaan lingkungan kehidupan yang damai (peace) atau disebut 5P Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Sustainable Developments Goals (SDGs) 2015-2030 yang diterbitkan PBB (2015), kelima dimensi dasar tersebut lalu diterjemahkan ke dalam 17 tujuan dan 169 target yang mesti dicapai pemerintah dan para stakholder terkait. Karena itu, tatakelola pembangunan nasional sebaiknya berpedoman pada SDGs tersebut.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga perlu segera merevisi dan bahkan membatalkan (moratorium) semua regulasi dan kebijakan pemerintah yang dinilai menjadi sumber pemicu terjadinya kerusakan dan bencana lingkungan. Moratorium izin usaha perkebunan kelapa sawit, HPH, tambang, reklamasi pantai dan lainnya yang telah dan akan menimbulkan kerugian dan bencana ekologi, sosial dan ekonomi yang sangat besar dan berkelanjutan bagi masyarakat dan negara juga mutlak segera dilakukan. Dunia usaha juga perlu diwajibkan untuk mereformasi paradigma bisnis yang tamak ke arah yang ramah lingkungan (green business). Untuk itu, pemerintah harus segera merumuskan blue print Tata Ekonomi Hijau Indonesia untuk memberikan arahan strategis dan operasional kepada dunia usaha dan masyarakat luas.

Kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan reformasi tatakelola pembangunan nasional tersebut sangat mendesak. Saya yakin, apabila pemerintahan Jokowi-JK mampu menata ulang fokus dan tatakelola pembangunan ke arah yang lebih ramah Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) maka berbagai problema dan bencana lingkungan, sosial dan ekonomi yang selama ini terus terjadi akan berkurang signifikan. Indonesia pun pasti akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth) dan berhasil mewujudkan 5P SDGs.

Mencegah Rasionalisasi APBD ¹

Prof. Andreas Lako ²

“Mencermati rekam jejak Pemprov Jateng yang kurang kreatif dan agresif dalam melaksanakan dan merealisasikan target-target APBD 2016, saya khawatir target-target pencapaian dalam APBD 2017 bakal sulit tercapai”

MEMASUKI tahun 2017, muncul kekhawatiran di benak penulis bahwa kinerja ekonomi Jawa Tengah (Jateng) pada 2016 akan lebih rendah dibanding tahun 2015. Kekhawatiran itu muncul karena pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2016 diperkirakan bakal melambat hanya berkisar 5,2%- 5,3% atau lebih rendah dibanding tahun 2015 sebesar 5,44%.

Penulis khawatir penurunan tersebut akan berlanjut hingga tahun 2017 apabila Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jateng tidak segera mengambil langkah-langkah proaktif yang tepat untuk mencegah faktor-faktor penyebab kemerosotan kinerja ekonomi daerah pada 2016. Mengapa begitu?

Jawabnya, karena pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan II 2016 yang sempat meningkat menjadi 5,74% dari 4,91% (Triwulan I 2016), pada Triwulan III 2016 justru merosot menjadi hanya 5,06%. Berdasarkan hasil

1 Suara Merdeka Rabu, 11 Januari 2017

2 Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang

Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia pada November 2016, penyebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan III 2016 adalah akibat menurunnya Konsumsi Pemerintah (minus 12,53 %), Ekspor (minus 14,08%) dan Impor (minus 18,75%). Yang perlu dicatat, menurunkan kinerja ekspor dan impor secara signifikan pada periode tersebut sudah diprediksikan sebelumnya karena dipicu faktor krisis ekonomi global yang terus berlanjut.

Negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang Jateng, seperti AS, Jepang, Tiongkok, Eropa dan ASEAN, sedang mengalami kelesuan dan pelambatan ekonomi yang serius. Namun, menurunnya nilai Konsumsi Pemerintah (G) hingga minus 12,53% sungguh di luar dugaan banyak pihak. Penurunan tersebut baru pertama kali terjadi di Jateng. Pemicunya adalah kebijakan Gubernur Jateng pada Mei 2016 yang melakukan rasionalisasi anggaran belanja langsung APBD 2016 sebesar 25%. Kebijakan tersebut ternyata tidak hanya berimbas pada penurunan realisasi pendapatan daerah dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan, tapi juga berimbas luas pada kinerja pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat.

Tren Konsumsi Pemerintah yang bertumbuh dari 3,26% pada Triwulan I menjadi 7,48% pada Triwulan II 2016, pada Triwulan III 2016 anjlok drastis menjadi minus 12,53%.

Minusnya kinerja pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dari Jateng bahkan jauh lebih besar dibanding secara nasional yang hanya minus 3,2%. Dengan kata lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah Jateng menjadi kontributor terbesar terhadap buruknya kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah secara nasional. Berbagai imbas negatif tersebut tidak diduga oleh Pemprov Jateng ketika melakukan rasionalisasi. Dalam artikel *iKaji Ulang Rasionalisasi APBDi* (Suara Merdeka, 6 Juni 2016), saya sudah mengingatkan Gubernur Jateng agar segera mengkaji ulang kebijakan tersebut karena bakal menimbulkan multiplier effects negatif terhadap kinerja perekonomian dan pembangunan Jateng secara luas.

Dari sisi permintaan, penurunan pertumbuhan Konsumsi Pemerintah (G), Ekspor (X) dan Impor (M) tersebut diperkirakan akan terus berlanjut pada 2017 jika Pemrov Jateng tidak segera merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat

untuk mendongkrak sumber-sumber pendapatan daerah. Alasannya, kondisi ketidakpastian perekonomian global dan nasional diperkirakan juga masih akan terus berlanjut pada tahun 2017. Ketidakpastian tersebut dikhawatirkan akan mendorong Pemprov Jateng kembali melakukan rasionalisasi APBD 2017 secara signifikan sehingga kembali berimplikasi negatif terhadap kinerja pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah (G), konsumsi rumah tangga (C) dan investasi (I), serta pelambatan kinerja perekonomian Jateng secara keseluruhan.

Mencegah Rasionalisasi

Dalam Nota Keuangan atas RAPBD Jateng 2017 yang telah disampaikan Gubernur kepada DPRD Jateng pada akhir November 2016, Pemprov Jateng tampaknya lebih optimistis dalam menetapkan asumsi-asumsi dan target pencapaian APBD 2017. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh 5,4%–5,9%. Persentase kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 11,3%–10,83%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan 4,2%. Selain itu, pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat dari Rp 20,988 triliun (APBD-P 2016) menjadi Rp 23,059 triliun atau naik 9,87%. Sementara belanja daerah dianggarkan naik dari Rp 21,155 triliun (APBDP 2016) menjadi Rp 23,034 triliun atau naik 8,88%.

Mencermati optimisme tersebut, tampaknya kekhawatiran penulis bahwa kinerja ekonomi Jateng pada 2017 bakal lebih rendah dibanding 2016 bisa dibalang tidak beralasan. Namun, mencermati rekam jejak Pemprov Jateng yang kurang kreatif dan agresif dalam melaksanakan dan merealisasikan target-target APBD 2016, saya khawatir target-target pencapaian dalam APBD 2017 tersebut juga bakal sulit tercapai. Mengapa?

Saya khawatir, apabila krisis ekonomi global terus berlanjut dan pemerintah pusat kembali melakukan efisiensi terhadap APBN 2017 maka Pemprov Jateng juga bakal kembali panik dengan ‘menyalahkan’ kondisi tersebut sebagai alasan pembenaran untuk melakukan rasionalisasi terhadap target-target APBD 2017. Apabila hal itu kembali terjadi maka pertumbuhan kinerja pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, serta investasi akan kian merosot. Hal tersebut tentu akan berdampak buruk pada kinerja perekonomian Jateng secara keseluruhan.

Karena itu, dalam upaya mencegah penurunan kinerja ekonomi tahun 2017 maka Gubernur dan seluruh jajaran SKPD Pemprov Jateng sangat diharapkan dapat bekerja lebih keras dan serius lagi untuk mewujudkan target-target APBD 2017 yang optimistis. Apabila ketidakpastian krisis ekonomi global terus berlanjut dan pemerintah pusat kembali melakukan efisiensi APBN maka Gubernur Jateng sebaiknya tidak perlu panik dan terburu-buru melakukan rasionalisasi APBD 2017. Gubernur sebaiknya bisa menempuh cara-cara lain yang soft untuk menghindari APBD Jateng dari krisis keuangan.

Selain itu, Pemprov Jateng juga perlu diminta untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan APBD 2017 dan dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang menjadi skala prioritas. Fokus perhatiannya perlu diarahkan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah dan konsumsi pemerintah, ekspor dan impor, serta investasi.

Kolaborasi dengan para stakeholder, terutama dengan para bupati/walikota dan jajaran SKPD terkait pada tingkat kabupaten/kota, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat luas, juga sangat penting untuk meningkatkan kinerja APBD dan kinerja ekonomi Jateng secara keseluruhan. Selain efektif meningkatkan kinerja APBD, sinergi tersebut juga bakal efektif menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, mempersempit ketimpangan sosial, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Mencegah Krisis APBN ¹

Prof. Andreas Lako ²

Pada 19 September 2016, di harian ini Menteri Keuangan memublikasikan Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015. Setelah mencermati ringkasan tersebut, saya prihatin. Posisi keuangan negara dan kinerja operasional pemerintah yang selama ini sering digambarkan baik-baik saja ternyata mencemaskan. Yang mengkhawatirkan, untuk menutupi defisit APBN yang kian membengkak, pemerintah ternyata mengandalkan utang yang jumlahnya juga terus melonjak.

Kondisi itu berpotensi menyebabkan negara mengalami kesulitan keuangan yang serius. Kondisi tersebut juga bisa berdampak luas terhadap realisasi aktivitas operasi, investasi, serta pembiayaan dalam APBN 2016 dan 2017.

Krisis APBN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, ada tiga kesimpulan krusial. Pertama, posisi keuangan negara pada 2014 dan 2015 ternyata lemah. Hal itu tecermin dari rasio lancar (current ratio/CR) yang sangat kecil. Rasio lancar (CR), yaitu perbandingan

1 Kompas 8 Oktober 2016 hal. 6

2 Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang

antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, hanya sebesar 0,696 atau kurang dari 1.

Besaran rasio tersebut mengindikasikan kemampuan likuiditas keuangan negara untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada 2016 sangat lemah. Selain itu, daya dukung keuangan negara untuk melaksanakan aktivitas operasional dan investasi pada 2016 juga sangat tidak memadai. Untuk membayar utang jangka pendek dan mendanai investasi dan biaya operasional pada 2016, pemerintah akan sangat bergantung pada utang dan “mukjizat” pendapatan temporer, seperti dana tebusan amnesti pajak. Apabila target penerimaan dari dua pos tersebut meleset, negara bakal mengalami krisis keuangan.

Lemahnya posisi keuangan negara juga bisa dilihat dari rasio utang (leverage). Jumlah aset pada 2015 adalah Rp 5.163,32 triliun. Jumlah tersebut berasal dari ekuitas Rp 1.669,79 triliun dan kewajiban Rp 3.493,53 triliun. Berdasarkan komposisi itu, rasio kewajiban terhadap aset (debt to asset ratio/DAR) adalah 0,676. Artinya, 67,6 persen dari aset negara berasal dari utang. Apabila dilihat dari debt to equity ratio/ DER, posisi kreditor dibandingkan pemerintah adalah 2,09. Hal ini menunjukkan posisi pemerintah dalam kepemilikan aset negara sangat lemah.

Kedua, lemahnya posisi keuangan negara ternyata disebabkan buruknya kinerja operasional pemerintah. Realisasi pendapatan pada 2015 adalah Rp 1.557,68 triliun, sementara realisasi beban operasional Rp 1.714,26 triliun sehingga defisit kinerja operasional minus Rp 136,58 triliun. Secara keseluruhan, defisit kinerja operasional minus Rp 243,28 triliun.

Apabila dinilai berdasarkan rasio profitabilitas, kinerja operasional pemerintah pada 2015-yang diukur dengan return on equity (ROE)-sangat memprihatinkan, yaitu minus 14,57 persen. Buruknya ROE terutama disebabkan buruknya kemampuan pemerintah dalam mengelola aset negara untuk meningkatkan kinerja operasional (APBN). Hal tersebut terlihat dari nilai return on asset (ROA), yaitu minus 4,7 persen.

Ketiga, untuk menutup defisit APBN 2015 sebesar minus Rp 298,49 triliun, pemerintah ternyata mengandalkan utang dari dalam negeri senilai Rp 307,86 triliun dan utang luar negeri sebesar Rp 15,25 triliun. Jumlah tersebut naik

29,82 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Strategi pendanaan tersebut juga akan digunakan untuk menutup defisit APBN-P 2016 sebesar Rp 296,72 triliun dan RAPBN 2017 sebesar Rp 332,84 triliun.

Meskipun sudah lazim digunakan, strategi tersebut bisa menjadi bumerang karena akan meningkatkan risiko keuangan dan risiko operasional APBN apabila sejumlah asumsi makro dan target pendapatan meleset jauh. Meningkatnya dua risiko tersebut harus diwaspadai karena bisa memicu meningkatkan risiko ekonomi, risiko sosial, dan risiko politik yang serius. Meningkatnya risiko-risiko tersebut tampaknya mulai dikhawatirkan pemerintah. Hal ini terlihat dari postur APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 yang cenderung defensif.

Mencegah krisis

Mencermati struktur APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 yang defisitnya kian membengkak dan solusi pendanaannya adalah berutang, saya khawatir posisi keuangan dan kinerja operasional pemerintah akan kian tertekan. Apabila pemerintah tidak segera menemukan solusinya, APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 bakal menghadapi krisis serius.

Harus diakui, faktor pemicu kian meningkatnya defisit APBN dan utang selama dua tahun terakhir adalah karena meningkatnya pendanaan investasi dalam jumlah yang fantastis untuk membiayai proyek- proyek strategis nasional yang menjadi prioritas dari pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan dan kesehatan mengalami peningkatan signifikan. Pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan yang paling besar, yaitu dari Rp 140 triliun (2014) menjadi Rp 290,3 triliun (2015), dan Rp 317,1 triliun (2016). Bahkan, dalam RAPBN 2017, anggaran infrastruktur naik menjadi Rp 346,6 triliun.

Oleh karena itu, solusi yang sebenarnya paling efektif untuk mencegah terjadinya kesulitan keuangan dan krisis APBN adalah Presiden Jokowi merasionalisasi sejumlah proyek pembangunan strategis nasional yang menyerap pendanaan sangat besar. Namun, solusi ini tampaknya tidak akan ditempuh karena menyangkut Nawacita dari pemerintahan Jokowi-Kalla.

Solusi yang paling memungkinkan adalah pemerintah harus terus giat mengidentifikasi dan merasionalisasi anggaran dari sejumlah pos pembiayaan pada sejumlah kementerian yang paling memungkinkan. Komunikasi secara terbuka dan jujur kepada sejumlah pihak yang bakal terkena dampak negatif bahwa negara sedang mengalami kesulitan keuangan dan krisis APBN menjadi sangat penting agar pendekatan ini dapat didukung semua pihak.

Solusi lainnya adalah pemerintah harus terus proaktif mengidentifikasi sejumlah sumber pendapatan potensial yang masih tersembunyi pada sejumlah pihak (*hidden revenues*) dan mengambil tindakan tepat untuk mengembalikannya kepada negara. Keputusan “nekat” Presiden Jokowi memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ternyata sangat efektif mendatangkan *hidden revenues* ke kas negara. Pada tahap pertama pemberlakuan program amnesti pajak (1 Juli-30 September 2016), dana tebusan amnesti pajak mencapai lebih dari Rp 97 triliun.

Mencermati masih sangat banyak pengusaha kaya, korporasi besar, dan masyarakat luas yang belum mengikuti program amnesti pajak pada tahap pertama dan sangat mungkin mereka akan berpartisipasi pada tahap kedua dan ketiga, saya optimistis dana tebusan pajak yang masuk ke kas negara bisa mencapai Rp 180 triliun hingga Rp 200 triliun.

Namun, dana sebesar itu belumlah cukup menutup defisit APBN 2016 dan APBN 2017. Karena itu, saya mengusulkan agar Presiden Jokowi segera mengusut tuntas kasus penggelapan pajak 2.000 korporasi penanaman modal asing (PMA). Mereka terindikasi melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi selama 10 tahun terakhir. Pada akhir Maret 2016, Menkeu Bambang Brodjonegoro pernah melaporkan bahwa akibat ulah korporasi PMA tersebut, negara dirugikan Rp 500 triliun (Andreas Lako dalam Kompas, 6/4/2016). Namun sayang, pengusutan kasus tersebut tidak berlanjut.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan menutup defisit APBN, Presiden Jokowi perlu memerintahkan menteri keuangan dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus penggelapan pajak PMA. Potensi penerimaan negara dari penyelesaian kasus tersebut bisa melampaui jumlah defisit APBN 2017.

Pajak Pro Investasi ¹

H. Sri Sulistyanto ²

Terobosan pajak melalui program *tax amnesty* yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memang pantas diapresiasi. Cuma, sayangnya, tidak diikuti oleh Pemkab dan Pemkot di Indonesia. Yang masih saja setengah hati saat mengevaluasi perda pajaknya yang dibekukan oleh Kemendagri karena dinilai tidak pro investasi.

Betapa tidak, mereka hanya fokus pada aturan mainnya. Sementara besaran tarif tidak dibahas sama sekali. Atau, meski sempat disinggung, akhirnya kembali juga ke tarif lama. Padahal tarif tersebut tidak relevan lagi untuk saat ini. Kok bisa?

Pajak Berganda

Ya. Ambil contoh, misalnya, pajak hiburan untuk layanan pijat yang di beberapa daerah besarnya sampai 35%. Bahkan ada yang lebih. Alasannya, ketika pertama kali ditetapkan, untuk menghambat perkembangan usaha yang dianggap lekat dengan prostitusi tersebut.

1 Dimuat di KONTAN, 3 Februari 2017.

2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang

Email: hsrisulistyanto@gmail.com. HP/WA 081 2295 8524.

Namun demikian, meski bisa diterima pada masanya, alasan tersebut tentu tidak relevan lagi untuk saat ini. Karena kebutuhan relaksasi tidak terbatas pada kelompok tertentu lagi. Tapi sudah merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan rutinitas yang makin menguras fisik dan psikis masyarakat.

Contoh lain adalah pajak restoran sebesar 10%, yang juga dikenakan untuk warung makan. Tanpa melihat skala usahanya. Padahal ada perbedaan mendasar antara kedua jenis usaha kuliner tersebut. Khususnya dari aspek lokasi, bangunan, pelayanan, dan manajemen. Yang membuat struktur biayanya bisa berbeda sampai dengan 50%.

Demikian juga dengan pajak hotel yang besarnya 10%. Yang juga menysasar pada rumah kos. Alasannya, sama-sama penyelenggara jasa penginapan. Padahal hotel dan kos sangat berbeda. Di hotel, tamu memperoleh pelayanan istimewa. Mulai dari masuk, tidur, sampai ketika keluar hotel.

Sementara penyewa kos hanya memperoleh kamar dengan fasilitas terbatas. Tanpa layanan 24 jam penuh, *bed* istimewa, *toileters*, dan penggantian perlengkapan kamar setiap hari. Yang membuat selisih *operation and maintenance cost* kos dan hotel bisa mencapai 40-50%.

Perbedaan itu mestinya membuat tarif pajak menjadi berbeda pula. Karena pajak, secara konseptual, dikenakan pada barang dan jasa yang diterima masyarakat. Sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula pajaknya. Demikian pula sebaliknya. Meski yang diterima hanya berupa *intangibile benefit* atau *opportunity revenue*. Seperti, misalnya, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk orang yang membeli mobil karena sudah menikmati rasa bangga bisa memiliki kendaraan tersebut.

Karenanya, hanya dengan kenikmatan sebesar 50-60% dari konsumen restoran dan hotel, masyarakat yang makan di warung dan menginap di kos mestinya cukup membayar pajak separonya. Sejalan dengan asas pajak berkeadilan yang tengah digaungkan pemerintah.

Selain itu, berbeda dengan pengusaha restoran dan hotel, jarang ada pemilik warung makan dan kos yang langsung membebankan pajak pada konsumen. Tentu bukan tanpa alasan. Pertama, sebagian konsumennya memang

kelompok masyarakat yang sensitif terhadap harga. Sehingga perbedaan harga karena beban pajak dikawatirkan akan membuat mereka lari. Kedua, meski mau membayar pajak sejenis saat makan di restoran dan menginap di hotel, masyarakat tetap cenderung menolak membayar pajak. Serta, ketiga, pemilik usaha relatif tidak mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai pemungut pajak.

Alasan itulah yang membuat pemilik warung makan dan kos acap terpaksa membebankan pajak restoran dan hotel pada usahanya. Akibatnya, keuntungan yang diterimanya pun menjadi berkurang. Padahal kedua jenis pajak tersebut mestinya menjadi tanggung jawab konsumen. Karena merekalah yang menikmati *benefit*-nya.

Itu sebabnya banyak pemilik warung makan dan kos mengelak membayar pajak tersebut. Salah satu alasannya, sebagai warga negara, sudah membayar pajak penghasilan (PPh) pribadi. Hingga, dengan membayar pajak restoran atau hotel, mereka merasa membayar pajak berganda.

Maka tidak mengherankan jika banyak perda, khususnya perda pajak, yang dianggap tidak pro investasi. Karena tarifnya dianggap menjadi kendala masuknya investasi. Padahal investasi merupakan salah satu kunci penting untuk membangun daerah.

Ini sebabnya tarif pajak perlu dievaluasi. Pemkab dan Pemkot tentu tidak perlu risau dengan target PAD. Karena, meski akan merosot dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, penurunan tarif biasanya akan menjadi insentif pajak. Yang dapat mendorong meningkatnya jumlah wajib pajak maupun nilai pajak yang dilaporkan oleh masyarakat.

Catatan Penutup

Jadi memang tidak cukup jika fokus evaluasi dan revisi perda pajak sebatas hanya pada aturan mainnya. Namun juga terhadap besaran tarif. Agar benar-benar bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Bahwa siapa yang menikmati lebih harus membayar lebih pula. Demikian pula sebaliknya. Hingga Kemendagri tidak perlu membekukan perda hasil revisi itu lagi. Karena kembali dianggap tidak pro investasi. Setuju?

Politik Pricing Pelayanan Publik ¹

H. Sri Sulistyanto ²

Kenaikan tarif Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh kepolisian, khususnya STNK dan BPKB, seperti diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016, cenderung menimbulkan kegaduhan. Betapa tidak, setiap pihak seolah saling lempar. Tampak gamang memberikan penjelasan. Hanya mengatakan itu rekomendasi BPK dan Banggar DPR. Kok bisa sih?

Incrementalism

Ya. Tapi mungkin bakal berbeda seandainya pemerintah memahami dan menggunakan pendekatan *costing* ketika membuat keputusan *pricing* tersebut. Tanpa bermaksud skeptis, harus diakui jika pemerintah memang relatif jarang menggunakan basis biaya dan unit ekuivalensi sebagai dasar untuk menentukan *unit cost* layanannya (*public goods*).

Tarif acap ditentukan hanya dengan pendekatan *incrementalism* atau menambah tarif lama dengan sejumlah nilai tertentu. Yang kadang juga tidak jelas dasar penetapannya. Misalnya, sekedar ditambah 10% tarif lama.

1 Dimuat di KONTAN, 12 Januari 2017.

2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang

Email: hsrisulistyanto@gmail.com. HP/WA 081 2295 8524.

Padahal, ironisnya, tarif itu dulu juga tidak ditentukan dengan pendekatan *costing*. Tapi hanya dengan asumsi-asumsi tertentu. Yang juga lemah basis teoritis dan empirisnya.

Bahkan, seandainya melakukan penelusuran biaya, relatif hanya fokus pada *out of pocket cost*. Atau biaya tunai, seperti gaji dan alat tulis kantor. Sementara *sunk cost* atau pengeluaran untuk pengadaan asset fisik, misalnya mesin dan gedung kantor, relatif tidak banyak disentuh. Apalagi biaya tidak langsung (*indirect cost*), seperti belanja rutin instansi yang memberikan layanan publik tersebut.

Padahal *costing* mestinya menggunakan metode *full cost recovery*. Atau membebaskan seluruh biaya. Sejalan dengan semangat akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, dan rasa keadilan. Karena masyarakat memang berhak tahu pemanfaatan semua sumberdaya publik.

Pemerintah sebenarnya menyadari pentingnya *costing* ini. Salah satunya tampak dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa *full cost recovery* bisa menjadi insentif investasi di Indonesia. Meski, sayangnya, sampai saat ini masih terbatas pada penepatan air minum PDAM. Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Sementara *pricing* jenis layanan publik yang lain belum banyak diatur.

Selesai? Tentu tidak. Karena, selain biaya, ada variabel lain untuk menentukan *unit cost*, yakni unit ekuivalensi. Atau jumlah produk yang bisa dihasilkan dari pengeluaran itu. Karena pada dasarnya *unit cost* merupakan pembagian antara total biaya dengan unit ekuivalensi.

Namun, sama dengan biaya, unit ekuivalensi juga tidak dihitung. Ambil contoh, misalnya, untuk pelayanan parkir kendaraan atau rumah sakit. Yang tidak bisa sekedar menggunakan jumlah kendaraan atau penduduk yang ada di satu daerah. Karena memang tidak bisa dipastikan berapa kali sebuah kendaraan akan diparkir atau seseorang akan sakit selama satu periode.

Maka, mau tidak mau, unit ekuivalensi pun harus diestimasi dengan menggunakan asumsi. Misalnya, untuk parkir, dengan mengasumsi kapasitas parkir untuk setiap ruas jalan. Membedakan kawasan ramai dan sepi. Atau jam ramai parkir dan sepi. Demikian juga dengan rumah sakit. Dengan

melihat kelasnya, jumlah dan kapasitas dokter, dan sebagainya. Ini sebabnya keakurasian *cost of service* sangat tergantung pada asumsi yang dipakai.

Namun, berbeda dengan perusahaan, *pricing* ini tidak berhenti pada proses *costing*. Pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi riil masyarakat. Dengan melakukan survei untuk mengetahui kemampuan masyarakat untuk membayar (*ability to pay*). Maupun kemauan membayarnya (*willingness to pay*). Yang bisa dilihat dari alokasi belanja masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer. Sekaligus untuk memastikan komitmen masyarakat sebagai “konsumen” layanan publik.

Formulasi *costing*, kemampuan, dan kemauan membayar inilah yang menjadi variabel kunci *pricing*. Berapa yang harus dibayar masyarakat (*charging of service*) sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah. Bisa diatas, sama, atau dibawah *unit cost*-nya. Tergantung *goodwill* pemerintah. Cuma, jika ditetapkan dibawah *unit cost*, berarti pemerintah harus menyiapkan subsidi.

Catatan Penutup

Meski tampak rumit, proses *pricing* tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pada semua pihak. Di satu sisi masyarakat diharapkan lebih mudah menerimanya karena semua didasarkan pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain pemerintah punya pegangan kuat dalam membuat keputusan politik. Hingga Presiden Jokowi tidak perlu lagi mengatakan kalau kenaikan tersebut di atas terlalu tinggi. Apalagi sampai saling lempar. Karena semua sudah didasarkan pada politik *pricing* yang mempertimbangkan semua aspek, baik finansial maupun non finansial. Setuju?

Mengusut Pengemplang Pajak ¹

Prof. Andreas Lako ²

Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program amnesti pajak yang mampu memikat 965.983 pesertawajib pajak dan menghasilkan Rp 4.866 triliun harta yang dideklarasikan, serta pemasukan negara Rp 135 triliun dari hasil tebusan pajak dan lainnya, patut diapresiasi.

Meski masih jauh dari target, pencapaian tersebut merupakan prestasi luar biasa dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pertanyaan krusialnya, apa agenda prioritas yang perlu dilakukan pemerintah pasca-amnesti pajak? Sejumlah pihak menyarankan agar menteri keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, fokus mengolah dan memperkuat pangkalan data hasil amnesti pajak agar bisa digunakan untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh.

Sementara dalam Tajuk Rencana “Mengevaluasi Amnesti Pajak”, Kompas(1/4/2017) menyarankan agar Ditjen Pajak fokus pada penegakan hukum bagi pengemplang pajak dan mengawasi komitmen peserta pajak. Pemerintah juga diharapkan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan penempatan dana untuk menarik kembali aset WNI di luar negeri.

1 Kompas edisi 15 April 2017, di halaman 6

2 Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

Mengusut pengemplang pajak

Secara umum, saya mendukung sejumlah usulan tersebut. Namun, sayamengusulkan agar prioritasnya diarahkan untuk mengusut para pengemplang dan penggelap pajak. Tulisan ini memfokuskan pada pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri dan penggelapan pajak oleh korporasi PMA (penanaman modal asing). Keberhasilan menuntaskan dua agenda tersebut bakal menghasilkan ribuan triliun rupiah untuk pendapatan negara.

Prioritas mengusut pengemplang pajak yang tidak berpartisipasi dalam amnesti pajak pada periode I, II, dan III sangat penting karena terkait aspek keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai warga negara. Data amnesti pajak yang dirilis Ditjen Pajak menunjukkan partisipasi WP besar yang selama ini memarkirkan asetnya di sejumlah negara surga pajak (tax haven), seperti Singapura, Hongkong, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin, China, dan Australia, sangat rendah.

Misalnya, dari total deklarasi harta di luar negeri Rp 1.028 triliun dan repatriasi Rp 146 triliun (per 30 Maret 2017), sebanyak Rp 836 triliun (71,21 persen) berasal dari Singapura. Padahal, pada September 2016, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa aset WP Indonesia di Singapura mencapai Rp 2.600 triliun. Ini berarti, partisipasi WP yang menyembunyikan asetnya di Singapura dalam amnesti pajak hanya 32,15 persen.

Saya yakin, partisipasi wajib pajak yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara lain juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura.

Selain itu, data yang dirilis Ditjen Pajak juga tidak menyebutkan berapa banyak WP yang selama ini menyembunyikan asetnya di negara surga pajak primadona, seperti Swiss, Amerika Serikat, Luksemburg, Bahrain, Dubai, Panama, Bermuda, Selandia Baru, dan Makau, telah berpartisipasi dalam amnesti pajak. Padahal, negara-negara tersebut juga menjadi tempat primadona yang aman bagi para WP besar Indonesia dalam menyembunyikan aset.

Hal lain yang juga mengherankan adalah Ditjen Pajak tidak mengungkap berapa jumlah WP yang namanya tercatat dalam Dokumen Panama yang ikut amnesti pajak. Padahal, ketika dokumen tersebut bocor ke publik pada

awal April 2016, ada 2.961 nama WP Indonesia dalam dokumen tersebut. Nilai aset yang disembunyikan ditaksir di atas Rp 1.600 triliun.

Secara keseluruhan, efektivitas program amnesti pajak memikat para pengemplang pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri sangat rendah. Apabila klaim pemerintah pada April 2016 bahwa ada Rp 11.200 triliun aset WNI diparkir di luar negeri benar adanya, maka tingkat keberhasilan amnesti pajak hanya mencapai 10,52 persen. Karena itu, agenda mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengusut tuntas para WP kelas kakap bandel tersebut. Mereka harus dipaksa mendeklarasikan atau merepatriasi asetnya dengan tarif tebusan yang tinggi.

Hal itu untuk memberikan rasa keadilan kepada para WP patuh dan sekaligus meningkatkan kewibawaan pemerintah.

Mengusut korporasi PMA

Agenda prioritas kedua adalah mengusut dugaan penggelapan pajak oleh korporasi PMA. Seperti diketahui, dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA sudah sering diungkap Kementerian Keuangan. Namun, tidak lanjut pengusutannya tidak jelas. Pada November 2005, Menkeu Jusuf Anwar pernah melaporkan ke DPR tentang dugaan penggelapan pajak oleh 750 PMA yang merugikan negara sekitar Rp 250 triliun dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun.

Laporan tersebut bukannya ditindaklanjuti, tetapi justru menjadi bumerang bagi Jusuf Anwar karena Ia langsung digantikan oleh Sri Mulyani.

Pada November 2013, Dirjen Pajak Fuad Rahmani juga mengungkapkan ada 4.000 perusahaan dari 7.000 PMA yang terindikasi melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi dari tahun ke tahun (Kompas, 25/11/2014). Dugaan itu juga tidak ditindaklanjuti dengan alasan jumlah aparat pemeriksa pajak sangat terbatas.

Terakhir, pada Maret-Juni 2016, Menkeu Bambang Brodjonegoro gencar mengungkap ada 2.000 PMA yang diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan rugi selama 10 tahun berturut-turut sehingga negara dirugikan Rp 500 triliun. Dugaan tersebut juga tidak ditindaklanjuti karena

posisi Bambang juga digantikan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak tertarik mengusutnya.

Dari catatan itu, tampak penggelapan pajak oleh ribuan PMA dengan menggunakan teknik *income decreasing* (melaporkan rugi) sangat sistematis, masif, dan berkelanjutan.

Saya menduga, selain ribuan PMA yang terindikasi menggunakan teknik *income decreasing* agar bisa melaporkan rugi terus-menerus, masih ada ribuan PMA yang juga turut menggelapkan pajak dengan menggunakan teknik *income smoothing*. Teknik ini banyak digunakan korporasi karena lebih soft dalam memanipulasi laba dengan besaran nilai yang relatif merata dari tahun ke tahun. Tujuannya agar tidak menjadi incaran otoritas perpajakan.

Jika dugaan tersebut benar, kerugian negara akibat penggelapan pajak korporasi PMA dalam 20 tahun terakhir bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Selama periode amnesti pajak, Ditjen Pajak juga tidak pernah mengungkap partisipasi korporasi PMA. Tampaknya, tak ada PMA yang turut berpartisipasi.

Karena itu, saya mengusulkan agar pasca-amnesti pajak, pemerintah juga fokus mengusut dugaan penggelapan pajak oleh ribuan PMA. Pemerintah perlu membentuk tim auditor kompeten khusus untuk melakukan audit investigasi atau audit forensik terhadap laporan keuangan dari semua korporasi PMA. Apabila ditemukan ada tindakan rekayasa keuangan untuk menggelapkan pajak, mereka harus diberi sanksi berat. Mereka juga harus membayar kerugian negara secara utuh.

Saya yakin, apabila pemerintah serius mengusut tuntas dua agenda prioritas itu, ribuan triliun rupiah bakal masuk ke kas negara. Keseriusan tersebut juga akan berimplikasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, peningkatan kinerja ekonomi dan kemajuan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengusut Penggelap Pajak ¹

Prof. Andreas Lako ²

Setelah program amnesti pajak berakhir pada 31 Maret 2017, ada dua perasaan berbeda di kalangan pengemplang dan penggelap pajak.

Pada umumnya, para pengemplang pajak (*tax avoider*) – yaitu mereka yang sudah mengikuti amnesti pajak, tetapi belum melaporkan seluruh hartanya maupun mereka yang belum berpartisipasi – merasa cemas dan takut terhadap ancaman Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang akan mengusut dan memberikan sanksi berat kepada mereka. Apabila ancaman itu terealisasi, habislah reputasi dan harta mereka.

Namun, di sisi lain, para penggelap pajak (*tax evader*) – yaitu mereka yang selama ini tidak membayar pajak atau sangat sedikit membayar pajak karena menggunakan cara-cara ilegal untuk menggelapkan pajak – merasa tetap aman dan bahkan mungkin sedang menertawakan pemerintah. Mereka yakin aksi-aksi tipuan mereka yang selama ini telah berhasil mengelabui negara tidak akan terendus. Keyakinan itu muncul karena selama pelaksanaan amnesti pajak (1 Juli 2016-31 Maret 2017), fokus perhatian pemerintah tertuju kepada pengemplang pajak.

1 Kompas 18 Mei 2017 . hal. 6

2 Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

Tak tersentuhnya para penggelap pajak sesungguhnya merupakan pelanggaran serius terhadap asas keadilan pajak, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Akibat pembiaran itu, kerugian negara diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Jumlah kerugian itu bahkan diestimasi jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat pengemplangan pajak. Karen itu, praktik ilegal itu harus segera diusut tuntas.

Modus penggelapan

Tulisan ini membahas modus dan strategi pengusutan penggelapan pajak pada level korporasi. Secara teoretis, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan rekayasa perpajakan yang dilakukan wajib pajak individu, korporasi, atau entitas (*tax payers*) untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau menghindari pajak kepada negara dengan menggunakan teknik-teknik perkeayasaan keuangan yang ilegal (Slemrod, 2007).

Sandmo (2004) menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan data dan fakta dari otoritas pajak. Sementara Gunny (2005) menyatakan perkeayasaan dapat dilakukan dengan teknik *accounting fraud*, *accounting management*, dan *real earnings management*.

Dalam banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan ilegal itu bahkan dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak berkonspirasi dengan akuntan internal dan otoritas pajak (McGee, 2006). Di Indonesia, dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang terungkap ke publik, tampak bahwa konspirasi penggelapan pajak dilakukan secara rapi dengan melibatkan pemilik, direksi, akuntan intern dan oknum otoritas perpajakan, serta akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan.

Pertanyaannya, apa tipe korporasi yang patut diduga melakukan praktik penggelapan pajak? Apa saja teknik dan modus perkeayaannya?

Dari sejumlah hasil studi yang saya lakukan, ada indikasi kuat beberapa tipe korporasi yang “gemar” melakukan rekayasa keuangan untuk penggelapan pajak. Pertama, korporasi tertutup maupun korporasi *go public* nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu klan keluarga atau institusi tertentu. Kedua, korporasi penanaman modal asing (PMA) yang menguasai mayoritas saham pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia maupun yang

berinvestasi dalam sejumlah sektor usaha.

Umumnya pemegang saham mayoritas dari dua tipe korporasi itu juga menempatkan orang-orang “terbaiknya” dalam jajaran direksi dan komisaris. Mereka juga memilih akuntan intern, akuntan publik, komite audit, dan lainnya yang bisa diajak untuk “berkompromi” dalam perekayasaan.

Dalam perekayasaan tersebut, mereka menggunakan teknik akuntansi *income minimization (IM)*, yaitu melaporkan laba periodik serendah mungkin agar bisa membayar pajak serendah mungkin pula. Jika perlu, laba yang dilaporkan bernilai negatif sehingga tak perlu repot membayar pajak.

Biasanya, apabila nilai laba hasil rekayasa masih besar, direksi akan menggunakan teknik *accounting fraud (AF)* untuk menurunkan laba secara drastis.

Modus perekayasaan yang sering digunakan adalah menurunkan nilai aset dan ekuitas, meningkatkan nilai utang atau menciptakan pos-pos utang fiktif, serta menaikkan biaya dan menciptakan pos-pos biaya fiktif. Selain itu, direksi juga akan menurunkan nilai pendapatan serendah mungkin atau menyembunyikan sejumlah transaksi penjualan sehingga pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan menjadi sangat kecil.

Dengan cara tersebut, laba yang dilaporkan menjadi sangat rendah atau negatif sehingga pajak yang dibayarkan juga menjadi sangat kecil atau tidak membayar sama sekali. Saya mencermati, teknik IM dan AF banyak dipakai ribuan PMA.

Dalam artikel “Penggelapan Pajak PMA” (*Kompas*, 6/4/2016) dan “Mengusut Pengemplang Pajak” (*Kompas*, 15/4/2017), saya telah menguraikannya. Selain PMA, banyak korporasi nasional juga terindikasi menggunakan teknik yang sama. Meskipun banyak digunakan, teknik IM dan AF dinilai sangat berisiko karena bisa dicurigai otoritas pajak. Karena itu, ada banyak pula korporasi yang lebih menyukai teknik *income smoothing (IS)*. Berbeda dengan teknik IM yang berusaha memanipulasi pos-pos keuangan secara signifikan, teknik IS berusaha merekayasa item-item keuangan secara lebih halus (*soft*). Dampaknya, nilai aset, utang, ekuitas, pendapatan, biaya, dan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang fluktuatif dari waktu ke waktu.

Tujuannya, untuk meratakan besaran pajak dari waktu ke waktu (*tax smoothing*). Dengan cara ini, korporasi akan terhindar dari risiko dicurigai. Jumlah korporasi yang menggunakan teknik ini diyakini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan teknik IM.

Memburu penggelap pajak

Untuk menghentikan praktik penggelapan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara, pengusutan terhadap korporasi penggelap pajak menjadi sangat penting serta mendesak untuk dilakukan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang kompeten untuk melakukan pengusutan tersebut.

Bagaimana mendeteksi suatu korporasi telah melakukan penggelapan pajak? Sebenarnya tidak sulit! Pertama, mencermati tren pelaporan nilai pajaknya dari tahun ke tahun. Apabila suatu korporasi tidak membayar pajak atau tren pelaporan nilai pajaknya terus menurun atau relatif merata dari tahun ke tahun, patut dicurigai korporasi tersebut adalah penggelap pajak.

Kedua, mencermati tren pelaporan nilai aset, utang, ekuitas pemilik, pendapatan, biaya, dan laba dalam pelaporan keuangan dari tahun ke tahun. Apabila tren nilainya tak mengalami kenaikan berarti, atau tren nilai laba dan ekuitasnya cenderung menurun, merata, atau bernilai minus, patut diduga korporasi tersebut adalah penggelap pajak.

76

Korporasi-korporasi terduga penggelap pajak tersebut harus diusut lebih lanjut. Jika terbukti, mereka harus diberi sanksi berat dan membayar kerugian negara.

Keseriusan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani dalam melakukan pengusutan tersebut tidak hanya akan meningkatkan rasa keadilan dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan negara ratusan hingga ribuan triliun rupiah untuk menopang APBN.

Semoga!

Memacu Amnesti Pajak ¹

Prof. Andreas Lako ²

Keyakinan sejumlah kalangan bahwa penerimaan negara dari uang tebusan amnesti pajak akan melampaui target Rp 165 triliun pada akhir periode III pelaksanaan program amnesti pajak tampaknya akan sulit terwujud.

Kekhawatiran tak akan tercapainya target itu muncul karena dana tebusan pajak yang pada akhir periode I (1 Juli-30 September 2016) mencapai Rp 97,16 triliun, pada akhir periode II (1 Oktober-30 Desember 2016) justru menurun menjadi Rp 12,61 triliun. Pada periode III (1 Januari-31 Maret 2017), dana tebusan pajak baru mencapai Rp 2,23 triliun (per 24 Februari 2017). Secara total, dana tebusan pajak hingga 24 Februari 2017 baru mencapai Rp 112 triliun (67,87 persen).

Pertanyaannya, mengapa tren tebusan amnesti pajak pada periode II dan III merosot drastis dibandingkan periode I? Apakah penyebabnya karena mayoritas peserta wajib pajak (WP) sudah mengikuti amnesti pajak tersebut pada periode I atau karena faktor lain?

1 Kompas 4 Maret 2017, hal. 6

2 Guru Besar Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

Masih enggan

Dari berbagai sumber informasi diperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya masih terdapat banyak sekali WP yang belum mengikuti program amnesti pajak. Para WP kelas kakap yang selama ini “lihai” memarkir atau menyembunyikan asetnya di negara-negara surga pajak (tax haven) ternyata banyak yang belum ikut amnesti pajak. Padahal, mereka inilah yang sesungguhnya menjadi prioritas program amnesti pajak.

Rendahnya minat WP kelas kakap mengikuti amnesti pajak tercermin dari jumlah aset yang telah dideklarasikan. Berdasarkan Statistik Amnesti Pajak per 24 Februari 2017, dari total Rp 4.402 triliun aset yang sudah dideklarasikan, Rp 3.245 triliun (73,72 persen) berasal dari dalam negeri, sedangkan Rp 1.016 triliun (23,08 persen) berasal dari deklarasi aset dari luar negeri. Sisanya, Rp 141 triliun (3,2 persen), bersumber dari repatriasi aset dari luar negeri.

Rendahnya jumlah aset dari luar negeri yang dideklarasikan dan direpatriasi tersebut sungguh ironis karena jauh sebelum program amnesti pajak digulirkan pada 1 Juli 2016, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan bahwa jumlah aset dari WP Indonesia yang diparkir di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun. Apabila perkiraan itu benar, program amnesti pajak baru menjangkau 10,15 persen aset WP yang diparkir di luar negeri. Ini sungguh ironis!

Selain itu, data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (13 Februari 2017) juga menunjukkan jumlah WP yang ikut amnesti pajak baru mencapai 702.052 WP. Padahal, total ada 30,04 juta pemilik NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat dan korporasi WP mengikuti amnesti pajak masih sangat rendah (2,3 persen). Pertanyaannya, mengapa mayoritas WP kelas kakap yang memarkir asetnya di luar negeri masih enggan ikut amnesti pajak? Mengapa pula animo WP mengikuti amnesti masih sangat rendah?

Menurut hemat saya, faktor penyebab utamanya karena tidak adanya kewajiban transparansi dan akuntabilitas informasi terhadap profil WP kepada publik. UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP) sama sekali tidak mengatur kewajiban itu. UUPP justru memproteksi kerahasiaan WP peserta amnesti pajak. Asumsinya, dengan menjamin kerahasiaan WP, para WP akan antusias ikut amnesti pajak. Ternyata, tidak!

Demikian pula tawaran persentase uang tebusan yang sangat kecil juga tak menggiurkan bagi mayoritas WP. UUPP menawarkan uang tebusan 2 persen, 3 persen, dan 5 persen pada periode I, II, dan III untuk repatriasi/deklarasi aset bagi WP dalam negeri serta 4 persen, 6 persen, dan 10 persen pada periode I, II, dan III untuk repatriasi/deklarasi aset di luar negeri. Tawaran ini ternyata tak mujarab memikat mayoritas WP.

Selain itu, ancaman Presiden Joko Widodo yang akan mengenakan sanksi dan tarif pajak yang tinggi kepada para WP bandel juga tidak menciutkan nyali WP. Meski pemerintah berulang kali menegaskan telah memiliki data lengkap terkait profil WP sehingga bagi WP yang masih bandel akan menerima risikonya, mayoritas WP justru menganggapnya sebagai angin lalu. Bisa jadi mayoritas WP meragukan pernyataan tersebut.

Umumkan profil WP

Seperti telah disinggung di atas, salah satu kelemahan utama UUPP adalah sangat memproteksi kerahasiaan dan melindungi WP peserta amnesti pajak. Di satu sisi, proteksi tersebut telah memotivasi para WP “nakal” mengikuti amnesti pajak pada periode I, II, dan III ini.

Namun, di sisi lain, proteksi tersebut justru menjadi bumerang yang memicu para WP “nakal” yang lain tidak ambil bagian dalam amnesti pajak. Alasannya, baik peserta WP yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi sama-sama “aman” terlindungi dari risiko reputasi (*reputation risks*) karena secara yuridis, pemerintah dilarang mengumumkan profil WP kepada publik. Karena sama-sama terhindar dari risiko reputasi, maka lebih menguntungkan jika tidak ikut serta dalam amnesti pajak.

Dugaan itu tecermin dari realitas, yaitu hingga saat ini pemerintah belum bisa atau tidak berani mengumumkan secara pasti kepada publik berapa banyak jumlah WP yang harus mengikuti amnesti pajak dan berapa banyak jumlah WP Indonesia yang memarkirkan asetnya di luar negeri serta berapa besar aset WP di luar negeri yang seharusnya dideklarasikan/direpatriasi. Ketidakpastian itu memunculkan spekulasi di kalangan WP bahwa pemerintah sesungguhnya tidak punya basis data profil WP yang lengkap dan akurat.

Karena itu, untuk memacu capaian target tebusan amnesti pajak Rp 165 triliun dalam waktu yang tersisa ini, Presiden Joko Widodo dan Menkeu

Sri Mulyani sebaiknya segera merumuskan suatu kebijakan baru untuk “memaksa” para WP bandel segera mengikuti amnesti pajak. Pemerintah perlu segera memperkuat basis data jumlah WP dan profil aset mereka serta kategori WP yang sudah dan belum mengikuti amnesti pajak. Pembuatan basis data profil WP Indonesia yang memarkirkan asetnya di luar negeri hendaknya perlu menjadi prioritas utama.

Apabila basis data tersebut telah tersedia, pemerintah perlu segera mengumumkan kepada publik tentang berapa banyak WP yang sudah dan belum mengikuti amnesti pajak serta berapa besar jumlah aset yang sudah dan belum dideklarasikan/direpatriasi para WP. Selain itu, pemerintah juga perlu mengirim surat peringatan khusus kepada para WP bandel. Presiden perlu juga memanggil secara khusus para WP kelas kakap untuk menjelaskan risiko-risiko serius yang bakal dihadapi jika mereka masih tetap membandel. Misalnya, nama-nama mereka akan diumumkan kepada publik jika hingga akhir Maret 2017 mereka belum ikut amnesti pajak.

Dengan terobosan tersebut, para WP bandel akan serius mengikuti amnesti pajak karena takut informasi privat mereka bakal diketahui publik sehingga merusak reputasi mereka. Risiko reputasi merupakan risiko yang sangat ditakuti para WP, khususnya WP korporasi dan WP pribadi kelas menengah ke atas. Saya yakin, apabila pemerintah berani melakukan terobosan tersebut, target tebusan amnesti pajak Rp 165 triliun bakal tercapai, bahkan bisa terlampaui. Demikian pula target-target pencapaian lainnya pasti juga akan terwujud. Semoga!

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

Bagian 4

Bijak Menggunakan Sumber Alam Tanah Air

Perluas Penggunaan Pewarna Makanan Alami ¹

V. Kristina Ananningsih ²

WARNA-WARNI makanan dapat menambah daya tarik konsumen. Oleh karena itu, produsen memberikan pewarna pada produk pangan yang diolahnya. Pewarna makanan digunakan untuk memperbaiki dan memberi warna pada makanan (Depkes, 1999). Saat ini, pewarna makanan sintetis mudah dibeli di pasaran, baik dalam bentuk serbuk maupun cair.

Namun, pewarna sintetis yang berbahaya masih juga beredar di pasaran yang peruntukannya seharusnya untuk pewarna tekstil, seperti warna merah Ponceau SX dan Rhodamin B. Pewarna sintetis yang berbahaya ini dapat menyebabkan keracunan pada tubuh dan penyakit ginjal.

Pewarna makanan sintetis juga sering digunakan dalam kadar yang berlebih. Padahal di setiap kemasan pewarna makanan sintetis tersebut telah dicantumkan dosis pemakaian yang benar. Namun, produsen terkadang mengabaikan batas ambang pemakaian ini karena keinginannya untuk memberikan warna yang kuat pada produknya, sehingga terkesan mencolok dan menarik. Apabila produk dengan kandungan pewarna makanan sintetis yang berlebih ini dikonsumsi secara terus-menerus, pastilah berakibat tidak baik terhadap kesehatan tubuh.

1 Tribun Jateng 7 Oktober 2016

2 Staf Pengajar Teknologi Pangan Unika Soegijapranata

Penggunaan pewarna makanan alami untuk menggantikan pewarna sintesis sebaiknya telah ditingkatkan karena mempunyai kelebihan, yaitu aman serta tidak menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Beberapa pewarna alami juga dapat digunakan untuk memberikan rasa pada makanan.

Sumber pewarna alami dapat diperoleh dari tanaman dan hewan. Tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna alami dan contohnya adalah bagian umbi (bit merah, wortel, ketela ungu), daun (bayam dan daun jati), buah (anggur, stroberi, buah naga), batang (kayu secang, kayu manis), bunga (bunga telang, bunga kesumba), biji (angkak, beras merah), rimpang (kunyit). Sumber dari hewan contohnya kuning telur, udang dan kepiting.

Pewarna alami memiliki manfaat kesehatan karena berperan sebagai sumber vitamin, antioksidan, dan antimikrobia. Antioksidan dapat berperan sebagai zat anti kanker dan melawan radikal bebas di dalam tubuh yang menyebabkan berbagai penyakit. Komponen antioksidan dan warna yang dihasilkan serta sifat kestabilannya adalah sebagai berikut :

1. klorofil memberi warna hijau yang sensitif terhadap asam, panas, alkali, logam
2. karotenoid memberi warna kuning, jingga, merah yang sensitif terhadap sinar, oksigen, asam, panas
3. antosianin memberi warna merah atau biru yang sensitif terhadap pH, panas, sinar, logam
4. kurkurmin memberi warna kuning yang sensitif terhadap oksigen, asam kuat, panas
5. betalain memberi warna merah keunguan yang sensitif terhadap panas, alkali, logam.

Sensitivitas atau kerusakan pewarna alami tersebut dapat dikurangi dengan pemilihan kondisi pH yang tepat pada makanan serta waktu pemanasan yang optimal atau tidak berlebih.

Makanan tradisional, seperti kue ku, kue mangkok, klepon, dawet, putu mayang dikenal dengan warna-warninya yang menarik, yaitu merah, hijau, kuning. Aplikasi pewarna makanan alami pada makanan tradisional sangat baik untuk dilakukan agar makanan menjadi lebih aman dan lebih sehat.

Warna kuning dapat diperoleh dari labu kuning yang mengandung beta karoten, glukopyranosida, cucurbitosida yang mempunyai efek kesehatan untuk menurunkan kolesterol, melancarkan aliran darah dan menjaga

kesehatan mata. Selain itu, warna kuning juga didapatkan dari ekstrak kunyit yang mengandung kurkurmin dan turmerone sebagai anti kanker, penurun kolesterol, antidiabetes, antioksidan, antiinflamasi dan antimikrobia.

Sedangkan, warna merah dapat diperoleh dari kayu secang dengan senyawa aktif saponins, phytosterols, brazilin, tannins, flavonoids yang mempunyai efek kesehatan untuk melancarkan peredaran darah, obat batuk, radang, rematik, asam urat, anti kanker. Bit merah yang menghasilkan warna merah keunguan mengandung betalain yang bermanfaat sebagai antioksidan dan antimikrobia. Rosela yang juga menghasilkan warna merah mengandung vitamin C, vitamin A, antosianin, kalsium, dan asam amino. Kandungan tersebut dapat berperan sebagai antioksidan, antikanker, penurun kolesterol, dan mengatasi hipertensi.

Pewarna hijau dapat diperoleh dari ekstrak daun pandan dan daun suji. Keduanya mengandung klorofil dan flavanoid yang bersifat sebagai antioksidan dan penurun kolesterol. Daun suji juga mengandung saponin yang bersifat sebagai antioksidan. Melihat potensi banyaknya sumber pewarna makanan alami dan manfaat kesehatan yang diperoleh, penggunaan pewarna alami pada produk pangan dapat kita tingkatkan lebih lanjut.

Menakar Sayuran Sehat ¹

Probo Y. Nugrahedhi ²

TREN konsumsi makanan 'sehat salah satunya dapat dilihat dari banyaknya orang yang mulai memilih mengonsumsi makanan alami atau mengalami proses pengolahan yang minimum, dan tidak ditambah dengan bahan tambahan yang bukan dari bahan alami. Pola konsumsi ini biasanya dilakukan untuk buah dan sayur, dengan tujuan untuk mendapatkan senyawa menyehatkan dalam jumlah yang masih maksimal.

Namun, khususnya pada sayur, tidak semua sayur dapat dikonsumsi mentah tetapi sebagian harus diolah terlebih dahulu. Sayur dimasak menjadi tumis, sup, diasinkan, dibuat menjadi keripik, atau bahkan dikalengkan. Ini tentu memberikan dampak pada atribut mutu produk yang dihasilkan.

Pemasakan sayur menyebabkan produk menjadi lebih mudah dicerna dibandingkan jika harus dikonsumsi mentah. Pemasakan, terutama yang menggunakan panas, juga dapat mengurangi jumlah mikro organisme, sehingga makanan menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Namun, pemasakan juga dapat mengubah warna produk menjadi lebih pudar. Beberapa senyawa

1 Tribun Jateng 18 Mei 2016

2 Staf pengajar di Program Magister Teknologi Pangan, Unika Soegijapranata

gizi, terutama yang mudah rusak karena panas, juga menjadi berkurang jumlahnya setelah dimasak.

Meskipun secara umum pemasakan berpotensi mengurangi kandungan senyawa menyehatkan, namun jika dilakukan dengan tepat, maka pemasakan justru memberi pasokan senyawa menyehatkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pemasakan. Contohnya adalah likopen pada tomat.

Konsumsi buah dan pasta tomat diduga kuat berhubungan dengan penurunan risiko beberapa penyakit kanker. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan kandungan likopen justru semakin banyak dalam buah tomat yang dimasak secara singkat dibanding dalam kondisi segar. Salah satunya, penelitian oleh Dewanto dkk (2002), yang dimuat di *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, menunjukkan bahwa pemanasan tomat pada suhu 88 C selama 30 menit dapat meningkatkan kandungan likopen dalam tomat. Namun, kandungan vitamin C mengalami penurunan drastis. Meskipun demikian, aktivitas antioksidan tomat setelah dipanaskan justru meningkat. Artinya, 'vitamin C tidak menjadi satu-satunya penyumbang antioksidan dalam tomat, namun juga disumbang dari senyawa-senyawa lainnya.

Contoh komponen lain yang membantu mempromosikan kesehatan adalah glukosinolat. Kelompok senyawa ini banyak dijumpai di sayuran keluarga kol, termasuk brokoli, kol, berbagai sawi, dan kembang kol. Salah satu produk turunan senyawa ini, yaitu golongan isotiosianat terutama sulforaphane, diduga kuat memiliki peran yang baik dalam menurunkan risiko penyakit kanker kolorektal. Dalam jurnal *LWT-Food Science and Technology*, Nugrahedi dkk (2015) menunjukkan bahwa selama perebusan kol selama 3 menit diikuti dengan pengukusan selama 10 hingga 15 menit dapat meningkatkan kandungan senyawa-senyawa glukosinolat dalam kol. Praktik ini adalah simulasi pemasakan kol gulung yang biasa dijumpai pada pelengkap hidangan siomai.

Lebih jauh lagi, ketika pemasakan dilanjutkan, maka kandungan berbagai senyawa menyehatkan tersebut mengalami penurunan. Dengan demikian pemasakan yang optimal, terutama dari aspek suhu dan waktu, sangat berperan dalam menghasilkan produk dengan tingkat keuntungan yang optimal pula. Karena berbagai senyawa itu terletak di dalam sel dan jaringan

tanaman, maka pemasakan pada waktu yang relatif singkat dapat membantu meningkatkan ketersediaan cerna saat dikonsumsi. Namun, jika pemasakan dilakukan dalam waktu yang relatif lama, maka senyawa-senyawa tersebut juga akan mengalami kerusakan, baik karena panas atau punoksidasi. Akibatnya, keuntungan yang didapatkan justru sangat rendah.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pengolahan makanan, tidak selalu menyebabkan turunnya senyawa gizi ataupun senyawa-senyawa menguntungkan lainnya. Konteks, dalam hal ini jenis bahan pangan yang diolah dan bagaimana cara mengolahnya, perlu dipertimbangkan ketika akan membandingkan konsumsi makanan mentah atau makanan olahan. Namun demikian, ilustrasi di atas juga hanya terbatas pada kandungan beberapa senyawa dalam satu bahan pangan.

Faktanya, praktik pengolahan sayur di Indonesia banyak menggunakan berbagai bumbu dan dikombinasi dengan bahan pangan lainnya. Berbagai komponen yang ada di dalam berbagai bahan pangan tersebut sangat mungkin saling berinteraksi selama pengolahan menghasilkan produk makanan dengan kualitas yang diinginkan.

Yang tak bisa diabaikan juga, saat seseorang mengonsumsi makanan, maka seluruh indra, mulai dari penglihatan, pencicip, pembau, peraba, dan pendengaran, akan bekerja bersama-sama dan seluruh atribut yang melekat pada makanan tersebut juga akan dipersepsi, untuk kemudian disimpulkan apakah makanan tersebut dapat diterima atau tidak. Dengan kata lain, aspek kesehatan menjadi salah satu indikator mutu makanan saja, namun atribut lain seperti rasa, warna, tekstur, aroma, dan lain-lain, juga menjadi pertimbangan penting bagi seseorang untuk mengonsumsi suatu makanan.

Selamat makan!

DUA WAJAH PLASTIK KEMASAN PANGAN ¹

Inneke Hantoro ²

Plastik merupakan bahan pengemas makanan paling populer. Penggunaannya meningkat seiring meningkatnya produksi makanan. Data Euromonitor memperkirakan secara global penjualan makanan dan minuman dalam kemasan meningkat 12,6% per tahun selama 2013-2017. Data Global Business Guide Indonesia tahun 2015 menunjukkan 60% dari total produk plastik di Indonesia dipakai untuk kemasan pangan.

Data di atas juga mengindikasikan bertambahnya sampah plastik kemasan pangan. Indonesia adalah penyumbang polutan plastik ke laut terbesar di dunia setelah Cina, sebesar 0,48-1,29 juta metrik ton plastik/tahun (Jambeck dkk, 2015). Plastik sebagai kemasan pangan memiliki dua wajah, yang mampu memberikan manfaat bagi makanan, sekaligus ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan.

Plastik terbuat dari polimer non logam yang mempunyai berat molekul yang besar. Sumber bahan plastik dapat berasal dari minyak bumi, gas alam, dan bio-energi yang terbarukan. Plastik adalah pengemas yang ringan, tahan lama, lentur, dan relatif mampu menahan keluar masuknya udara, uap air,

1 Tribun 14 nopember 2016

2 Dosen Teknologi Pangan Unika Soegijapranata Semarang

panas, dan cahaya. Beberapa jenis plastik yang digunakan untuk kemasan pangan, antara lain PET, PP, PVC, HDPE, LDPE, dan PS. Sebagian besar plastik kemasan pangan bersifat sekali pakai, yang kemudian didaur ulang atau ditimbun, namun banyak pula yang dibuang di sungai dan pantai.

Banyak sampah plastik yang berakhir di laut, menjadi bagian dari sampah laut (*marine debris*). Sekitar 60–80% *marine debris* adalah plastik. Dapat dibayangkan, lautan menjadi mangkuk penampungan akhir berbagai sampah plastik dari seluruh dunia. Diperkirakan ada sekitar 8 juta ton plastik yang memasuki laut setiap tahun (Jambeck dkk, 2015). Sebagian dari sampah plastik tersebut terkonsentrasi di 5 lokasi, tempat arus laut yang kuat berada (*gyres*). Setidaknya ada sekitar 5,25 triliun potongan plastik yang mengapung di lautan (Eriksen dkk, 2014), dan sepertiganya ditemukan di lautan Pasifik yang kemudian dikenal dengan *Great Pacific Garbage Patch*. Di tahun 1997, kesadaran manusia akan bahaya sampah plastik benar – benar digugah saat ditemukan kumpulan serpihan plastik di lautan Pasifik yang luasnya sama dengan luas gabungan negara Portugal, Spanyol dan Perancis.

Keberadaan sampah plastik di lautan membawa konsekuensi serius bagi keberlangsungan kehidupan akuatik yang ada. Telah tercatat banyak binatang laut yang mati karena terjebak oleh sampah plastik atau telah menelan potongan sampah plastik, yang kemudian ditemukan di bagian pencernaan mereka. Selain bahaya yang ditimbulkan oleh plastik yang mengapung, bahaya potensial adalah plastik yang secara diam – diam terkubur di dasar lautan.

Plastik dapat mengapung di lautan selama puluhan tahun karena resisten terhadap degradasi, meskipun pada akhirnya dapat mengalami fragmentasi oleh karena paparan sinar ultraviolet dan abrasi gelombang laut. Proses degradasi ini dapat memakan waktu puluhan tahun. Pada akhirnya plastik yang telah terfragmentasi menjadi mikroplastik (ukuran partikel kurang dari 5 mm) dan nanoplastik, kemudian tenggelam di dasar laut. Jumlah mikroplastik yang berada di dasar lautan diperkirakan sangat banyak dan menyebar, meskipun tidak ada data yang menyatakan konsentrasi persisnya. Namun di beberapa tempat seperti *gyres*, konsentrasi mikroplastik ditengarai 6 kali lipat jauh lebih banyak dari zooplankton yang ada dalam satuan berat kering (Moore dkk, 2001). Konsekuensinya, mikroplastik dapat termakan oleh hewan laut yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Studi

oleh Rochman (2015) menemukan serpihan plastik di berbagai jenis ikan dan tiram yang berasal dari pasar di Makassar dan California. Penemuan ini menjadi isyarat bahwa ancaman masuknya plastik ke rantai makanan tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ulasan di atas bermaksud menggambarkan bahwa di balik manfaat plastik ada bahaya besar yang mengancam, tidak hanya pada keberlanjutan kehidupan di ekosistem laut, namun juga ancaman terhadap keamanan hasil laut yang dikonsumsi manusia. Memang toksisitas mikroplastik dan dampaknya pada kesehatan manusia masih perlu dikaji lebih mendalam. Namun dari banyak studi tentang plastik sebagai polutan menunjukkan bahwa plastik dapat menyerap berbagai kontaminan toksik lain seperti *polychlorinated biphenyls* (PCBs), *polyaromatic hydrocarbons* (PAHs), dan berbagai polutan organik lain yang persisten, yang selanjutnya dapat ditransfer ke tubuh manusia melalui konsumsi hasil laut.

Implikasi dari plastik yang memiliki dua wajah berdampak pada penggunaan plastik yang terjadi di masyarakat, satu contoh nyata adalah pemberlakuan kantong plastik berbayar di ritel sejak Februari 2016 lalu. Kebijakan ini berlaku di 22 kota di Indonesia, termasuk di Semarang dan Solo. Selanjutnya gerakan ini diikuti beberapa kota yang lain di Jawa Tengah. Kebijakan plastik berbayar ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Penanganan plastik yang serius oleh berbagai pihak, baik pemerintah, produsen plastik, industri pangan, institusi akademik, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini melakukan berbagai riset tentang bioplastik dan pengganti *plasticizer* - zat yang membuat plastik sulit terurai, dengan harapan dapat menemukan plastik yang ramah lingkungan. Sementara itu, masyarakat dapat memulai aksi dengan tidak sembarangan membuang plastik ke lingkungan, memilah sampah plastik dari sampah yang lain, dan mendaur ulang. Perubahan perilaku ini harus dibangun oleh masyarakat bila tidak ingin mengonsumsi hasil laut yang mengandung plastik.

Paradigma Baru Mencegah Kegemukan ¹

K. Ardanareswari²

KESEHATAN manusia merupakan topik yang tak pernah habis digali. Paradigma mengenai penyebab suatu penyakit pola hidup seperti obesitas, diabetes, PJK, atau kanker, biasanya dikaitkan dengan faktor intrinsik seperti kondisi imun tubuh dan genetik penderita atau faktor ekstrinsik seperti lingkungan, pola makan, pola hidup dan lain lain. Tanpa mengabaikan faktor-faktor tersebut, dunia sains telah mulai melirik satu faktor lagi yang kemungkinan dapat menjadi pijakan krusial yang mempengaruhi kesehatan manusia secara umum, yaitu komposisi mikrobiota pencernaan.

Titik awal masuknya kesadaran akan relevansi mikrobiota pencernaan terhadap kesehatan manusia dimulai sejak Metchnikoff (1845 - 1916), penerima Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1908, menunjukkan bahwa mikrobia berbahaya bagi kesehatan yang ditemukan di pencernaan manusia dapat digantikan oleh mikrobia yang menguntungkan. Temuan ini terus menerus dikembangkan ke arah perkembangan probiotik, hingga pada era ini mulai terlihat arah baru mengenai peranan mikrobiota pencernaan dalam tubuh manusia yang ternyata lebih mendalam dibanding hanya menyehatkan pencernaan semata.

1 Tribun Jateng 15 April 2016

2 Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian, Unika Soegijapranata

Kegemukan selama ini hampir selalu diasosiasikan dengan neraca energi positif, yaitu surplus dari net energi yang masuk dan energi yang digunakan. Beberapa makanan yang berkalori tinggi seperti kulit ayam, kentang goreng, dan daging berlemak dianggap perlu dihindari. Bagaimanapun, beberapa individu tetap sulit menurunkan berat badan walau telah mengadopsi perilaku diet rendah kalori. Beberapa individu yang lain tetap kurus walaupun memiliki pola makan yang padat kalori. Berangkat dari paradigma tersebut, sangat menarik ketika suatu studi menunjukkan bahwa komposisi mikrobiota pencernaan pada kelompok individu yang obesitas berbeda dengan kelompok individu yang langsing. Pada individu obesitas, komposisi mikrobiota pencernaannya didominasi oleh bakteri dari filum Firmicutes, sedangkan pada individu yang langsing, Bacteroidetes lebih mendominasi (Bervoetsdkk., 2013). Pada titik ini, korelasi antara obesitas dan komposisi mikrobiota pencernaan tersebut bisa dipandang dari hukum aksi-reaksi: Apakah obesitas adalah aksi yang mempengaruhi atau justru reaksi dari mikrobiota pencernaan?

Jawaban dari pertanyaan tersebut sangat mengubah paradigma dunia sains kesehatan dalam memandang obesitas. Pertanyaan besar itu terjawab oleh Ridaura dkk (2013): Pada penelitiannya, mikrobiota pencernaan dari manusia kembar yang berbeda berat badan ditransplantasikan kepada dua kelompok tikus yang steril dari mikrobiota. Setelah 5 hari, kelompok tikus yang menerima mikrobiota pencernaan dari pasangan kembar yang obesitas menunjukkan peningkatan massa tubuh dan massa lemak yang lebih tinggi dibanding kelompok yang menerima transplant mikrobiota pencernaan dari pasangan kembar yang langsing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar mikrobiota pencernaan dapat ditransplantasikan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol metabolisme tubuh. Indikasi lain adalah, walaupun masih sangat prematur untuk menarik kesimpulan, peran mikrobiota pencernaan dalam metabolisme tubuh mungkin jauh lebih menyeluruh daripada yang selama ini kita pahami.

Studi mengenai korelasi komposisi mikrobiota pencernaan dan kegemukan memang masih berada pada tahap awal. Tantangan selanjutnya yang belum bisa diakomodasi oleh teknologi saat ini adalah merancang populasi mikrobiota pencernaan dengan komposisi yang tepat untuk tujuan tertentu.

Bukankah menggelitik untuk memikirkan bahwa 20 -30 tahun lagi kita akan menemui kapsul-kapsul berisi kumpulan bakteri, baik dengan cara kerja yang sama sekali alamiah? Dengannya, kita bisa mengontrol “pemanenan” energi oleh tubuh kita, sebanyak apapun asupan makanan yang masuk. Lebih jauh lagi, intervensi terhadap mikrobiota pencernaan kemungkinan bisa jadi salah satu alternatif diet preventif atau terapi kuratif untuk menangkal penyakit-penyakit degeneratif yang semakin mengancam kehidupan.

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

Bagian 5

Transportasi yang
Humanis

Momentum Membenahi Transportasi Umum¹

Djoko Setijowarno ²

Indonesia merupakan negara yang mengatur angkutan umumnya (*regulated system*), sama dengan negara-negara lainnya sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk melayani dan melindungi masyarakat, pengusaha dan lingkungan.

Perizinan sebagai salah satu bentuk kontrol pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha sehat. Itulah mengapa operator angkutan umum harus berupa badan hukum yang pada prakteknya berupa *entry barrier*, dimana hanya perusahaan yang kompeten saja yang bisa masuk ke industri jasa angkutan umum.

Tujuannya supaya lebih profesional dan bertanggungjawab untuk menjalankan tugas pemerintah atau pemda dalam menjamin terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, lancar, efisien, terjangkau. Oleh sebab itu badan usaha angkutan umum harus berbadan hukum, sehingga memiliki kompetensi dan profesional.

Untuk pengoperasian taksi, pelayanan lentur (*flexible service*), bukan rute tetap (*fixed route*), maka harus meminimkan kilometer kosong (*empty*

1 Jawa pos, 20 Maret 2017

2 Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

kilometer). Karena taksi juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang efektif (kapan saja, di mana saja, ke mana saja kebutuhan penumpang dapat dilayani). Oleh sebab itu diperlukan seperangkat komunikasi di dalam pengoperasiannya. Pada awalnya dengan radio, kemudian telepon dan dikendalikan dengan GPS (*Geographic Position System*).

Perangkat ini tentunya dapat memudahkan *dispatcher*, pengemudi dan calon penumpang di dalam pelayanan taksi dan lebih responsif. Jadi, penggunaan aplikasi *gadget* atau *computer on line* hanya merupakan pelengkap pengoperasian angkutan umum. Seharusnya perangkat *dispatching* yang dijual atau ditawarkan adalah *seat* atau perjalanan dengan taksi berizin, bukan terhadap kendaraan pribadi.

Analogi di dalam perusahaan taksi di beberapa negara dimungkinkan ada perusahaan *dispatching* untuk mengakomodasi perusahaan taksi kecil agar lebih responsif dan bekerjasama, namanya *taxi dispatching service operator* yang dijual adalah *seat* atau perjalanan taksi berizin.

Di masyarakat perkotaan di beberapa negara maju untuk penglaju pada jam sibuk, termasuk di Indonesia dengan *nebeng.com* nya. Model ini beda dengan *uber* atau *grab car*. Karena inisiatif untuk bepergian dengan satu kendaraan bersama-sama dengan satu kendaraan.

Bukan barang haram

Aplikasi teknologi di sektor transportasi bukanlah hal baru. Sudah lama dikenal dengan ITS (*Intelegentia Transport System*). Salah satunya adalah sistem aplikasi atau *on line*. Sekarang sudah diterapkan di perkerataapian, seperti dalam hal pemesanan tiket, pelacakan lokasi KA yang bergerak. Di jalan raya ada ATCS yang membantu mengatur lalu lintas kendaraan di persimpangan. Bahkan, jika bus dilengkapi dengan perangkat GPS, dapat diselenggarakan *bus priority* atau memberikan prioritas jika bus umum yang akan melintasi persimpangan dapat terus berjalan, tanpa halangan. Hal ini dapat dilakukan karena terhubung dengan perangkat ATCS yang sudah terpasang.

Perusahaan tidak boleh gagap terhadap teknologi. Harus efisien, lebih efektif dan lebih responsif terhadap kebutuhan penumpang yang menuntut tarif lebih murah, pelayanan lebih professional dan perusahaannya lebih kompeten.

Akhir-akhir ada perseteruan seolah taksi resmi (bukan konvensional) tidak mau berubah dan anti perangkat aplikasi. Di Semarang dan Solo sudah ada taksi resmi beraplikasi melengkapi upaya menggaet penumpang. Taksi Kosti yang merupakan usaha taksi berbadan hukum yang dibentuk para sopir. Hal ini dapat ditiru usaha taksi lainnya.

Demikian pula dengan ojek sudah mulai marak menggunakan aplikasi. Tentunya, pemda mulai menertibkan keberadaan gojek. Jika tidak, kota-kota akan dipenuhi gojek dan gejala ini sudah mulai nampak di Kota Semarang.

Lain halnya dengan Kota Solo, sejak awal menolak adanya ojek dan taksi *on line*. Dikhawatirkan akan terjadi persoalan sosial. Dan ternyata terbukti beberapa hari lalu, muncul demo angkutan umum versus gojek. Kota Solo tidak diijinkan bisnis gojek, tapi ijin dikeluarkan pemda tetangga. Jelas, mobilitas tertinggi ada di Kota Solo. Alhasil, meski Solo menolak akhirnya operasi ojek juga pasti di Kota Solo. Padahal Kota Solo sekarang sedang gencar membenahi transportasi umum. Ada delapan rute *bus system transit* dalam kota dan tujuh aglomerasi Solo Raya yang akan melayani wilayah kabupaten sekitarnya.

Jika pemda yang sudah ada ojek, sebaiknya memilih kendaraan roda tiga. Apalagi daerah layanan berupa pedesaan yang berbukit dan masih jarang atau belum tersedia transportasi umum.

Kendaraan roda tiga seperti bajaj tertutup atap, tidak tersiram air ketika hujan tiba, tidak kena terik matahari jika musim panas. Lajunya dapat terkendali tidak lebih dari 60 km/jam. Mampu daerah tanjakan, dapat diberikan argometer seperti di India sebagai pengukur tarif. Kapasitas 2-3 orang dan bisa angkut barang. Di perkotaan dapat dijadikan angkutan lingkungan atau *feeder*.

Sekarang momentum membenahi transportasi umum. Semoga kekisruhan transportasi *on line* tidak terulang lagi di Jawa Tengah. Dituntut kesadaran kepala daerah dimulai dengan tidak membiarkan transportasi umum yang ada tergerus keberadaan transportasi *on line*.

Menyegerakan Penataan Transportasi Umum ¹

Djoko Setijowarno ²

Demo angkutan umum nampaknya tidak akan berhenti. Dimulai dari Yogyakarta kemudian berlanjut ke Medan, Malang, Tangerang, Bandung, Semarang, dan bisa jadi akan diikuti di daerah lain.

Sejak era reformasi, perhatian pemerintah terhadap keberadaan transportasi umum kian menurun.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada kewajiban pemerintah termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk menyelenggarakan transportasi umum (pasal 138, 139 dan 158) dan kewajiban memberikan subsidi operasional (pasal 185).

Di Jawa Tengah, misalnya, jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi tinggal 20 persen, sehingga beberapa trayek transportasi pedesaan sudah hilang. Dan ini tentunya berpengaruh pada pola mobilisasi warga pedesaan dan tingkat kemiskinan.

Adapun bus antar-kota dalam provinsi (AKDP) yang beroperasi sudah kurang dari 40 persen dengan tingkat isian (load factor) juga kurang dari 40

1 Kompas.com Senin, 27 Maret 2017

2 Peneliti Lab. Transportasi Unika Soegijapranata

persen. Idealnya, load factor minimal 70 persen agar usaha angkutan umum tetap berjalan.

Hal yang sama juga terjadi di perkotaan, rata-rata angkutan umum yang beroperasi rutin kurang dari 30 persen dengan tingkat isian kurang 40 persen.

BST dan BRT

Pada 2004, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai menggagas bus system transit (BST) dengan kosep membeli pelayanan (buy the service). Kota Batam sebagai pilot project pertama.

Namun, dalam perkembangannya hingga sekarang, tidak banyak kota yang serius menyelenggarakan BST tersebut. Selain kendala anggaran juga kemampuan sumber daya manusia di daerah yang terbatas. Bahkan, yang lebih ironis, program BST jadi ladang korupsi dan kolusi mulai kepala daerah hingga bawahannya.

Saat ini sudah lebih dari 20 kota di Indonesia menyelenggarakan program BST. Penyelenggaraan bus rapid transit (BRT) di Jakarta sudah bisa jadi contoh nyata bagi daerah. Di Jakarta, sejumlah bus antre hadir di halte menunggu penumpang naik dan turun.

Berkebalikan di daerah, penumpang antre menunggu bus kapan akan hadir di halte, dikarenakan jumlah armada bus melayani yang kurang. Di daerah, program BST asal ada, tidak diurus serius.

Sepeda motor dan LGCC

Menurunnya pengguna angkutan umum mulai dirasakan saat sepeda motor mudah didapat dan terjangkau kemampuan warga untuk diangsur. Dengan uang muka Rp 500.000 sudah memiliki sepeda motor.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepeda motor berkembang pesat. Sebelum 2005, produksi sepeda motor kisaran 2 juta – 3 juta unit per tahun. Sekarang, diproduksi rata-rata sudah mencapai 8 juta unit sepeda motor per tahun.

Kemudian muncul kebijakan mobil murah dan hemat energi (low cost green car/LCGC) dapat fasilitas khusus dari pemerintah tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Keberadaan LCGC turut mempengaruhi warga makin beralih ke kendaraan pribadi.

Manajemen layanan transportasi umum tidak banyak berubah. Manajemen kepemilikan pribadi, sistem setoran dan ngetem membuat angkot kurang diminati penumpang. Alhasil, angkot kian ditinggalkan.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diluncurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 200 triliun per tahun. Penikmat terbesar adalah sepeda motor (53 persen) dan mobil pribadi (40 persen). Adapun angkutan umum hanya menikmati 3 persen subsidi (terendah) dan mobil barang 4 persen.

Transportasi berbasis aplikasi

Di era Presiden Joko Widodo, mulai marak penggunaan teknologi informasi dan merambah di sektor transportasi. Muncullah angkutan umum sewa beraplikasi, baik ojek sepeda motor maupun taksi.

Sepeda motor sewa atau ojek apalagi yang beraplikasi, jumlahnya meningkat pesat. Tidak hanya di Jakarta, tetapi sudah merambah di beberapa kota lainnya.

Sekadar catatan, ojek pangkalan berkembang saat krisis moneter 1998, karena banyak terjadi pengangguran. Dalam semua itu, Pemerintah lupa untuk membenahi transportasi umum.

Mendasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek tidak termasuk jenis transportasi umum. Sepeda motor bukan kendaraan yang berkeselamatan. Sepeda motor hanya cocok untuk digunakan sebagai angkutan lingkungan.

Keberadaan taksi beraplikasi memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkannya. Selain tarif yang relatif murah dibanding taksi resmi. Keberadaan teknologi informasi tidak dapat dicegah dan sangat membantu konsumen mendapatkan transportasi umum.

Kota Solo melarang beroperasi taksi beraplikasi. Moda ini dapat diizinkan beroperasi jika bergabung dengan taksi resmi yang sudah ada, jadi, tidak membentuk jenis angkutan umum yang baru. Adapun ojek on line dilarang beroperasi, kecuali untuk antar makanan (go food) atau barang.

Pada 2016, Kemenhub telah mengeluarkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang Tidak dalam Trayek Tetap. Secara eksplisit, transportasi online sudah diakomodir.

Masalahnya, para operator transportasi online kurang sepakat dengan aturan tersebut dan menginginkan tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat.

Padahal, online sebenarnya hanya sistem. Dengan keterbatasan SDM di daerah, pemda perlu mempertimbangkan masak-masak pemisahan taksi resmi dan taksi online ini.

Peran kepala daerah sangat besar untuk menyegerakan penataan transportasi umum di daerahnya. Pemimpin yang mengurus transportasi umum, sesungguhnya adalah pemimpin yang ikut mengurus kebutuhan rakyatnya, terutama kebanyakan rakyat kecil.

Jika sang pemimpin mampu dan berhasil menata transportasi umum, sangat boleh jadi, dia mampu menata wilayahnya.

Mengarah Jalan Searah ¹

Djoko Setijowarno ²

Awal tahun 2017, warga Kota Semarang disuguhi program jalan searah. Dimulai jalan Veteran, jalan Menteri Supeno, Jalan Dr. Karyadi, putaran Taman KB dan jalan Mayjend. MT Haryono. Kemudian berlanjut di awal bulan Februari untuk sebagian ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Kapten Piere Tendean, Jalan Thamrin dan Jalan Gajah Mada. Sebenarnya, beberapa ruas jalan tersebut, sebelum masa reformasi sudah searah, seperti seluruh ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Kapten Piere Tendean, Jalan Thamrin dan Jalan Gajah Mada. Sekarang hanya mengembalikan ke posisi semula. Namun, warga sudah melupakan itu, sudah hampir 20 tahun berlalu.

Walau mendapat penolakan warga, karena kaget dan kurang sosialisasi menjadikan sejumlah jalan di hari pertama penerapan mengalami kemacetan. Idealnya, memang harus dilakukan sosialisasi dan simulasi. Memang tidak dapat ditolak adanya jalan searah ini.

Jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, namun kapasitas jalan tidak bertambah, cenderung berkurang. Aktivitas parkir tepi jalan telah menyebabkan gangguan samping di sejumlah ruas jalan hingga menyebabkan kapasitas jalan berkurang.

1 Jawa Pos, 13 Februari 2017

2 Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Jalan searah sudah menjadi konsekuensi dari sebutan Semarang sebagai Kota Metropolitan yang tinggi tingkat mobilisasi warganya. Sayangnya, aturan sistem jalan searah tidak dibarengi dengan menggalakkan program penataan transportasi umum.

Pada pispisnya, jalan dengan sistem satu arah dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan mengurangi tundaan pada ruas-ruas jalan dan persimpangan. Asalkan gangguan tepi jalan juga harus dihilangkan. Sangat efektif untuk pola jalan *grid*. Yang diterapkan di Semarang ada yang bukan pola *grid*, bervariasi. Setidaknya mampu menampung 50% arus lalu lintas. Pola atau sifatnya permanen dan sementara. Sementara diterapkan pada hari atau jam tertentu. Misalnya, diterapkan dari jam 06.00 hingga jam 22.00 atau di hari libur dan akhir pekan tidak berlaku sistem satu arah.

Secara teori, keuntungan lain adalah dapat mengurangi hambatan-hambatan pada persimpangan (konflik kendaraan membelok dan konflik arus kendaraan dengan penyeberang jalan), meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan (tidak berarti waktu perjalanan dapat lebih cepat), memungkinkan penyesuaian lebar lajur lalu lintas (dapat menambah kapasitas ataupun menambah lajur baru), meningkatkan waktu tempuh, memungkinkan perbaikan pengoperasian angkutan umum (terhindari berangkat dan pulang melalui jalan yang sama), terjadinya penyebaran lalu lintas (menghindari kemacetan pada jalan-jalan yang berdekatan), menyederhanakan pengaturan lampu pemberi isyarat lalu lintas (kasus koordinasi), dan gangguan oleh kendaraan yang keluar masuk parkir pada pinggir jalan berkurang

Namun ada kerugiannya, seperti mempengaruhi aktivitas usaha di kiri kanan jalan (mengurangi angka penjualan), menyulitkan penyeberang jalan, menyebabkan waktu perjalanan bertambah lama bagi sejumlah pemakai jalan (harus berputar, tetapi dapat juga lebih cepat), kurang menyenangkan bagi lingkungan permukiman, memungkinkan fatalitas bertambah akibat kecepatan kendaraan tinggi, menyulitkan angkutan umum apabila tidak diberikan lajur khusus bis yang perlawanan arus (*contra flow*), pejalan kaki tidak harus searah dengan lalu lintas kendaraan bila berjalan di luar kerb, menyulitkan masyarakat yang tidak terlalu sering bepergian ke daerah tersebut.

Bagi kendaraan-kendaraan untuk kebutuhan darurat, seperti pemadam kebakaran dan ambulance terpaksa memutar, bagi pendatang baru membingungkan dan memungkinkan pemasangan jalan sistem satu arah yang semula kawasan tenang berubah menjadi kawasan yang ramai.

Untuk merencanakan jalan satu arah harus mempertimbangkan jaringan jalan yang ada apakah dapat diperoleh sepasang jalan searah untuk mendistribusikan arus yang sebelumnya dua arah. Pengaruh yang muncul terhadap pengoperasian angkutan umum. kemudian, apakah perlu dilakukan pertimbangan terhadap larangan parkir untuk memenuhi jumlah lajur yang cukup. Perubahan apa saja yang perlu dilakukan dalam perambuan, marka, lampu pemberi isyarat lalu lintas dan peralatan pengontrol lainnya.

Memperhitungkan pula pengaruh dari angkutan barang. Juga pengaruhnya terhadap daerah-daerah pembangkit lalu lintas sekitar jalan satu arah tersebut dan diperhitungkan pula pengaruh dari sistem perparkirannya. Dapat pula mempertimbangkan geometrik jalan satu arah, pertemuan dengan lalu lintas dua arah tidak menimbulkan kemacetan maupun masalah keselamatan.

Jalan searah ini akan efektif, jika dibarengi dengan penataan transportasi umum yang memadai. Jalan searah hanya dapat mengurai ketersendatan lalu lintas, namun tidak dapat mengatasi ketersendatan lalu lintas. Tidak ada proses peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. yang ada hanya beralih lewat jalan mana.

Program penataan transportasi umum harus dikebut, jika perlu di sejumlah jalan searah dilakukan program *contra flow* untuk kendaraan umum, seperti tahun lalu dilakukan Pemkot. Surakarta ketika menjalankan program jalan searah. Parkir tepi jalan harus dihilangkan untuk menambah kapasitas jalan.

Daerah Minati Bangun Kereta Ringan ¹

Djoko Setijowarno ²

Kereta ringan atau *light rail transit* (LRT) sudah mulai terbangun di Indonesia. Dimulai dari LRT Jabodetabek lintas Cibubur-Cawang (14,3 km dan 4 stasiun), lintas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10,5 km dan 7 stasiun) dan lintas Bekasi Tmur-Cawang (18,5 km dan 5 stasiun). Berikutnya, diikuti LRT Sumatera Selatan di Palembang lintas Bandara Sutan Mahmud Badaruddin II - OPI (24,3 km dan 13 stasiun) dan LRT Jakarta lintas Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun (6 km dan 4 stasiun).

Keunggulan LRT layang adalah bebas hambatan, menghilangkan perlintasan sebidang dengan jalan raya. Tidak mengganggu perjalanan kereta, terhindar gangguan kriminal dan sabotase.

LRT Sumatera Selatan mulai bangun Oktober 2015 dalam rangka Asian Games 2018 di Kota Palembang. Pekerjaan konstruksi per Januari 2017 mencapai 30% . Pengerjaannya cukup mengganggu lalu lintas harian warga Palembang. Terlebih saat pekerjaan pondasi berlangsung. Pembangunan jalur LRT menggunakan median jalan dan pengerjaannya dilakukan 24 jam. Pekerjaan konstruksi ditarget selesai akhir Desember 2018 dan siap dioperasikan Juni 2018. Mengingat jalan-jalan di dalam Kota Palembang sudah semakin adat

1 Jawa Pos, 27 Februari 2017

2 Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

lalu lintasnya, sehingga perlu jalur alternatif di jalur yang sama tetapi bebas hambatan.

LRT Sumatera Selatan ini unik selain akan melayani angkutan perkotaan (Kota Palembang dan Kab. Banyuasin) juga penumpang bandara. Jalur LRT melintasi aliran Sungai Musi, dibangun bentang jembatan 445 meter bersisian dengan konstruksi Jembatan Ampera sekarang. Di sepanjang jalur akan terbangun 13 stasiun dan satu depo berkapasitas 14 train set. Tipe proyek adalah *design and built* melalui penugasan berdasar Perpres No. 116 Tahun 2015 dan Perpres No. 55 Tahun 2016 kepada kontraktor pelaksana PT Waskita Karya dan pengoperasian sarana pengadaan, perusahaan, pengoperasian dan pemeliharaan) akan diselenggarakan PT Kereta Api Indonesia.

Lebar jalan rel 1.067 mm dengan *axle load* 12 ton. Kecepatan rencana 100 km/jam. Kecepatan maksimum 85 km/jam. Konstruksi berupa *elevated (slab track)* dengan persinyalan *fixed block with cap signal* (ETCS Level 1). Sistem electrical dengan *third rail system* (sistem rel ketiga) 750 VDC.

Setiap rangkaian terdiri 3 *cars* (kereta) berkapasitas 445 penumpang. Lama berhenti di stasiun satu menit. Kecuali di Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan Stasiun OPI selama 10 menit. Pembuatan sarana oleh PT Inka di Madiun. Sarana yang disiapkan sebanyak 8 train set (6 train set operasi dan 2 train set perawatan dan cadangan).

Biaya pembangunan Rp10,5 triliun, setelah diaudit oleh konsultan independen. Cukup mahal sekitar Rp 465 miliar/km. Bandingkan membangun jalan rel di permukaan Rp 30 miliar/km.

Bikin iri

Setelah melihat perkembangan LRT Sumatera Selatan, beberapa daerah mulai berminat dengan melakukan studi kelayakan kereta ringan. Harapannya dapat terbangun di daerahnya. Demam kereta ringan sudah menjangkit beberapa kepala daerah. Padahal jika melihat kondisi transportasi umum berbasis jalan raya, masih kepayahan dan kurang dikembangkan sungguh-sungguh. Akan tetapi mau melompat untuk mengelola kereta ringan.

Investasi untuk membangun kereta ringan tidaklah murah. Pengadaan sarana mencapai Rp 710 miliar untuk pembelian sarana dan fasilitas pendukung. Untuk sarana sudah kontrak dengan PT Inka Rp 385 miliar. Belum lagi nanti pengoperasiannya harus disubsidi. Jelas banyak pemda yang tidak sanggup memberikan subsidi, karena keterbatasan APBD. Selain Kota Jakarta yang memiliki APBD Rp 70an triliun, paling tinggi tidak mencapai Rp 8 triliun untuk kota dan kabupaten.

Di sisi lain, Kota Palembang termasuk berhasil membangun bus sistem transit mencapai 8 koridor sejak tahun 2009. Banyak kota lain dalam waktu bersamaan belum sampai 5 koridor terbangun. Hanya Kota Pekanbaru sudah 7 koridor yang dioperasikan.

Berdasarkan studi PT Pricewaterhouse, besaran ATP diperkirakan kisaran Rp 5 ribu. Sedangkan tarif keekonomian Rp 25.500/orang. Besaran rata-rata tingkat isian 33% dengan frekuensi 48 perjalanan KA/hari. Diperkirakan jam sibuk 06.00-09.00 dan 16.00-19.00. *Headway peak hour* 15 menit dan *headway non peak hour* 30 menit.

Kota Bandung dan Surabaya lebih dulu menyiapkan studi kelayakan kereta ringan. Dua jalur trem di Surabaya dan dua jalur kereta ringan layang untuk Bandung. Pemda tidak hanya minta dibangun pemerintah pusat, namun kemampuan subsidi dan jumlah penggunanya nanti setelah beroperasi harus dikalkulasi. Harus ada kebijakan transportasi untuk memaksa warganya menggunakan transportasi umum supaya tidak sia-sia terbangun.

Kemampuan finansial APBD terbatas, cukup membangun transportasi publik berbasis jalan raya. Mulai operasikan bus sedang hingga bus gandeng. Di Bogota sudah mencoba bus gandeng hingga 3 unit dalam satu rangkaian. Prasarana jalan sudah tersedia, tinggal adakan armada bus, bangun halte, garasi dan perangkat IT untuk pelayanan lebih baik.

Kota Semarang yang berhasrat membangun LRT, dapat mempertimbangkan ini. Demam transportasi umum baik, tetapi jangan memaksa kehendak harus kereta ringan, sementara kemampuan finansialnya rendah.

Menuju Transportasi Kendal yang Tertata ¹

Djoko Setijowarno ²

Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Wilayah Aglomerasi Kedungsepur akan mengalami lonjakan ekonomi. Utamanya setelah diresmikan Kawasan Industri Khusus (KIK) Kendal oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pasti akan ada peningkatan mobilitas yang berdampak peningkatan ekonomi. Sejumlah harapan dan kegiatan yang dapat menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan untuk membangun layanan transportasi Kabupaten Kendal yang lebih tertata.

Pertama, meninjau ulang Rencana Induk atau Masterplan Transportasi Kabupaten Kendal selaras dengan peninjauan ulang RTRW Kabupaten Kendal. Antara transportasi dan tata ruang harus sejalan dan selaras.

Kedua, menata kembali transportasi umum dengan membuat Rencana Induk atau Masterplan Transportasi Umum. Aksesibilitas layanan transportasi umum harus dapat menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman, serta melewati kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, simpul transportasi.

1 Jawa Pos, 9 Januari 2017

2 Kepala Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata

Ketiga, sebelum nantinya mengelola transportasi umum dengan konsep *buy the service* (membeli pelayanan), dapat dimulai dengan mengkhususkan angkot untuk angkut pelajar pada jam berangkat dan pulang sekolah. Operator angkot dapat diberikan subsidi sebagai bentuk kepedulian

Keempat, rencana jaringan bus rapid transit rute Weleri-Kendal-Semarang yang sudah direncanakan Pemprov. Jawa Tengah dapat segera direalisasi untuk membantu mobilitas warga.

Kelima, kemungkinan adanya kereta komuter Weleri-Semarang juga rencana kereta ringan (*light rail transit*) Kendal-Semarang-Demak-Kudus dapat meningkatkan mobilitas warga.

Keenam, memiliki dua jalan lingkar (*ring road*) yang sudah dapat mengurai lalu lintas menerus (*through traffic*) tidak masuk ke dalam lalu lintas lokal cukup membantu kelancaran lalu lintas. Namun yang sering terjadi, dengan adanya jalan lingkar tidak akan bertahan lama, karena terlalu banyak akses masuk akibat munculnya kawasan pertumbuhan baru di sepanjang jalan lingkar, seperti SPBU, rumah makan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membuat jalur lambat untuk menjaga kecepatan dan mengurangi jumlah akses langsung dari kawasan terbangun dengan jalan lingkar.

Ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan transportasi dengan *intelligent transport system* (ITS). Dengan penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi bertujuan membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan.

Kedelapan, pengelolaan parkir modern dengan meminimalkan aktivitas parkir di tepi jalan, membuat kantong-kantong parkir. Termasuk juga kantong parkir untuk truk barang yang kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Dengan membuat Rencana Induk atau Masterplan Pengelolaan Parkir. Selain dapat meningkatkan pendapatan juga bagian untuk menertibkan dan menambah kapasitas jalan yang ada dengan mengurangi titik-titik lokasi parkir di tepi jalan.

Kesembilan, membangun transportasi logistik dan penumpang hingga ke kawasan pedesaan, sehingga dapat memunculkan sistem transportasi pedesaan. Transportasi pedesaan menjadi penting mengingat wilayah

Kabupaten Kendal yang pedesaan lebih dominan, sehingga perlu dipikirkan transportasi umum yang manusiawi. Ke depan, tidak boleh angkutan barang digunakan untuk mengangkut orang di pedesaan yang sering dilakukan selama ini.

Kesepuluh, dampak pembangunan jalan tol ruas Batang-Semarang terhadap perekonomian di Kabupaten Kendal pasti ada. Terutama bagi warga yang terdampak tidak langsung, seperti pelaku ekonomi di jalur pantura dan warga penggarap lahan pertanian. Hal ini perlu dipikirkan jangan sampai memunculkan pengangguran baru. Rest area yang berada di ruas tol dapat menjual produk warga Kabupaten Kendal. Pemanfaatan rest area untuk mengembangkan potensi Kabupaten Kendal dengan melibatkan pelaku ekonomi yang terkena dampak tidak langsung. Warga petani penggarap dapat bekerja di sektor non formal pengelolaan jalan tol tersebut.

Kesebelas, Kawasan Industri Khusus Kendal akan menimbulkan kawasan tarikan baru mobilitas warga. Letak KIK yang bersisian dengan jalan lingkar Kaliwungu diprediksi akan menghambat perjalanan lalu lintas kendaraan untuk perjalanan menerus (through traffic). Pihak manajemen KIK diminta menyediakan sarana transportasi umum bagi pekerja. Baik dari luar menuju ke kawasan KIK maupun sebaliknya dan di dalam kawasan KIK tersebut.

Keduabelas, menyediakan fasilitas jalur transportasi tidak bermotor (non motorized transport), seperti jalur trotoar (pedestrian) dan jalur sepeda di kawasan perkotaan, seperti di Kaliwungu, Kendal, Weleri, Sukorejo. Membangun sarana dan prasarana (sarpras) transportasi harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Harapannya dalam lima tahun ke depan sudah nampak pelayanan transportasi di Kabupaten Kendal yang lebih tertata.

Konektivitas Lewat Kereta Bandara ¹

Djoko Setijowarno ²

Kereta merupakan sambungan antar moda yang efektif dan efisien melayani masyarakat. Ini adalah visi Presiden Joko Widodo yang diwujudkan dalam pembangunan sejumlah kereta bandara, seperti Kereta Bandara Soekarno Hatta, Bandara Minangkabau dan Bandara Adi Soemarmo.

Berawal dari tersedianya Stasiun Maguwo yang digeser mendekati pintu keluar Bandara Internasional Adi Sucipto di Yogyakarta. Dianggap sudah ada konektivitas sebagai kereta bandara. Setiap perjalanan KA Prameks Jurusan Yogyakarta-Solo atau sebaliknya selalu berhenti di Stasiun Maguwo.

Selanjutnya dibangun kereta bandara yang menghubungkan Bandara Internasional Kualanamu dengan Stasiun Medan yang terletak di pusat Kota Medan sepanjang 28 km. Kereta bandara ini mulai beroperasi pada 25 Juli 2013.

Proyek kereta Bandara Soekarno Hatta membentang sejauh 36 kilometer dengan rute Manggarai - Sudirman - Duri - Batu Ceper - Bandara Soekarno Hatta. Kapasitas angkut diperhitungkan untuk 332 ribu penumpang dengan kisaran tarif Rp 100 ribu – Rp 150 ribu. Biasanya nanti setelah akan dioperasikan, tarif

1 Jawa Pos, 17 April 2017

2 Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

sebesar itu diturunkan disesuaikan dengan kemampuan penggunanya. Asal nanti tarifnya tidak serendah Bus Damri atau setinggi taksi bandara. Dapat diambil di antaranya sekitar Rp 75 ribu – Rp 100 ribu, seperti halnya di negara tetangga Malaysia dan Thailand.

Ada lagi kereta Bandara Minangkabau juga akan segera dioperasikan. Panjangnya 23 km dengan layanan rute Padang – Tabing - Bukuh dan Bandara Internasional Minangkabau. Kapasitas angkutnya 348 penumpang untuk sekali jalan. Rencananya Kereta Bandara Internasional Minangkabau dan Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan diluncurkan tahun ini.

Di Kota Palembang sedang dibangun kereta ringan (*light rail transit/LRT*) sejauh 23,4 km yang membentang dari Bandara Sultan Badarudin II hingga Kawasan OPI. Jaringan kereta ini juga memadukan jalur kereta bandara dengan kereta perkotaan. Terdapat 13 stasiun yang akan melayaninya.

Terayar adalah kereta Bandara Adi Soemarmo yang baru dilakukan *ground breaking* pada 8 April 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Jalur kereta bandara ini menghubungkan Stasiun Solo Balapan dengan Bandara Adi Soemarmo sejauh 13,5 km.

Jalur tersebut merupakan jalur eksisting antara Stasiun Solobalapan – Stasiun Kalioso sepanjang 3,5 km. Kondisi eksisting jalur tersebut melewati perkampungan di kelurahan Gilingan, Nusukan dan Kadipiro. Sebagian jalur kereta bandara Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo berdampingan dengan jalan Tol Solo – Kertosono.

Pembangunan kereta bandara memang gencar dilakukan di era Presiden Joko Widodo. Contohnya, kereta bandara Adi Soemarmo yang proyeknya baru saja diresmikan. Indonesia bisa dianggap terlambat dalam urusan membangun kereta bandara. Jika mengandalkan transportasi jalan saja, maka bisa mengganggu mobilitas penumpang terjadi gangguan.

Indonesia sudah bisa dibilang terlambat untuk perkara membangun kereta bandara. Pengalaman Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai rujukan. Dulu pemerintah cuma membangun akses jalan tol, akibatnya ketika macet atau ada gangguan lain, tidak bisa *berbuat apa-apa ketika banjir tiba. Ditambah empat lajur lagi, juga tidak menyelesaikan masalah.* Karena menumpuk semua perjalanan di jalan tol.

Meski begitu, dengan pesatnya pertumbuhan industri maskapai penerbangan, dilengkapinya bandara dengan akses kereta menjadi indikator kondisi transportasi suatu negara. Saat ini, baru Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara) yang sudah mengoperasikan kereta bandara.

Dengan adanya kereta bandara, artinya banyak alternatif transportasi. Volume penumpang yang masih sedikit jangan menjadi alasan kereta bandara kemudian tidak dibangun.

Bandara Adi Soemarmo sekarang bisa dikatakan masih sepi. Tetapi ke depan bakal ramai, apalagi ada akses kereta juga ke Yogyakarta. Tapi selain itu, pembangunan kereta bandara juga harus didorong penuh oleh pemdanya.

Setidaknya hingga 2019 sudah beroperasi 5 kereta bandara, yakni Bandara Internasional Kualanamu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Minangkabau, Bandara Internasional Sultan Badaruddin II, dan Bandara Internasional Adi Soemarmo. Masih ada kemungkinan tiga bandara lagi yang mengikutinya, yakni Bandara Raden Intan, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Bandara Jawa Barat International Airport (JBIA).

Jika semuanya bisa beroperasi, suatu capaian pembangan kereta bandara yang belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya untuk membangun konektivitas simpul transportasi.

Lantas, bagaimana dengan Bandara Internasional Ahmad Yani yang terletak di Kota Semarang. Berpindahnya terminal penumpang ke sisi utara dan ditargetkan selesai dibangun pertengahan tahun 2018, mengisyaratkan dapat dibangun jaringan kereta bandara. Bentuk jalurnya beragam, bisa berupa kereta ringan seperti di Palembang atau kereta bandara dengan jalur tersendiri.

Selain tersedia taksi, BRT Trans Semarang dan Bus Damri, perlu dipikirkan jalur Kereta Bandara A. Yani. Kereta bandara menandakan transportasi massal modern di masa depan.

Terminal Nyaman, Bukan Mimpi, Tapi Nyata ¹

Djoko Setijowarno ²

Apabila menyebut terminal penumpang, sebagian besar masyarakat merasa kurang suka dan ada rasa was was jika memasukinya. Hal ini tidak terlepas dari rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan jika berada di dalam terminal, seperti aksi copet, dibius, suasana kotor dan kumuh, sehingga ingin segera keluar.

Akibatnya, sekarang pengguna bus umum berkurang, kecuali bus umum yang berangkat dari *pool* yang sudah disediakan seperti terminal mini yang nyaman dan aman.

Namun saat ini ada sedikit harapan setelah diterbitkan Permenhub Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, supaya kondisi pelayanan terminal ke depan lebih baik dari yang sekarang. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan sungguh diperhatikan dalam peraturan tersebut.

Terminal akan terbagi menjadi beberapa zona, seperti zona penumpang bertiket merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang

1 Jawa Pos, Senin, 6 Maret 2017

2 Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

bertiket yang telah siap masuk kendaraan. Zona ini meliputi ruang tunggu berupa ruang eksekutif (*lounge*) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (*lounge*), ruang dalam di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*). Zona penumpang belum bertiket, tempat dimana calon penumpang, pengantar dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket.

Pembagian zona ini bertujuan untuk memberikan rasa selamat, aman dan nyaman bagi pengguna jasa terminal. Sudah tidak ada nantinya penumpang bersliweran di antara kendaraan yang siap berangkat atau tiba. Penumpang akan masuk kendaraan umum setelah kendaraan tersebut siap diberangkatkan. Seperti halnya kereta di stasiun dan pesawat udara di bandara.

Sejak era reformasi dan otda, kondisi terminal di daerah kian memburuk. Terminal adalah salah satu aset pusat yang diserahkan ke daerah untuk dikelola. Namun dalam perjalanan waktu, banyak aset terminal kurang terawat bahkan dijual dan dipindah ke daerah pinggiran. Alasannya akan dibangun baru dan dapat memberi layanan lebih. Nyatanya, terminal hanya sebagai sumber PAD tanpa diberikan anggaran yang memadai untuk operasi dan pemeliharaan.

Pembinaan terhadap aparat pengelola juga tidak dilakukan. Yang penting dapat memberikan kontribusi buat PAD dianggap lebih dari cukup. Konsep terminal sebagai simpul pelayanan sudah hilang, beralih menjadi sumber ekonomi.

Belum lagi dengan pemindahan sejumlah terminal yang semula berada di pusat kota, kemudian dipindah ke daerah pinggiran yang sepi dan minim akses angkutan umum. Dampaknya, cukup banyak bangunan terminal yang mangkrak dijauhi penggunanya. Padahal untuk membangun terminal sudah dikucurkan puluhan miliar APBD maupun APBN.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta tempat perpindahan moda transportasi.

Menurut Permenhub Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, untuk menetapkan lokasi terminal

harus memperhatikan (1) tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan, kesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi RTRW Kab/Kota, (2) kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan kinerja jaringan dan jaringan trayek, (3) kesesuaian dengan rencana pengembangan atau pusat kegiatan, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain, (4) permintaan angkutan, (5) kelayakan teknis, finansial dan ekonomi, (5) keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan (6) kelestarian lingkungan hidup.

Terminal terklasifikasi menjadi terminal tipe A, B dan C yang didasarkan pada kriteria tingkat permintaan angkutan, keterpaduan pelayanan angkutan, jumlah trayek, jenis pelayanan angkutan, fasilitas utama dan fasilitas penunjang, dan simpul asal tujuan angkutan.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemhub. Saat ini terdapat 143 terminal tipe A dikelola pusat yang didalamnya termasuk Terminal Mangkang dan beberapa terminal di Jateng lainnya.

Nantinya, di terminal akan dilakukan pengecekan kesehatan pengemudi bus dan kondisi bus. Terminal berfungsi sebagai instrumen kendali perjalanan bus umum. Setiap pengemudinya wajib masuk terminal dengan membawa kartu perjalanan. Tidak seperti sekarang, cukup lempar lembaran uang ke oknum petugas terminal untuk tidak masuk terminal. Jika ada pengemudi yang membandel, ijin dapat dibekukan atau dicabut demi keselamatan.

Membangun terminal di pusat kota lebih strategis. Tahun 2016, Terminal Tirtonadi mendapat pemasukan sekitar Rp 5,2 miliar dari retribusi penumpang, parkir, bus dan sewa kios. Biaya operasional untuk 209 pegawai sekitar Rp 4,5 miliar. Jumlah pengunjung rata-rata 9.800 orang per hari. Dihampiri 1.410 armada bus AKAP dan AKDP.

Terminal Mangkang yang sudah dikelola Kemenhub tentu akan mengikutinya. Meskipun berada di pinggir kota. Masih perlu upaya inovatif menarik penumpang dan armada bus, sehingga Terminal Mangkang dapat menjadi kebanggaan Kota Semarang.

Membenahi Tata Kelola Bus Pariwisata ¹

Djoko Setijowarno ²

Angkutan pariwisata sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata (pasal 154).

Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, menyebutkan angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Pasal 23, menyatakan pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata wajib memenuhi pelayanan untuk mengangkut wisatawan, pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata yang disertai dengan pemandu wisata, tidak masuk terminal, besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata,

1 Jawa Pos, 1 Mei 2017

2 Peneliti Lab. Transportasi Unika Soegijapranta

tidak boleh digunakan selain keperluan wisata, tidak terjadwal dan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Selagi musim libur panjang 22-24 April 2017 telah terjadi dua kecelakaan bus pariwisata. Pertama di Jalan Raya Puncak, Megamendung Kabupaten Bogor dengan korban 4 meninggal dunia dan 20 orang terluka. Kedua di Jalan Raya Rancabal-Ciwidey, Kampung Mawar 01/05, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan ini memakan korban dua orang warga setempat yang sedang berjalan kaki meninggal dunia. Yang teranyar, musim libur panjang 29 April – 1 Mei 2017 terjadi kecelakaan melibatkan bus pariwisata di Jalan Raya puncak Desa Ciloto, Cipanas, Kab. Cianjur dengan korban 13 meninggal dunia.

Seusai kecelakaan, pengemudi yang sering dijadikan tersangka. Pasalnya, UU LLAJ cenderung menyalahkan pengemudi jika terjadi kecelakaan. Padahal masih ada peran manajemen (pengusaha) harus ikut mengawasi operasional angkutan pariwisata.

Peran operator dan juga KIR yang dilakukan oleh Pemda juga terkait. Jika tidak dilakukan dengan baik dan benar, bisa memicu terjadinya kecelakaan. Demikian pula dalam hal pemberian SIM oleh Polantas, harus diperketat lagi. Untuk memperoleh SIM A/B1/B2 Umum seharusnya diwajibkan mengikuti pelatihan khusus pengangkutan penumpang atau barang.

Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum. Waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor umum paling lama 8 jam sehari. Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudi kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam (pasal 90 UU LLAJ).

Masalah jam kerja pengemudi ini, kerap tidak berlaku di operasional bus pariwisata. Ada anggapan pengemudi bisa istirahat saat pelancong kunjungi obyek wisata. Anggapan yang keliru. Juga untuk mengirit membayar honor pengemudi. Bagaimanapun, pengemudi memiliki keterbatasan fisik sementara dalam menjalankan tugasnya harus komitmen menegakkan aturan keselamatan yang tinggi.

Masyarakat juga cenderung memilih bus pariwisata yang murah, tapi abai terhadap keselamatan jiwanya. Untuk menghindari kembali jatuhnya korban jiwa, lanjut akademisi senior itu, konsumen bolkeh bahkan wajib menanyakan tentang surat menyurat terkait perijinan dan aspek keselamatan kendaraan yang akan ditumpangnya.

Sebaliknya, pengusaha angkutan umum termasuk bus pariwisata wajib menjelaskan tentang itu jika diminta konsumen. Keselamatan transportasi menjadi tanggung jawab kita semua. Pengusaha tak boleh hanya memikirkan untung saja, tapi keselamatan dan pelayanan diabaikan.

Ada beberapa pengusaha bus pariwisata menggunakan bekas bus reguler untuk bus pariwisata. Cuma *cashing* yang diubah, seolah seperti bus baru. Sementara, kondisi didalamnya masih tetap bus lama dan tidak banyak berubah. Pemerintah perlu melakukan tindakan *sweeping* ke beberapa operator bus pariwisata yang dicurigai bermasalah. Jika ketahuan melanggar, bisa ditutup izin usahanya. Jika tidak berizin, bisa dilanjutkan pelanggaran terhadap tindakan usaha angkutan umum illegal.

Tata kelola bus pariwisata harus ditata ulang. Pengusaha, Pemda dan awak angkutan harus bekerja dengan baik sesuai aturan UU dan mereka harus mengutamakan keselamatan. Nyawa manusia tak bisa ditukar apalagi hanya untuk kepentingan ekonomi pengusaha atau pihak lainnya.

Antisipasi supaya bus pariwisata tidak menimbulkan korban lagi, masyarakat harus kritis jika menyewa bus pariwisata. Jangan hanya mau piknik dengan sewa bus murah, akan tetapi factor keselamatan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, mintalah fotocopy STNK, uji kir, SIM pengemudi dan ijin usaha transportasinya.

Menjelang musim liburan tengah tahun 2017, banyak sekolah akan melakukan kegiatan studi tour ke beberapa obyek wisata. Seringkali pihak bisnis travel menawarkan sejumlah paket ke beberapa sekolah. Biasanya pihak sekolah mencari yang tawaran harganya lebih murah diprioritaskan. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota se Jawa Tengah harus ikut mengawasi, setidaknya sudah mulai diberikan surat himbauan ke sekolah untuk menyewa bus pariwisata yang berkeselamatan.

Angkot dan Ojek Online ¹

Djoko Setijowarno ²

Pertikaian antara angkot dan ojek pangkalan dengan ojek *online* masih tetap berlanjut, jika tidak diatur. Walaupun Kemenhub telah menerapkan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pasalnya, Permenhub tersebut hanya mengatur untuk roda empat, bukan roda dua seperti ojek sepeda motor.

Keberadaan ojek sepeda motor mulai marak ketika terjadi krisis moneter tahun 1998. Banyak terjadi PHK di beberapa perusahaan yang menimbulkan penangguran. Pekerjaan yang paling mudah saat itu adalah menjadi pengemudi ojek sepeda motor.

Cuma ojek sepeda motor tidak berkeliaran di jalan raya, seperti ojek *online* sekarang. Cukup mangkal di ujung-ujung jalan, maka disebut ojek pangkalan (opang).

Keberadaan ojek pangkalan tidak banyak dimasalahkan oleh angkot. Karena tidak mengambil pangsa pasarnya. Justru dengan ojek pangkalan biasanya menjadi pengumpan (*feeder*) angkot yang beroperasi tidak bisa melayani hingga kawasan perumahan atau pemukiman.

1 Jawa Pos, 3 April 2017

2 Pengajar Prodi. Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Dari sisi waktu, jelas ojek *online* lebih cepat. Dari segi aksesibilitas, ojek *online* yang *door to door*, bisa mendekati asal dan tujuan perjalanan. Lainnya halnya dengan angkot, harus berjalan kaki ke jalan dan menunggu jika lewat. Selain bisa menembus kemacetan dengan melanggar aturan belalu lintas, ojek *online* tidak ngetem seperti hanya angkot.

Buruknya, ojek *online* tidak memiliki lokasi parkir, sehingga sering menggunakan trotoar untuk memarkir kendaraannya. Kalau dulu, para orang tua sering menggunakan becak untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Sekarang berganti dengan diantar ojek *on line*.

Sejatinya, penyebab penurunan penumpang yang menggunakan angkot bukan lantaran jumlah ojek *on line* kian bertambah banyak. Jauh sebelum itu, ketika produksi sepeda motor mulai meningkat tahun 2005, banyak penumpang angkot yang beralih menggunakan sepeda motor. Sepeda motor murah dan mudah untuk mendapatkannya. Pasalnya, cukup dengan membayar uang muka Rp 500 ribu sudah bisa membawa pulang satu unit sepeda motor. Pelajar yang sering menggunakan angkot untuk ke sekolah, sudah dibelikan orang tuanya sepeda motor. Bahkan pelajar SMP pun kerap kita lihat menggunakan sepeda motor ke sekolah. Meski, sekolahnya tidak mengizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Masih bisa menitipkan sepeda motor di dekat penitipan atau area parkir sekolahnya.

Angkot juga perlu berbenah, setidaknya penumpang setia akan kembali melirik angkot. Agar murah, perlu mendapat subsidi operasional dari pemerintah. Peran pemerintah daerah sangat besar untuk menata kembali angkot. Manajemen angkot masih merupakan manajemen pribadi sudah harus dihilangkan. Jika ingin dapat subsidi dari pemerintah, harus berbadan hukum. Pemda hendaknya dapat menata segera keberadaan angkutan umum di daerahnya masing-masing. Dimulai dengan memberikan subsidi angkot yang ada. Sembari menata menuju konsep pembelian pelayanan (*buy the service*).

Lantas bagaimana dengan ojek *online* yang sudah cukup banyak penggemarnya. Kepala daerah harus mulai menata. Misalnya, membatasi wilayah operasi dan membatasi cc atau isi silinder sepeda motor yang boleh digunakan. Ada identitas resmi, dilakukan pembinaan agar dapat berlalu lintas dengan benar. Perusahaan *online* juga perlu diajak komunikasi agar tidak menerapkan tarif

yang justru membahayakan pengemudi dan penumpang ketika di jalan raya. Tidak jarang ditemui pengemudi saat mengendarai sepeda motor tidak dalam konsentrasi pikiran sebagai pengemudi yang sedang membawa penumpang. Lantaran selalu melihat layar monitor telepon genggam yang nempel dan berada di atas *speedometer* untuk segera mendapat order penumpang lagi. Sangat membahayakan dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Keberadaan ojek sepeda motor masih dapat diatur mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala daerah punya wewenang untuk mengatur terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pasal 17 menyebutkan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pasal 65, juga menyatakan dalam melaksanakan tugas, kepala daerah berwenang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

Walikota Depok sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Sepeda Motor. Dalam aturan tersebut, melarang ojek *on line* menaikkan orang di kawasan terminal serta di badan jalan yang telah dilayani angkutan dalam trayek alias angkot.

Di sisi lain, belajarlah dengan beberapa kepala daerah yang sudah memulai memberi perhatian untuk angkot, seperti Pemkab. Tabanan (Bali), Pemkab. Kebumen (Jawa Tengah), Pemkab. Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Pemkab. Pak-Pak (Sumatera Utara), di Jawa Timur ada Pemkab. Kediri, Pemkab. Ponorogo dan Pemkab. Trenggalek. Kepala daerah tidak perlu khawatir kehilangan suara akibat menata angkot. Justru jika angkutan umum tertata, pamor kepala daerah tersebut makin cemerlang. Karena kebijakannya dapat dirasakan masyarakat kebanyakan.

MENEMUKAN MAKNA DARI IDE DAN GAGASAN

Bagian 6

Menjadi Komunitas
Akademik



Unika dalam Wacana Publik
2016-2017

Demokrasi Pengetahuan dan Universitas ¹

Prof. Dr. Y. Budi Widianarko ²

Saat ini tatanan sosial politik negeri ini sedang dibalut kabut tebal. Apa yang sedang berlangsung bisa dipandang sebagai buah pahit dari demokrasi.

Salah satu biang keladi dari munculnya kabut tebal itu adalah kebebasan penyampaian pendapat yang tidak dilandasi etika dan dipagari oleh rasa tanggung jawab. Akibatnya telah terjadi berbagai penyesatan informasi, yang bukan hanya membingungkan, melainkan sampai tingkat tertentu sudah berhasil memecah belah masyarakat.

Gejala ini berkembang sangat subur seiring dengan semakin terbukanya akses terhadap internet dan media sosial. Sudah sangat jamak kita jumpai berbagai unggahan berita dan video yang menanamkan kebencian dan fitnah – bahkan sejak dari judulnya.

Namun, seperti layaknya buah, ada pula buah yang manis dari demokrasi. Salah satu buah manis demokrasi yang kian mewujud adalah apa yang disebut sebagai demokrasi pengetahuan (*knowledge democracy*). Dalam masyarakat yang telah semakin mengarah pada masyarakat pengetahuan (*knowledge society*), saat ini pengetahuan – atau lebih tepatnya penguasaan

1 Kompas, Sabtu, 7 Januari 2017

2 Rektor Unika Soegijapranata dan Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

terhadapnya-telah tersebar luas dalam masyarakat.

Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah bukan lagi menjadi monopoli ilmuwan universitas. Banyak keahlian yang berakar dalam pengalaman hidup warga. Begitu pula kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi mulai tersebar merata dalam masyarakat.

Singkatnya, meminjam ungkapan Beth Simone Noveck (2016), Guru Besar Universitas New York, telah berlangsung pergeseran dari pakar “resmi” (*credentialed experts*) ke pakar “warga” (*citizen experts*) dalam berbagai bidang iptek.

Akses yang semakin meningkat terhadap teknologi internet dan media sosial—yang semakin canggih dan kian mudah digunakan—merupakan faktor penting yang memacu pergeseran dari “pakar resmi” ke “pakar warga” tersebut. Sebagian besar dari kita tentu telah menyaksikan dan bahkan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibagikan oleh “pakar warga” secara cuma-cuma di media sosial.

Dalam keseharian dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari kita pernah merasakan betul jasa para “pakar warga” ini. Contoh yang paling sederhana adalah saat kita menemui kesulitan dengan produk elektronik dan *gadget* baru. Untuk bisa mengoperasikan peranti tersebut kita cukup menyimak video bertajuk “*unboxing... (merek dan seri gadget Anda)*” yang diunggah di media sosial.

Dalam media sosial yang sama, kita bisa mendapati begitu banyak orang yang secara sukarela berbagi beragam pengetahuan dan keterampilan—dari yang sederhana hingga yang sangat ilmiah—mulai dari “*bermain karet gelang*” atau “*membuat pupuk organik*” sampai “*human genome sequencing*”. Fenomena ini kembali menegaskan bahwa manusia memang makhluk yang selalu terombang-ambing oleh dorongan egoisme dan altruisme.

Tantangan bagi universitas

Proses demokratisasi pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan menuntut universitas dan lulusannya untuk beradaptasi. Sebagai sebuah keniscayaan, proses ini tidak perlu—dan memang tidak bisa dimitigasi.

Universitas sudah tidak bisa lagi mendaku sebagai pemegang monopoli riset dan ilmu pengetahuan. Mungkin, hanya satu monopoli universitas yang masih dapat dipertahankan, yaitu pendidikan peneliti karena otoritasnya dalam pemberian gelar akademik.

Universitas harus menggeser haluannya. Jika sebelumnya universitas adalah kutub utama pengetahuan, ia kini hanya merupakan satu dari banyak kutub dalam konstelasi ilmu pengetahuan yang multipolar. Untuk itu, universitas harus memiliki kesadaran baru, yaitu kesadaran kewargaan (*civic awareness*).

Dengan kesadaran baru itu, universitas dapat menemukan peran kewargaannya (*civic role*). Peran kewargaan universitas adalah bersama segenap unsur masyarakat terlibat—secara setara dan saling menghargai—dalam pembangunan wilayah dan nasional.

Proses keterlibatan bersama dalam pembangunan wilayah dan nasional ini dikenal sebagai proses ko-kreasi (*co-creation*). Universitas yang telah terlibat dalam ko-kreasi layak mendapat predikat universitas transformatif (*transformative university*) atau universitas generasi keempat.

Jika ceruk pergumulan universitas sudah terumuskan dengan baik—yaitu berproses menjadi universitas transformatif—bagaimana dengan para alumninya? Dalam kaitan ini, dengan memadukan pemikiran John Dewey dan Bruno Latour, Gert Biesta (2007)—seorang filsuf dari Universitas Stirling, Inggris—merumuskan bahwa agenda penting yang harus diemban oleh universitas dalam peran kewargaannya adalah justru memperkuat proses demokratisasi ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, para alumni sebagai warga masyarakat berhak dan perlu menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam proses ko-kreasi—tanpa harus berada dalam pemerintahan. Perlu disadari dalam sistem pengetahuan multipolar ini, ada lebih banyak pakar (ahli) daripada jumlah mereka yang “beruntung” membantu pemerintah. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Noveck (2016)—dikotomi antara demokrasi dan kepakaran adalah sebuah kekeliruan.

Akhirnya—di tengah kemelimpahan dan ketersebaran pengetahuan dalam masyarakat—universitas harus mengambil peran sebagai simpul

pengetahuan (*knowledge hub*). Sebagai sebuah simpul, universitas harus mampu menjalankan *crowdsourcing* (*out-sourcing from the crowd*).

Idealnya universitas berperan dalam menghimpun, mengelompokkan, memadukan, dan menyajikan beragam pengetahuan yang tersebar itu dalam bentuk yang lebih siap untuk didayagunakan oleh pengambil keputusan (baca: pemerintah) dalam meningkatkan mutu pembangunan.

Masa Depan E-Learning ¹

Dr Ridwan Sanjaya ²

PEMBELAJARAN berbasis elektronik atau *e-learning* yang berkembang di Indonesia, memunculkan banyak tanda tanya. Antara lain perihal materi pembelajaran yang mungkin dan tidak mungkin diunggah ke *e-learning*, kesiapan peserta didik, serta peran pendidik.

Dalam mencari jawab atas berbagai tanda tanya tersebut, seyogyanya kita perlu melihat *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik punya pertanyaan serupa pada awal-awal perkembangannya. Saat itu, pertanyaan seputar *e-commerce* terkait dengan kemungkinan pembeli menyentuh produk secara fisik yang tidak bisa lagi dilakukan, sensasi tawar menawar yang hilang, atau produk tidak sesuai.

Namun berbagai pertanyaan tersebut tidak lagi muncul ketika melihat peningkatan perdagangan digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada juga pihak yang menilai konsumen *e-commerce* saat ini adalah generasi muda yang tidak lagi melihat kelemahan perdagangan digital di masa lalu. Generasi Y dan Z yang lahir pada saat teknologi informasi sudah sedemikian berkembang, memercayai pasar digital yang telah ada sejak mereka lahir.

1 Suara Merdeka 27 Agustus 2016

2 Dosen Sistem Informasi Unika Soegijapranata Semarang

Tetapi jika dilihat lebih detil, sebetulnya telah terjadi penyesuaian atas *e-commerce*. Saat itu, mekanisme pembayaran masih didominasi dengan penggunaan kartu kredit yang ternyata banyak disalahgunakan di Indonesia. Hasil dari adaptasi tersebut, saat ini penggunaan transfer ATM dan pembayaran tunai saat barang diterima paling favorit digunakan.

Inovasi atau lebih tepatnya penyesuaian dalam perdagangan elektronik, membuktikan bahwa teknologi cukup lentur dalam mencari jati diri. Jika awalnya transaksi online masih sangat rendah, kini banyak masyarakat yang mencari pendapatan, bahkan sejak ia sekolah melalui perdagangan di internet.

Pembelajaran Elektronik

Hal ini tidak jauh berbeda dari pembelajaran elektronik. Saat ini masih banyak guru maupun dosen yang memercayai banyak sisi pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh pembelajaran daring dan meragukan kontennya menyentuh pada inti pembelajaran. Beberapa penelitian bahkan mengingatkan ada beberapa materi yang tidak mungkin disampaikan melalui pembelajaran daring. Contoh materi yang menyisipkan nilai-nilai pendidikan, praktikum laboratorium, atau praktik yang berhubungan dengan manusia.

Namun, evolusi pembelajaran daring saat ini belum usai dan masih mencari bentuk, seperti halnya sejarah perdagangan elektronik. Beberapa penelitian mencoba menggabungkan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka yang disebut sebagai *Hybrid Learning*, *Blended Learning*, *Flipped Learning*, *Technology Mediated Instruction*, atau *Web-Enhanced Instruction*. Semua istilah tersebut merujuk pada perpaduan manfaat dari pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Namun digital natives dari generasi Y dan Z bisa saja mengubah semua penelitian yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Ketika para peneliti dan yang diteliti tertatih-tatih menyikapi perubahan teknologi, anak-anak usia SD dan SMP sangat fasih memelajari pembuatan slime dari *YouTube* maupun situs-situs internet. Orang tua terkaget-kaget melihat anaknya melakukan eksperimen mencampur sabun, shampoo, minyak bayi, lem, tepung kanji, bahkan boraks.

Mereka menyebut karya itu sebagai Holy Slime, Thai Slime, Jelly Slime, dan masih banyak lagi. Sebagian besar hasil karya dipakai untuk membersihkan debu, sekadar permainan, atau bahkan dijual lagi ke teman.

Pembuatan slime memang tidak mengharuskan akurasi, namun aktivitas anak-anak dalam mempelajari dan menghasilkan produk hanya melalui tampilan video atau catatan harian orang lain merupakan suatu kenyataan yang mengagumkan. Saat ini, itu makin jamak ditemui.

Selain pembuatan slime, anak-anak sangat terbiasa menggunakan internet untuk pembelajaran Aikatsu Magic Box, solusi video game, masak-memasak, rias wajah, atau masih banyak lagi. Namun sekali lagi, evolusi pembelajaran daring saat ini belum usai dan masih mencari bentuk yang sesuai. Berbagai aktivitas tersebut menandakan bahwa generasi berikutnya sudah siap dengan pembelajaran elektronik.

Dalam pembelajaran, guru dan dosen seringkali menampilkan video-video dari internet yang menyentuh untuk menyisipkan nilai-nilai pendidikan yang saat ini seringkali susah ditemui oleh siswa dalam keseharian. Berbagai video menyentuh di *YouTube* sebetulnya merupakan iklan komersial, namun banyak ditemui di berbagai pelatihan kepribadian, motivasi dan kepemimpinan.

Guru dan dosen yang membagikan video inspiratif di kelas menyadari, kejadian yang disampaikan merupakan pembelajaran yang dapat menginspirasi siswa.

Sama seperti perdagangan digital, pembelajaran daring memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan membuktikan perannya secara lebih maksimal. Menurut Joao Paiva dalam *British Journal of Educational Technology*, sebutan digital, elektronik, ataupun daring dalam istilah pembelajaran nantinya akan hilang karena teknologi merupakan konsekuensi dari proses pembelajaran itu sendiri.

Mutu Indonesia dan Kepercayaan Diri ¹

Prof. Dr. Y. Budi Widianarko ²

“Hasil survei di Jakarta menunjukkan, meningkatnya aras pendidikan formal seseorang memberikan peningkatan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara OECD.”

MENGACU laporan *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC) yang sudah dirilis oleh OECD (organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan), Victoria Fanggidae dari Perkumpulan Prakarsa menyuarakan keprihatinan tentang mutu sumber daya manusia Indonesia.

Victoria menunjukkan posisi manusia dewasa Indonesia (survei hanya dilakukan di Jakarta) di peringkat paling bawah dari semua negara peserta survei, yang umumnya negara maju, pada hampir semua jenis kompetensi untuk bekerja dan berkarya dalam masyarakat, seperti literasi, numerasi dan kemampuan pemecahan masalah. Telaah lebih teliti terhadap laporan PIAAC (2016) mengungkapkan sejumlah temuan menarik. OECD menyebutkan rendahnya skor literasi dan numerasi manusia dewasa Indonesia (Jakarta) tidak mengejutkan karena pembandingnya adalah negara-negara yang secara ekonomi lebih maju.

1 Suara Merdeka, 30 November 2016

2 Rektor Unika Soegijapranata dan Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Yang unik adalah bahwa sebaran skor kompetensi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan semua negara peserta. Disparitas ini berimbas pada penghasilan. Hasil survei di Jakarta menunjukkan, meningkatnya aras pendidikan formal seseorang memberikan peningkatan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara OECD.

Dalam hal ini penambahan satu standar deviasi durasi pendidikan formal (3,4 tahun) memberikan peningkatan penghasilan (per jam) sebesar 26,6 persen dibandingkan dengan peningkatan hanya 14,4 persen di negara-negara OECD. Artinya, mereka yang mengenyam pendidikan tinggi berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak. PIAAC adalah sebuah survei internasional yang dilakukan di lebih dari 40 negara. Survei tersebut mengukur kompetensi kognitif utama dan kompetensi lain yang diperlukan di dunia kerja (workplace) agar seseorang dapat berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi masyarakat.

Salah satu asumsi penting yang mendasari PIAAC (2016) adalah bahwa kemampuan mengelola informasi dan memecahkan masalah menggunakan komputer menjadi sebuah kebutuhan mendasar, seiring dengan semakin berperannya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia kerja dan pendidikan.

Studi PIAAC secara khusus dirancang untuk mengukur sejumlah keterampilan utama dalam mengolah informasi, yaitu literasi, numerasi, dan pemecahan masalah dalam lingkungan kaya teknologi (*problem solving in technology-rich environments*).

Tersingkir dari Persaingan

Orang dewasa yang sangat menguasai keterampilan yang diukur dalam survei tersebut kemungkinan besar berpeluang mengambil kesempatan yang tercipta oleh perubahan teknologi dan struktur masyarakat. Mereka yang kesulitan dalam menggunakan teknologi-teknologi baru akan menghadapi risiko besar tersingkir dari persaingan.

Asumsi PIAAC ini berlaku universal, termasuk bagi lulusan perguruan tinggi Indonesia. Di tengah sejumlah kritik terhadap kinerja pendidikan tinggi Indonesia yang masih berada di bawah negara-negara lain, bahkan di

kawasan ASEAN sekalipun, ternyata kita juga menyaksikan jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat.

Dalam catatan saya, lulusan Unika yang berkarier di luar negeri semakin bertambah. Banyak fakta menunjukkan bahwa berkarier di luar negeri bukan hanya terbuka bagi mereka yang studi di luar negeri dan bukan hanya bagi mereka yang menapaki karier mulai dari entry-level job di luar negeri. Ternyata peluang juga terbuka bagi mereka yang merajut karier di dalam negeri terlebih dahulu.

Dalam catatan saya, ada seorang alumnus Unika mengawali karier selama 10 tahun di sebuah kota kecil (Pati) dan kini bergabung dengan sebuah perusahaan multinasional menjadi seorang factory manager di Petaling Jaya, Malaysia. Ada juga seorang alumnus Unika yang memulai karier di Cikupa Tangerang, kemudian ke Johor Baru, lantas ke Singapura. Saya juga mengenal seorang yang menjalani pendidikan universitas di Undip yang setelah berkarier cukup lama di Thailand, kini di Swedia.

Kita perlu menyadari bahwa kompetensi dibentuk sejak di kampus dan terus dikembangkan ketika berkarier di perusahaan atau organisasi. Itulah esensi *life long learning* (belajar sepanjang hayat), dan perguruan tinggi sebenarnya punya mandat untuk mempersiapkan individu yang siap dan mampu terus mempelajari hal-hal baru sesuai dengan dasardasar pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di kampus, serta sekaligus dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat. Yang terakhir ini dikenal sebagai sebagai *soft skills* atau *transferrable skills*, yang dapat dimaknai sebagai keterampilan yang dapat dilatihkan atau diakuisisi oleh siapa saja.

Di samping terus mengembangkan keterampilan atau kompetensi seseorang yang ingin sukses berkarier dituntut punya kemampuan lain, yaitu keterampilan memperkenalkan diri (*to make yourself heard*). Dalam hal ini, literasi dalam teknologi informasi dan komunikasi amat penting. Kemampuan untuk memanfaatkan jejaring sosial, seperti LinkedIn dan sejenisnya, sangat krusial untuk memperkenalkan kompetensi seseorang.

Dewasa ini kegiatan untuk memburu talenta-talenta hebat di dunia profesional (*head hunting*) sudah sangat jamak dan bahkan telah menjadi

salah satu bagian tidak terpisahkan dari perkembangan dunia bisnis dan industri global. Selain itu pemanfaatan internet tidak terbatas hanya pada mereka yang ingin berkarier sebagai profesional.

Bagi mereka yang bekerja di dunia seni dan desain, termasuk animasi, memperkenalkan karya melalui internet adalah salah satu cara paling efektif untuk menembus pasar global. Begitu pula bagi mereka yang berniat untuk berwirausaha, internet memberi ruang bagi produk dan kreativitas pemasaran (*e-commerce*) yang nyaris tanpa batas. Singkatnya, fenomena *the world is flat* yang dikemukakan oleh Thomas LFriedman (2005) satu dekade lalu, kini sudah menjadi sesuatu yang lazim.

Kegiatan *global outsourcing* untuk *call center*, kontrak produksi, jasa akuntansi, analis kesehatan, jasa pendidikan dan sebagainya, yang dulu hanya berlangsung di Tiongkok, India, dan Filipina, kini telah menyebar di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Fakta di atas bisa jadi menunjukkan bahwa sebenarnya kita mesti lebih percaya diri dalam menilai mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu globalisasi memang sudah hadir dan berhasil menjebol batasbatas antarnegara. Maka pesan yang dapat disampaikan kepada para mahasiswa adalah isiapa pun Anda, lulusan mana pun Anda, yang penting adalah kompetensi Anda (*you are what you are good at*). Di manapun Anda berkarier, selama Anda terus mengembangkan kompetensi khas dan unggul, maka peluang selalu terbuka di berbagai belahan dunia.

Toilet ¹

Margaretha Sih Setija Utami ²

“Revolusi Toilet” yang dicanangkan Steven Kandouw, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Kompas, 10/5), menarik untuk ditindaklanjuti.

Sekali waktu saya meminta mahasiswa mengingat tempat paling tidak menyenangkan saat SD. Ternyata kebanyakan menuliskan toilet SD sebagai tempat paling tak menyenangkan karena kotor, menjijikkan, suasananya menyeramkan, dan cenderung diletakkan di pojok yang sepi.

Toilet makin dipersepsikan sebagai tempat tak menyenangkan karena guru sering menghukum dengan mengunci murid di dalam toilet atau menyuruh murid membersihkan toilet. Bahkan ada mahasiswa yang menulis: “Saat kami di SD, malaikat tidak mau tinggal di toilet, jadi para setanlah yang menunggunya.”

Ada banyak hal mengapa toilet jadi tempat tak nyaman. Dua hal penting adalah, pertama, di Indonesia para murid SD adalah anak usia 7-12 tahun yang belum diajari bagaimana menjaga kebersihan toilet setelah mereka pakai. Yang membersihkan toilet di rumah orangtua atau pembantu. Murid SD ingin toilet bersih, tapi belum mampu menjaga kebersihan. Kedua, banyak

1 Kompas 24 Mei 2017

2 Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata; Perminat Psikologi Kesehatan

dari kita yang belum memiliki kesadaran bahwa setelah menggunakan toilet kita harus membersihkannya sehingga orang lain yang akan menggunakan menjadi nyaman.

Menurut seorang ahli psikologi, Erik Erikson (1902-1994), anak usia 7-12 tahun tidak lagi dalam tugas perkembangan berkaitan buang air besar dan buang air kecil. Seharusnya mereka sudah lulus masa “*toilet training*”. Kenyataannya, banyak murid SD kita belum mampu menggunakan toilet dengan benar. Hal ini diperparah sikap banyak orangtua yang suka hal-hal praktis sehingga anak dibiasakan menggunakan *diaper* (popok). Anak dibiarkan tidak belajar bagaimana mengeluarkan kotoran dalam dirinya secara tepat, tidak sembarang tempat dan waktu.

Erik Eiikson menyatakan, seorang anak sangat tepat belajar *toilet training* di usia 1.5-3 tahun. Pada saat itu anak akan belajar kapan dan di mana melepaskan hal-hal yang dianggap kotor oleh lingkungan tetapi harus dilakukan karena tubuh sudah harus membuangnya. Kalau anak berhasil belajar toilet training, ia akan punya *autonomy* yang tinggi dalam kehidupannya. *Autonomy* di sini diartikan sebagai kemampuan mengendalikan kehendak diri sendiri tanpa menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman lingkungannya. Anak yang tidak berhasil belajar *toilet training* akan mengalami rasa malu dan ragu-ragu dalam hidupnya.

Toilet training mengajari anak. untuk menyadari apa yang dirasakan dalam tubuhnya, dan merencanakan kapan hal yang tidak mengenakan tersebut harus dikeluarkan tanpa merugikan orang lain. Dalam *toilet training* anak akan belajar bahwa dirinya tahu tentang kondisi sendiri dan kondisi lingkungan, belajar bahwa dirinya bisa mengendalikan diri sendiri, dan dia belajar bagaimana membuat orang lain menjadi bahagia.

Dalam teori delapan tahap perkembangan psikososial, Erik Erikson mengatakan, kegagalan tahap awal akan memengaruhi tahap berikutnya. Membaca keprihatinan Steven Kandouw, kita perlu merenungkan seberapa besar keberhasilan *toilet training* kita selama ini. Mungkinkah ini sebagai salah satu titik awal pembentukan karakter bangsa kita yang kurang berhasil?

Toilet training yang tidak berhasil juga memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial individu tersebut. Dalam kehidupan orang dewasa

saat ini, kita bisa membaca di media sosial banyak orang yang tidak paham kapan mengeluarkan rasa tidak enak dalam dirinya secara tepat. Media sosial menjadi “sungai” tempat primitif kita membuang kotoran tanpa memikirkan bahwa apa yang kita keluarkan dapat “menularkan penyakit” bagi orang lain. Banyak kata kotor yang berasal dari kekesalan dalam diri yang kemudian dikeluarkan sembarang tempat dan waktu. Pelaku merasa benar karena orang lain juga berbuat hal yang sama.

Semoga “Revolusi Toilet” Bapak Steven Kandouw jadi gerakan kita bersama bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga generasi penerus kita.

Berbagi Risiko Tata Kelola Riset ¹

Prof. Dr. Y. Budi Widianarko ²

Kritik Johannes Eka Priyatma di harian ini (27/9/2016) terhadap rekomendasi “Diskusi Kompas” tentang kuantitas, kualitas, dan kontribusi riset untuk pembangunan nasional menarik untuk ditanggapi.

Intinya, Johannes Eka Priyatma (JEP) memandang solusi yang ditawarkan “Diskusi Kompas” itu tak menyentuh akar masalah. Sebagai alternatif, JEP menawarkan pendekatan yang lebih struktural dan komprehensif. Menurut dia, persoalan riset di Indonesia tidak cukup dianalisis dengan hanya pendekatan input sumber daya, seperti dana, sumber daya manusia, regulasi, dan agenda jangka panjang.

JEP menunjukkan peningkatan anggaran riset dari pemerintah telah terbukti tak sertamerta meningkatkan kualitas riset. Demikian pula halnya penambahan jumlah peneliti ternyata juga tak mengungkit kinerja riset. Bagi JEP, kegiatan riset harus dipandang sebagai sebuah realitas yang tidak terpisah dan sebagai akibat dari suprastrukturnya, yakni strategi pembangunan, khususnya perihal inovasi.

JEP menilai kegiatan riset yang ada tidak terkait langsung dengan kegiatan inovasi di dunia nyata (baca: industri). Sebagian besar kegiatan riset, terutama

1 Kompas, Kamis, 20 Oktober 2016

2 Rektor Unika Soegijapranata dan Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

di universitas, hanya berorientasi pada pengakuan akademik. Singkatnya, riset tidak berkembang karena memang tak dibutuhkan.

Gagasan JEP di atas merangsang kita untuk mengernyitkan dahi. Sayangnya, alih-alih memberikan jalan keluar yang sederhana, saya khawatir JEP justru mengajak kita masuk ke palung yang dalam dan gelap. Dalam kondisi saat ini, mengganti paradigma pembangunan mungkin sama muskilnya dengan memindahkan gunung batu. Pengembangan riset harus ditempuh melalui cara-cara yang lebih pragmatis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memutus gejala saling asing (*mutually exclusive*) di antara kegiatan penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk baru (inovasi) oleh industri. Untuk itu perlu terobosan kebijakan tentang tata kelola riset berbasis pada prinsip pembagian risiko di antara para pihak.

Saling asing

Dalam perekonomian berbasis ilmu pengetahuan, universitas merupakan unsur inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah (Lendel, 2010). Idealnya, kegiatan penelitian universitas berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

Salah satu bidang yang memungkinkan terjadinya kontribusi penelitian terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah adalah bidang pangan. Pertumbuhan bisnis dan industri pangan yang sangat pesat, seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan serta daya beli masyarakat, memerlukan pasokan pengetahuan, teknologi, dan produk pangan baru. Sayangnya, ada gejala saling asing yang akut antara kegiatan penelitian di universitas dan praksis pengembangan oleh pelaku usaha. Kaitan antara riset pangan universitas atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha sangat minimal. Pengalaman di Jawa Tengah menunjukkan telah berlangsung proses saling asing antara kegiatan penelitian pangan oleh universitas di satu sisi dan pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha di sisi lain. Pelaku usaha berhasil mengembangkan/ merekacipta banyak produk pangan baru yang bukan saja inovatif, melainkan juga bernilai tambah tinggi dan sekaligus berhasil di pasar (Widianarko, 2011).

Produk pangan yang berhasil dikembangkan pelaku usaha tanpa melalui jalur penelitian formal (oleh universitas) antara lain ceriping, getuk, sirup berbasis buah lokal, bandeng duri lunak, marning, “dodol” tomat, manisan buah, olahan tahu, dan aneka minuman serbuk. Produkproduk seperti Gethuk Trio Magelang, Bandeng Dun Lunak Semarang, Marning Boyolali, Gethuk “Pauli” Salatiga, Tomat Rasa Korma Bandungan, dan Tahu Bakso Ungaran berhasil menjadi ikon daerahnya masing masing.

Salah satu rahasia di balik ke berhasilan mengembangkan produk-produk pangan lokal itu adalah kemampuan mereka dalam mendengar suara konsumen. Namun, dari perspektif penelitian sebenarnya yang mereka lakukan, sebagian besar masih bertumpu pada metode coba-coba (*trials and errors*) yang diramu dengan intuisi bisnis.

Berbagi risiko

Dari tahun ke tahun, pendanaan penelitian yang tersedia untuk universitas cenderung terus meningkat dan sudah selayaknya tidak jadi masalah lagi. Yang diperlukan sekarang adalah penetapan prioritas penelitian yang berorientasi pada produk.

Gejala saling asing antara penelitian universitas dan pengembangan produk komersial bersumber pada ketiadaan prinsip berbagi risiko. Hal ini menyebabkan pelaku penelitian menghasilkan penelitian yang tak memiliki nilai terap sehingga hasil penelitiannya tidak akuntabel. Untuk itu diperlukan sebuah tata kelola penelitian baru yang didasarkan pada prinsip berbagi risiko.

Kerja sama penelitian berbasis berbagi risiko memang tuntutan alamiah dari *knowledge economy*. Dalam pendekatan baru ini, institusi pelaku penelitian dituntut mampu menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan penelitian. Dengan kata lain, kegiatan penelitian dan ilmiah harus bermuara pada *value creation*. Di samping itu, dalam *knowledge economy*, setiap kerja sama maka para pihak memiliki hak dan tanggung jawab.

Hal ini tentu juga berlaku bagi pekerja ilmu yang bernaung di universitas. Definisi formal untuk *risk-sharing agreement* dalam kerja sama penelitian, menurut De Pouvourville (2006), adalah “kontrak di antara dua pihak yang

sepakat bertransaksi dengan kesadaran penuh bahwa ada ketidakpastian yang melekat pada basil dan nilai akhir produk penelitian yang dihasilkan”.

Dengan demikian, kedua pihak siap menerima imbalan dan sanksi sesuai status produk penelitian yang dihasilkan. Jika hasil penelitian terbukti memiliki nilai komersial yang tinggi, pihak pemberi proyek harus bersedia memberikan imbalan (sesuai kesepakatan), sedangkan jika terjadi sebaliknya, pihak pelaksana proyek harus bersedia menerima sanksi.

Model tata kelola penelitian berbasis berbagi risiko di atas tentu saja sangat berbeda dari kelaziman pelaksanaan proyek penelitian di universitas hingga saat ini. Kebiasaan yang berlaku selama ini masih mengasumsikan bahwa setiap pelaku kegiatan penelitian—bagaimanapun status hasilnya—sudah selayaknya mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Dalam kerangka ini, penetapan imbalan dan sanksi menjadi hal yang strategis.

Imbalan (finansial) yang disediakan untuk produk pangan yang berhasil harus menarik peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian. Sanksi (finansial) yang dapat dibebankan kepada peneliti yang gagal menghasilkan produk yang sukses adalah peniadaan imbalan bagi jerih payahnya. Meski demikian, direkomendasikan agar semua biaya penelitian tetap ditukar (*at cost*) oleh pemberi proyek.

Dengan tata kelola baru ini, setiap kegiatan penelitian pangan dengan sendirinya akan akuntabel dan berpeluang besar untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berhasil di pasar.

Bunda Teresa – Mgr. Soegijapranata : Visualisasi Ajaran Kasih ¹

Y. Gunawan, Pr ²

Ulil Abshar Abdalla, Cendekiawan Muslim sekaligus Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), memiliki kekaguman yang luar biasa pada Ibu Teresa dari Kalkuta (1910-1997). Bagi Ulil, Ibu Teresa adalah salah satu visualisasi ajaran kasih, cinta, dan belarasa dengan cara yang sangat baik. Dia adalah Kasih yang mendaging. Keteladanannya tidak hanya konsep, melainkan menjadi praktik konkret tindakan sehari-hari.

Ibu Teresa diangkat menjadi Orang Kudus (Santa) dalam Gereja Katolik di Vatikan (Minggu, 4/9). Paus Fransiskus, dalam homili penetapan Ibu Teresa sebagai orang kudus, menegaskan bahwa Ibu Teresa berkomitmen untuk membela kehidupan dan model kekudusan zaman modern ini.

“Hari ini, saya menyampaikan inilah sosok simbol kewanitaan dan hidup bakti ke seluruh dunia : Semoga dia menjadi model kekudusan! Semoga pekerja tak kenal lelah dalam belas kasih ini membantu kita untuk semakin memahami bahwa kriteria untuk beraksi adalah cintakasih, bebas dari setiap ideologi dan semua kewajiban, ditawarkan untuk semua orang tanpa membedakan bahasa, budaya, ras atau agama”, ujar Paus di hadapan ratusan ribu orang di Lapangan Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma.

1 INSPIRASI, Nomor 146, Tahun XIII, Oktober 2016, hlm 19-20.

2 Kepala Campus Ministry Unika Soegijapranata dan Anggota The Soegijapranata Institute

Ibu Teresa, lanjut Paus Fransiskus, berkomitmen tak henti-hentinya memberitakan janin adalah yang paling lemah, yang terkecil, yang paling rentan. Dia turun sebelum mereka yang letih, dibiarkan mati di sisi jalan, melihat di dalam mereka martabat yang diberikan Tuhan. Untuk Ibu Teresa, belas kasihan adalah “garam” yang memberi rasa untuk pekerjaannya; hal itu adalah “terang” yang bersinar dalam kegelapan bagi banyak orang yang tidak lagi meneteskan air mata untuk kemiskinan dan penderitaan mereka. Misinya ke pinggiran kota dan karya yang tetap bisa dilihat hari ini menjadi bukti kedekatan Allah untuk yang termiskin dari yang miskin.

Kelaparan Kasih

Dunia sekarang ini sedang jungkir balik dan sangat menderita karena sedikit kasih di dalam rumah, di dalam kehidupan keluarga. Orangtua tidak punya cukup waktu untuk anak-anak, tidak punya waktu untuk diri sendiri, dan tidak cukup waktu untuk menikmati kebersamaan. Orang sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan egonya. Sibuk dengan gadgetnya. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh.

Situasi yang demikian itu oleh Ibu Teresa disebut sebagai kelaparan kasih. Ibu Teresa pernah mengungkapkan, “Kemiskinan yang terburuk adalah kesepian dan merasa tidak dicintai. Penyakit terbesar saat ini bukanlah penyakit lepra ataupun TBC, tetapi perasaan tidak dikehendaki. Ada banyak kelaparan kasih dan apresiasi di dalam dunia saat ini dibandingkan kelaparan makanan”.

Realitas dewasa ini diwarnai keadaan memprihatinkan. Awal milenium III ditandai pembunuhan, penjarahan, pembohongan, dan pemerkosaan. Secara tegas Ignacio Ellacuria, filsuf dan teolog El Salvador, Amerika Tengah, mengungkapkan orang zaman ini hidup dalam “dunia yang sakit”. Bahkan Paus Yohanes Paulus II pernah menyebut pada awal milenium baru ini manusia menghadapi “saat yang penuh cobaan dan ketegangan”.

Laporan perkembangan tahun 2000-an dari UNDP memperlihatkan 54 negara menjadi lebih miskin daripada keadaan pada tahun 1900-an, 12 negara mengalami penurunan jumlah anak yang mendaftar ke Sekolah Dasar, penduduk 34 negara mengalami penurunan rentang hidup, lebih dari 25% dari penduduk di 9 negara tidak mempunyai akses pada air bersih, dan lebih dari 25% dari penduduk 15 negara tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Terkait kematian, 14 negara memiliki lebih banyak anak meninggal pada usia balita, 30.000 anak per hari meninggal karena penyakit yang dapat dicegah dan 500 ribu perempuan meninggal ketika hamil atau melahirkan.

Kesadaran Keluarga Besar Manusia

Kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan merupakan situasi yang sampai sekarang masih terjadi. Situasi itu menggerakkan banyak orang untuk peduli dan mewujudkan belas kasih (solidaritas) kepada sesamanya. Gerakan kepedulian itu perlu didasari iman, tidak sekedar rasa kasihan (Jawa: *mesakke*). Salah satu contoh pribadi yang peduli pada nasib sesamanya dan bangsanya adalah Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ (1896-1963).

Pada tahun 1950, Mgr. Soegijapranata pernah membuat refleksi yang sangat inspiratif dan masih relevan sampai saat ini. Betapa pentingnya orang mempunyai kesadaran bersama tentang kepedulian atau belaskasih sebagai keluarga besar umat manusia. Dikatakannya demikian: *“Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar, di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian dan permusuhan”*.

Sebagaimana Santa Teresa dari Kalkuta, Mgr. Soegijapranata juga mengajak orang untuk mendasari setiap tindakan sosialnya itu dengan cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya. Terkait dengan hal ini, ada prinsip hidupnya yang masih terdokumentasi dengan sangat baik di gedung Memorial (Museum) Mgr. Soegijapranata di Kampus Unika Soegijapranata. Prinsip hidup itu adalah *“In dubius, libertas; in necesariis, unitas; in omnibus, caritas”*. Artinya: Dalam hal yang belum pasti, kebebasan; dalam hal yang penting, persatuan; dan dalam segala hal, cinta kasih.

Event perayaan kanonisasi Ibu Teresa menjadi orang Kudus tahun ini mempunyai makna yang istimewa. Orang diingatkan akan makna kasih, belarasa, dan kemiskinan. Benar ujar Ibu Teresa, *“Kadang kita berpikir bahwa kemiskinan hanya berkaitan dengan kelaparan, tidak punya pakaian dan tidak punya rumah. Kemiskinan atas rasa tidak dikehendaki, tidak dikasihi dan tidak dipedulikan adalah kemiskinan yang paling besar, kita harus*

memulainya dari keluarga sendiri untuk memperbaiki kemiskinan jenis ini”.

‘Santa Kaum Papa’ ini mengungkapkan bahwa orang zaman modern ini butuh mencari Tuhan, dan Dia tidak dapat diketemukan dalam kebisingan dan ketergesaan. Tuhan adalah teman dari ketenangan. “Lihatlah pepohonan, bunga, rumput –mereka tumbuh di dalam ketenangan, lihatlah bintang, bulan dan matahari- bagaimana mereka bergerak dalam ketenangan. Kita membutuhkan ketenangan agar dapat menyentuh jiwa”, tuturnya.

Semasa hidupnya Ibu Teresa sering mengatakan, “Mungkin aku tidak berbicara bahasa mereka, tapi aku bisa tersenyum.” Mari kita membawa senyuman dan memberikannya kepada sesama kita, terutama mereka yang menderita. Dengan demikian, kita bisa menghadirkan wajah Tuhan yang berbelas kasih sebagai bentuk visualisasi ajaran kasih Yesus. #

